

PANDUAN WAWANCARA

A. Kepemimpinan dan Isi Kebijakan (*content of policy*)

Indikator	Informasi Lanjutan
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan	– Kepentingan-kepentingan apa dan siapa saja yang terkena kebijakan pembangunan UPS?
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,	– Jenis manfaat yang akan dihasilkan pemerintah dari kebijakan UPS ini. Bagaimana agar hasilnya terealisasi?
c. Derajat perubahan yang akan diinginkan,	– Sejauhmana perubahan yang diharapkan terjadi pada implementasi kebijakan UPS ini? – Bagaimana bentuk perubahannya dalam lingkup individu, kelompok, masyarakat, aparat pemerintah)?
d. Kedudukan /Lokasi pembuat kebijakan,	– Adakah pengaruh letak/lokasi pengambilan kebijakan terhadap efektifitas implementasinya? – Jika ada seperti apa?
e. Pelaksana program	– Bagaimana peran para pelaksana kebijakan UPS mulai tingkat atas hingga bawah? – Bagaimana strategi para pelaksana mengimplementasikan kebijakan UPS agar efektif? – Bagaimana pendekatan dalam sosialisasi, komunikasi kebijakan pembangunan UPS ini?
f. Sumberdaya yang dikerahkan	– Bagaimana mengenai pengelolaan sumber daya yang diperlukan dan bagaimana pengaturannya, apa saja pertimbangannya? Kendalanya?

Lampiran 1 (lanjutan)**B. Kepemimpinan dalam Konteks Kebijakan** (*context of policy*)

Indikator	Informasi Lanjutan
a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> – Bagaimana keterlibatan (proses, kewenangan/peran, strategi) aktor dalam implementasi kebijakan UPS? – Bagaimana relasi kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat terhadap implementasi kebijakan pembangunan UPS? – Mengenai resistensi sebagian warga terhadap pembangunan UPS, bagaimana aktor-aktor yang terlibat menghadapinya?
b. Karakteristik lembaga dan pemimpin,	<ul style="list-style-type: none"> – Bagaimana karakteristik dan kapasitas kelembagaan yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan UPS ini? – Bagaimana peran masing-masing lembaga yang terlibat? – Bagaimana penyikapannya terhadap pembangunan UPS sejauh ini? – Bagaimana peran kepemimpinan pemerintahan daerah ?
c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana terhadap kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> – Bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap para pelaksana kebijakan (aparatur pemerintahan) terhadap kebijakan UPS ini?

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 1

Tanggal wawancara : 9 Juni 2009

Tanya (T) : *Latar belakang kebijakan pengelolaan sampah seperti apa? Kronologis yang DPRD amati dari awal seperti apa? Kondisi sekarang seperti apa? Terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah dan UPS.*

Jawab (J) : Yang pertama saat pemikiran pemerintah itu harus memberikan fasilitas kepada warga untuk melakukan pembuangan sampah. dari sampah di Depok yang ada saat ini diperkirakan sekitar 3000m³ dan mungkin itu bisa bertambah dan baru 40% yang terangkut dan itu semua dibuang ke TPA Cipayung. Sementara 60% sampah lainnya itu tidak jelas dibuangnya kemana ada yang dibuang ke kali, ada yang dibakar, ada yang ke TPA liar dan sebagainya. Dan ini tentu yang 60% menimbulkan dampak lingkungan yang tidak terkontrol. Kali banyak dengan sampah kemudian juga banyak tempat-tempat TPA liar yang akhirnya meresahkan masyarakat dan sebagainya. Di satu sisi kapasitas TPA Cipayung itu sudah maksimal untuk menampung 100% sampah yang diproduksi warga Depok. Oleh karena itu jalan keluarnya bagaimana mencari alternatif lain pembuangan sampah. Dan bukan TPA liar yang menimbulkan bau dan sebagainya, karena memang masalahnya adalah semua orang itu tidak mau tempatnya kebuangan sampah. Mereka mau sampah itu dibuangnya jauh-jauh kalau kita ingin membuang sampah itu dekat rumah warga maka alasan warga tidak mau itu bisa ditanggulangi. Alasan warga itu biasanya bau, kotor dan bisa menimbulkan penyakit. Maka UPS ini dijadikan solusi bagaimana sampah itu tidak dibuang ke TPS Cipayung tetapi bisa dikelola di lokal yang tidak menimbulkan bau dan kebisingan ada solusinya. Jadi dasarnya seperti itu bagaimana kita bisa menanggulangi masalah sampah, supaya bisa tertangani semua 60% sampah dan karena memang begitu banyak sampah yang tidak tertangani. Masih banyak sampah – sampah saat ini ada di kali, selokan di TPA-TPA.

T : *Itu ide awalnya dari Pak Wali kan! Kemudian bergulir cepat 2007 mau jadi ternyata tidak jadi kan akhirnya jadi di 2008 dalam nama UPS. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan dan siapa saja yang terkena langsung maupun tidak langsung atas kebijakan ini?*

J : Pada awalnya itu Pak Wali menamakan SIPESAT dan ingin menjadikan SIPESAT ini menjadi ikon Depok. Tapi karena ada resistensi politik akhirnya diubah menjadi UPS (Unit Pengelolaan Sampah) yang berkepentingan karena memang itu sedang menjadi program RPJMD yang di sahkan oleh DPRD dan Walikota. Maka implementasi dari UPS ini merupakan perwujudan dari pada RPJMD sehingga DPRD pun berkepentingan untuk mewujudkan itu karena sudah menjadi program bersama. Dan bagi masyarakat Tdiri ini akan mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan UPS yang akan dibangun nanti. Selama ini masyarakat bingung dengan adanya UPS itu masyarakat punya pilihan untuk membuang sampah ke UPS tersebut.

T : *Dari pihak lain mungkin khawatir ini dijadikan penjejalan politik bagi Pak Nur pada awalnya dengan memang sesaat ketika dijadikan UPS sudah tidak ada masalah lagi? Kalo dari segi istilah tidak ada masalah lagi sudah setuju bersama, karena kan istilahnya umum.*

T : *Kemudian dari DPRD, pemerintah maupun masyarakat manfaat apa yang diperoleh?*

Lampiran 2 (lanjutan)

J : Kalau bagi DPRD kalau ini berhasil ya juga keberhasilan DPRD juga keberhasilan pemerintah, kalau DPRD kan bagian dari pemerintahan. Keberhasilan UPS ini adalah keberhasilan DPRD dan keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah. Bagi masyarakat Tdiri yang selama ini banyak mengalami kebingungan mau dibuang kemana sampah ini. Masyarakat yang menyadari membuang sampah dia kebingungan. Sementara kalau dia mengharapkan dari DKLH untuk mengangkut itu sangat terbatas, armadanya sangat terbatas . Kadang –kadang seminggu cuma sekali atau dua kali seperti itu. Maka dengan adanya UPS itu masyarakat akan mempunyai pilihan membuang sampah kemana. Dan sebagian masyarakat juga bisa memanfaatkannya sebagai lapangan kerja baru, karena 1 ups bisa menyerap 11 s/d 13 orang itu berarti akan ada orang-orang yang mendapat pekerjaan dengan UPS dan turunan dari UPS itu mungkin nanti ada pekerjaan lain dari limbah sampah dan sebagainya.

T : *Kemudian dengan adanya UPS ini perubahan apa yang diharapkan baik individu, kelompok, masyarakat entah itu misalnya perubahan perilaku yang tadinya buang sampah langsung dibakar tapi ada UPS jadi kesana kemudian mulia dari pemilahan yang diharapkan sejauh mana?*

J : Yang diharapkan semua masyarakat itu artinya punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena tidak ada lagi alasan untuk membuang sampah di tempat yang ilegal, karena pemerintah sudah menyediakan tempat yang legal. Sehingga masyarakat nanti dia akan membuang sampah ke tempat yang tepat, tidak sembarangan lagi. Itu perubahan yang kita inginkan dan perilaku masyarakat nanti dia akan menyadari pentingnya membuang sampah, kepentingan membayar retribusi. Karena mereka juga tahu pembangunan itu butuh dana yang besar wajar juga kalo mereka nantinya dipungut biaya atau sebagainya.

T : *Selanjutnya mengenai pembuatan kebijakan UPS ini kan dipayungi oleh RMJMD tingkat kota, kemudian ketika sudah menjadi program dan proyek yang lebih berperan kan DKP. Kemudian untuk penentuan lokasi?*

J : Kalau secara DPRD kan levelnya kebijakan tetapi secara teknis penentuan lokasi dan sebagainya ya DKP bekerjasama dengan kelurahan dan masyarakat, dan bisa jadi usulan itu datang dari masyarakat. Dia yang menyediakan lahannya dan sebagainya. Semua orang bisa berperan, berperan untuk mengajukan tempatnya digunakan sebagai UPS memang nanti koordinasinya adalah dengan kelurahan setempat. Untuk surveinya, melihat kelayakannya, statusnya, dan sebagainya kelurahan-kelurahan lah yang menindaklanjuti tersebut.

T : *Karena pada resistensi masyarakat itu yang banyak dipermasalahkan selain dari kekhawatiran bau, bising, itu lokasinya kemudian tadi juga sindrom tidak ingin di dekat lokasinya itu ada sampah atau pun UPS atau TPS itu mungkin juga belum bisa membedakan masyarakat.*

J : Di situ masyarakat itu di atas sebabnya karena belum memahami perbedaan antara UPS dan TPS. Mereka menyamakan saja antara UPS dan TPS sehingga kadang-kadang dalam komunikasi itu entah bikin surat atau bikin apa, mereka terbolak-balik kadang pakai UPS kadang pakai TPS. Karena kelihatan dari sini ketika misalnya ada TK Aliyah ingin tutup mereka minta supaya UPS ditutup. Padahal yang masuk tempat pembuangan liar tetapi mereka menyebutnya UPS. Masyarakat masih belum bisa memahami

Lampiran 2 (lanjutan)

seluruhnya pengertian UPS atau TPS sehingga ketika mereka mendengar UPS bayangan mereka akan banyak sampah menumpuk di setiap itu akhirnya mereka menolak memang kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dari pemerintah. Dan terkadang juga walaupun yang sebagian besar itu setuju ada satu orang setuju, itu bisa jadi masalah misalnya seperti di Limo sebenarnya yang tidak setuju itu hanya segelintir orang tetapi dia bisa mengundang orang lain, dia mengundang orang lain dari daerah-daerah lain, warga setempat itu mungkin hanya satu, dua tiga orang tetapi yang lainnya sudah setuju semua. Tetapi dia mengundang orang lain sehingga seolah-olah semua ditolak oleh seluruh masyarakat. Bentrokan antara masyarakat yang setuju dengan yang tidak setuju berbeda dengan TPS Cipayung yang sebagian besar tidak setuju. Karena memang wilayahnya itu secara geografis bukan wilayah perumahan dan selama ini kan memang menjadi TPS itu wilayah dari RW yang lain, ketika RW lain mengajukan tempat, tempat itulah yang diajukan karena tempat itu lokasinya ada tersebut sementara karena melihat dari segi administrasi ada di RW maka izinnya mungkin hanya dengan RW yang memiliki wilayah tersebut ada RW lain yang berdekatan lokasinya dengan lokasi UPS.

T : Kemudian peran DPRD dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan UPS ini efektif mulai dari pemda, pengawasannya seperti apa, dikawalinya kemudian ketika turun program yang dilaksanakan oleh DKP kemudian proyek kegiatan itu sejauh mana peran DPR?

J : Peran DPR ini pertama kita mengontrol sejauh mana pemerintah sudah menyiapkan lokasi, itu yang kita kontrol. Target 20 sudah berapa banyak yang sudah tersedia lokasinya itu kita kontrol kemudian juga dari segi pembangunan, DPRD juga mengontrol tapi memang untuk 2008 ini saya mengakui agak lemah kontrol DPRD terhadap fisik bangunannya. Walaupun kita meninjau tetapi tidak semuanya kita tinjau hanya beberapa yang ada masalah yang kita tinjau, yang tidak menimbulkan masalah yang signifikan kita tidak tinjau. Sehingga kita sendiri diri tidak mungkin. DPRD tidak begitu tahu kualitas bangunannya dan sebagainya. Untuk bangunan-bangunan yang lain mungkin kesibukan pemilu kemarin kita kurang kunjungan ke proyek-proyek fisik. Boleh jadi sebagian proyek-proyek fisik itu tidak berkualitas tapi kita tidak sempat mengontrol.

T : Dengan yang resisten itu apakah memang sudah diputuskan harus dibangun, tetap saja dibangun kemudian peruntukannya dialihkan atau tetap?

J : Ada sebagian yang dibatalkan seperti di Pangkalan Jati Baru karena memang tidak ada kesepakatan dengan warga akhirnya pembangunannya dibatalkan akan dicari lokasi yang baru. Kemudian juga di Taman Cipayung juga seperti itu karena warga tidak setuju dan cukup keras resistensinya ditunda nanti apakah akan dilanjutkan atau tidak tergantung dari akan ada lokasi tempat lain nanti tergantung perkembangan lainnya.

T : Mungkin saya lihat masih dibangun, pembangunan masih berlangsung sampai saat ini?

J : Ya mungkin sejauh ini belum tahu apakah sudah ada perubahan atau tidak dari masyarakatnya atau mungkin sudah mulai berkurang resistensinya, dulu sih usulnya relokasi tapi memang tidak ada tempat lain di daerah tersebut yang layak untuk dibangun UPS andapun ada tidak ditempatkan lain bukan di wilayah tersebut

T : Berarti lahan itu termasuk kesulitan tersendiri ?

Ya, lahan itu kesulitan kita menginginkan itu pinjam

Lampiran 2 (lanjutan)

T : *Mengenai peran DPR dalam mengawasi penggunaan sumber daya yang diperlukan seperti apa? Pengaturan seperti apa? Pertimbangannya seperti apa?*

J : Kita dari DPR yang kita awasi pertama dari segi penggunaan APBD sudah terealisasi apa belum, dan kemudian dari segi kualitasnya sesuai atau tidak, selebihnya kalau ada hal-hal yang lain kita tidak sampai sejauh itu. Karena nanti ada yang, karena tugas DPR bukan sebagai auditor dan sebagainya, karena auditor itu nanti ada berfikir sebagainya, kita sifatnya hanya *controlling* setelah itu dilaksanakan apakah hasilnya itu nanti ada penyimpangan atau sebagainya itu, sesuai spek atau tidak kalau memang kasat mata itu tidak sesuai tanpa ada secara khusus DPR bisa menyikapi tapi kalau hal-hal yang tidak kelihatan kita tidak bisa menyikapi.

T : *Respon DPRD sendiri terhadap resistensi warga terhadap pembanguna UPS ini seperti apa?*

J : Yang kita liat memang resistensi ini karena apa, apa karena memang masalah lingkungan, masalah gangguan kepentingan dengan bisnis dan sebagainya, atau karena politik, Karena 3 hal itu bisa menjadi sebab atau motif penolakan terhadap UPS. Kalau misalnya di daerah limo ada resistensi terhadap UPS segelintir orang sekitar 2-3 orang, kalau dibidang itu karena lingkungan tak jauh dari itu ada TPS liar yang sudah tinggi sampai 2 meter mencemarkan lingkungan warga, air dan sebagainya, dan selama ini tidak pernah ada protes dari warga yang memprotes UPS. Kalau dia peduli dengan lingkungan harusnya itulah yang diprotes. Ada UPS berarti dia mendukung karena kalau ada UPS kegiatan di TPS liar tutup, UPS inilah yang akan berjalan. Tapi dalam kenyataannya sudah bertahun-tahun itu TPS hidup disitu sebagai tempat mereka membuang sampah tapi tidak mengganggu mereka karena mengganggu orang kampung. Karena dipinggir komplek itu mereka tidak protes itu dan ada di hitung-hitung ada sampai 15 titik di komplek tersebut pembuangan sampah memang ada semuanya, ada yang sampai tingginya 2 meter dan mencemarkan air warga tapi tidak diprotes, sehingga kalau dibidang faktor karena lingkungan ini kan bisa dipertanyakan, ada kemungkinan ini masalah bisnis atau masalah politik tapi ada juga masalah ego, kalau di sana kan buang sampah pokoknya saya bayar 15.000 tiap bulan yang ga enak kan di sana ini kan urusan saya. kalau disini karena ego orang lain yang tidak difikirkan tapi ketika itu kan jangankan TPS, UPS juga dia tidak mau. Karena ketika ada demo yang demo itu bukan masyarakat situ, masyarakat yang jauh dari lokasi yang tidak tahu menahu

T : *Itu konteks Limo ya?*

Itu konteks limo, kalau di TPS Cipayung kalau dia bilang lingkungan alasannya lingkungan misalnya air sampahnya nanti masuk ke sumur-sumur mereka. nah ini kan perlu pembuktian sebenarnya itu kalau memang alasannya lingkungan, kalau alasannya politik ya bisa jadi karena waktu jaman kampanye ada orang yang ingin jadi pahlawan untuk membela masyarakat boleh jadi karena faktor lingkungan boleh jadi itu jadi politisasi sehingga lebih besar.

T : *Karena itu kan menjelang pemilu meningkat di bulan januari tapi sekarang hampir menurun?*

J : Itu nanti bisa dilihat indikasinya seperti itu apakah orang-orang yang selama ini menyuarakan ini vokal atau tidak, karena kebetulan kan para caleg ini yang vokal-vokal

Lampiran 2 (lanjutan)

T : *Ada strategi khusus dari DPRD untuk mengurangi atau menanggulangi resistensi warga?*

J : Ya memperbaiki sosialisasi, sosialisasi itu ya harus sampai ke masyarakat, dipastikan sampai ke masyarakat karena jangan sampai kan sudah ada sosialisasi, tapi apakah sampai atau tidak sampai itu warga masyarakat. Misalnya lurah memanggil RT tapi karena RT sibuk. misalnya di komplek dia mau ke satpam, terus orang-orang yang sebenarnya tidak berkompeten ketika hadir disana ya ya saja tetapi ketika balik yang punya rumah tidak sampai solusinya apa, sehingga yang majikan inilah yang marah-marah, karena yang hadir itu bukannya RT-nya. Jadi tetap tidak tahu yang tahu cuma satpamnya atau pembantunya yang datang. Ini kan harus dipastikan informasi ini harus sampai kepada warga langsung.

T : *Kemudian mengenai badan-badan yang melaksanakan kebijakan ini apa saja yang terlibat mulai dari DKP atau ada yang lain yang terlibat?*

J : Yang terlibat adalah PU, karena untuk akses jalannya semakin baik lokasi itu biasanya semakin susah terjangkanya misalnya kalau dia ditengah-tengah pemukiman biasanya infrastruktur jalannya sudah siap, ketika dia jauh dari mana-mana jalannya belum siap, listriknya belum siap, ini kasus di Grogol PU harus intervensi jalan kemudian PLN juga diminta membangun jaringan ke tempat tersebut. Dari segi lokasi bagus jauh dari masyarakat tapi dari segi *support* yang lainnya ini jadi lemah sehingga sampai sekarang belum bisa jalan karena belum bisa masuk

T : *Itu yang dimana?*

J : Itu yang di Grogol, di Grogol Limo, Jalan Mangga.

T : *Untuk peran DKP sendiri sebagai penggerak utamanya yang melaksanakan program ini, itu DPRD lihat seperti apa?*

J : Kalau pertama dilihat dari segi pengadaan itu BPK yang melakukan kemudian dari segi operasionalnya dari DKP sampai nanti dia bisa mandiri dan jalan sendiri

T : *Kalau camat itu keterlibatannya seperti apa? Camat lurah?*

J : Camat dari awal dalam pencarian lokasi dia terlibat dia menawarkan penawaran harga pada warga yang siap, ada yang memang mendukung karena memang hidupnya disampah ya udah tempat saya saja yang dipakai karena selama ini saya memang pengelola sampah. Itu camat yang mencari dalam pendekatan hampir sama dengan aparat kelurahan dan sebagainya. Kemudian ketika ada masalah-masalah camat juga disini yang ikut memfasilitasi warga dengan DKP dengan yang lainnya juga.

T : *Kalau informal berpengaruh tidak atau politik dalam UPS ini?*

J : Ya, bisa berpengaruh positif bisa juga berpengaruh negatif tergantung dari kecenderungan dari politisi tersebut kalau politisi tersebut mendukung ya akan positif tapi kalau dia negatif dia akan menjadi provokator masyarakat. Dengan misalnya saya yang secara prinsip setuju dengan ini saya bantu mencari orang-orang yang lahannya siap digunakan untuk membangun UPS dan saya dorong untuk saya bawa dia untuk membuat proposal dan sebagainya penawaran tempat dan sebagainya ikut membantu mencari lokasi.

Lampiran 2 (lanjutan)

T : *Kalau dalam berinvestasi yang paling disorot itu Walikota sebenarnya posisi atau peran Walikota seperti apa? Seakan-akan tiba-tiba ada daerah yang tidak mau didatangi oleh lurah saya maunya Walikota jadi ini seperti apa sebenarnya posisi Walikota apakah dia harus terjun langsung?*

J : *Sebetulnya Walikota ini punya ide kalau dengan mereka ingin meminta orang yang punya disusun untuk hadir karena biasanya kalau dia kalah. Dinas kelurahan lebih banyak menampung aspirasi untuk kemudian di sampaikan kepada walikota. Mereka berharap instan yang hadir Walikota, Walikota yang memutuskan saat itu juga, padahal kan suatu keputusan itu tidak bisa diambil segera harus ada kepengan-kepentingan dan sebagainya dan itu yang tidak dipilih oleh masyarakat karena masyarakat ingin cepat makanya yang dihadirkan adalah Walikota langsung.*

T : *Kemudian yang terakhir mengenai program ini kan melibatkan aparatur pemerintah juga sebagai pelaksana utama, sebagai anggota DPRD melihat tingkat daya tanggap pelaksanaan kebijakan aparatur pemerintah terhadap kebijakan ups ini seperti apa? Apakah mereka mendukung apakah sudah optimal atau maksimal di 2008 atau apa?*

J : *Secara normatif mereka mendukung kebijakan walikota sebagai bawahan. Tapi ya mungkin tingkat kreativitasnya berbeda-beda antara lurah dan yang lain. Karakteristik dari lurahnya misalnya dia tahu dan mensosialisasikan dan mungkin dia mempunyai cara khusus bagaimana agar masyarakat itu bisa lebih memahami ada lurah yang sekedar menjalani tugasnya , “saya sudah mengundang masyarakat tetapi tidak hadir,” berarti salah sendiri mengapa dia tidak hadir”.*

T : *Dalam kaitannya resistensi ini yang paling urgen yang paling harus diperkuat sebagai PR (humas) siapa?*

J : *Disetiap kesempatan dia harus bisa menjelaskan tentang masalah UPS, masalah kebersihan, selama ini kalau saya lihat kalau lurah turun ke bawah bicaranya hanya PBB saja masalah kewajiban saja. Masalah pembangunan, pemerintah diserang oleh masyarakat PR-nya kurang, seolah – oleh itu urusan Walikota. Atau juga melempar ke atas, itu Walikota yang tidak memahami fungsinya sebagai perpanjangan misalnya orang bertanya, gak tau tuh Walikota begini.*

T : *Kalau memang dia kinerjanya baik pertanyaan-pertanyaan warga di level kelurahan diselesaikan oleh lurah tidak dilempar, kalau dia tidak bisa mungkin camat kemudian Dinas, baru Walikota ini mungkin sebuah kebutuhan juga dari masyarakat ketika tidak mendapatkan respon yang cukup baik dari pemerintah level lurah, camat atau dinas dan langsung ingin berdialog dengan Walikota sendiri?*

J : *Karena memang seharusnya sebagai bawahan dia itu harus menjadi tameng, ini kebanyakan tidak menjadi tameng jadi ini memang urusan Walikota, saya difitnah Walikota, saya hanya melaksanakan, tidak menjadi tameng pemerintah.*

T : *Jadi dari segi kepemimpinan menurut anda selaku DPRD, hubungan-hubungan apa dalam kaitannya dengan UPS, karena kasus yang terjadi bisa terulang. Karena 2008 ada kasus resistensi kemudian 2009 mau dibangun. Kalau ini tidak ditanggulangi ada kemungkinan ada kejadian yang serupa jadi yang perlu diperhatikan seperti itu.*

J : *UPS-UPS yang sudah terbangun itu dijalankan dengan sebaik-baiknya dan bisa dijadikan percontohan bisa menjadi studi banding bagi yang lain. Kalau ada protes-protes kan kita bisa ajak dia, ini ada sudah 20 yang jalan mana yang bermasalah jadi kalau*

Lampiran 2 (lanjutan)

selama ini tidak ada tandingannya kalau dia bilang bermasalah jadi belum terbukti di bilang tidak bermasalah juga belum terbukti yang keadaanya sudah berjalan lancar masyarakat bisa lihat sendiri ini ada kan yang mengkhawatirkan di situ kalau itu sudah ke sananya akan gampang, karena di awalnya memang disetiap kita melakukan yang baru kan kita perlu momen khusus.

T : *Kalau dari secara umum kebijakan memang resistensi dari elit-elit politik sudah menerima?*

J : Secara kebijakan bahkan sekarang itu dengan undang-undang lingkungan yang berbaur itu menjadi wajib karena dalam waktu 5 tahun setelah diputuskan itu tpa sudah harus ditutup, 1 tahun setelah undang-undang itu disahkan sudah harus dibangun sudah menjadi kewajiban, bukan lagi menjadi program politiknya Walikota. Tapi sudah menjadi amanat undang-undang.

T : *Yang banyak bermasalah hanya konteksnya saja? Konteks itu kan ada orang, ada pemanfaatan.*

J : Setiap yang barukan perlu gaya yang besar mendorong mobil berat tetapi kalau sudah jalan, gak usah. Nanti juga kalau seandainya nanti yang 20 yang sudah berjalan dengan baik sarannya akan baik karena bisa menjadi bukti kepada masyarakat.



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 2

Tanggal wawancara : 15 Juni 2009

Tanya (T) : *Bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan di kota Depok itu seperti apa? Sampai ada UPS, kemudian gambaran mengenai latar belakang pembangunan UPS atau kebijakan pengolahan sampah di kota Depok?*

Jawab (J) : Depok ini kan penduduknya 1,4 juta orang. Kemudian volume sampah kira-kira 3445m³ per hari. Dengan pertambahannya berbanding lurus terhadap penambahan penduduk tentunya, sekitar 3,6% setiap tahun. Kemudian sarana yang kami miliki, TPA hanya 11,2ha. Truk 57 unit, alat berat 5 unit, kemudian TPS 167 buah. Kemudian personal 602 orang. Administrasi 60, sisanya adalah tenaga lapangan. Kemampuan kami belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan warga karena keterbatasan. Kemudian sejak tahun 2006 kebetulan terjadi pergantian walikota dan wakil, kami diskusi dengan BPPT, dengan beliau, dan disimpulkan bahwa kalau polanya konvensional, kumpul-angkut-buang, tidak akan efektif dan efisien karena memerlukan sarana yang banyak plus TPA dengan lahan yang besar. Kemudian kami diskusi-diskusi, oke kalau begitu kita selesaikan. Kata kuncinya adalah kita selesaikan sampah di sumber sampah. Artinya, di kawasan yang padat penduduk harus diselesaikan. Nyambunglah secara teoretis dari BPPT. Lalu apa yang dilakukan? 3R: *Reduce, Reuse and Recycle*. Jadi, pengurangan, penggunaan kembali dan *recycling* (daur ulang). Mungkin kalau bahasa awamnya pemilahan. Setelah itu, ada pemikiran baru. Setelah dipilah harus dibagaimanakan? Kemungkinan sampah -kita waktu itu, karena BPPT yang menceramahi kita, mereka lebih dulu tahu- ada organik ada anorganik. Kalau organik dibagaimanakan, kalau anorganik dibagaimanakan? Organik dibuat kompos. Anorganik dipilah-pilah. Bisa didaur-ulang, bisa digunakan kembali. Itu kan rata-rata 60% organik, 35% anorganik, jenis sampah itu. Lalu untuk itu kan tidak mungkin manual, harus ada mesin. Yaitu mesin pengolahan sampah terpadu. Istimahnya dulu. Dan harus lengkap dengan hangarnya, karena di situ kita harus mengolah sampah menjadi kompos, kemudian ada juga yang dipilah-pilah sisanya. Hasil pemilahannya di mana disimpan? Di bangunan hanggar. Rata-rata ukurannya 600m². Dari situ mula-mula, itu kan sistemnya pake mesin motor penggerak bertenaga 3000HP. Mula-mula kan masuk dari *conveyor*, dipilah, masuk ke dalam mesin pencacah. Ada juga *blower* yang menghembuskan plastik-plastik. Kemudian setelah masuk ke pencacah, kan menjadi potongan-potongan macam-macam ukuran. Kemudian masuk ke dalam *screen*/ayakan. Setelah yang kecil masuk ayakan, ditumpuk kemudian disiram pakai aktivator EM-4, sehingga terjadilah kompos. Di situ timbul *multiplier effect*. Menimbulkan lapangan kerja baru. Untuk 1 unit itu rata-rata 14 orang. Satu orang manajer, satu orang teknisi mesin, satu orang tenaga administrasi, dan 11 orang kuli kasarnya. Itu rata-rata kapasitas mesinnya 30-90m³ per hari. Setelah terjadi pemikiran itu disusunlah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2006. Karena sampah itu merupakan isu strategis, masuklah maksud membangun UPS seperti tadi yang di dalamnya ada mesin pengolahan terpadu. Kemudian rencana pembangunannya pada tahun 2007 10 unit, 2008 10 unit, tetapi karena 2007 ada masalah perbedaan persepsi dengan dewan, adakan kajian dulu, begitu kan. Memang betul sih, jadi diadakan kajian pada tahun 2007. Akhirnya 2007 tidak bisa mengalokasikan dana untuk yang 10 itu. Jadi di tahun 2008 dibangun 20. Kemudian nanti 2009 10 unit, 2010 15 unit, 2011 15 unit. Totalnya 60 yang dibangun oleh Pemda. Sebelumnya sudah ada,

Lampiran 3 (lanjutan)

tapi skalanya kecil. Bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup 1 unit, dari Kementerian PU 2 unit, dari propinsi 1 unit, kemudian yang dipakai uji coba 1 unit, jadi ada 5 tahun 2007 itu. Kenapa harus sampai di atas 60? Kan kita volume sampahnya 3445m³/hari, kalau rata-rata katakanlah tiap unit mampu mengolah 40-50m³ per hari dirata-ratakan, dikalikan 65 kan habis. Sisanya kira-kira 205 dibuang ke TPA, sehingga dengan program ini, sampah yang dulu merupakan masalah, menjadi berkah. Ya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. TPA umurnya bisa lebih panjang, karena yang dibuang ke sana lebih sedikit, cuma 20% dan ramah lingkungan. Itu konsep dasarnya kenapa kita ingin mewujudkan UPS di sumber sampah. Kebetulan pada tanggal 7 mei 2008 ada undang-undang tentang sampah, no.18 tahun 2008. Isinya mengenai 3R, persis seperti konsep yang dicetuskan di Depok. Sebetulnya konsepnya bagus, cuma permasalahannya, kan pemahaman masyarakat yang beda. “apa sih kok seperti dijadikan TPA?”. Bukan untuk pemrosesan. Jadi, artinya komunikasi antara kami penanggungjawab dengan masyarakat belum mulus betul. Sehingga ada resistensi. Ternyata setelah berdiri, Alhamdulillah, sekarang. Perlu perjuangan istilahnya.

T : *Jadi dari 20 unit yang direncanakan, berapa yang sudah jadi?*

J : Sudah jadi 19 unit. Yang satu lagi karena ini disiplin anggaran saja. Kalau belum selesai desember 2008, harus di-cut off. Inshaallah dimasukkan ke tahun 2009.

T : *Berarti kemarin yang sempat resisten di Rivaria?*

J : Yang di Rivaria, itu ada politiknya. Cinere, tapi sekarang sudah berjalan. Bukit Rivaria dan Taman Cipayung itu ada unsur politik. Kalau saya uraikan, begini: di Bukit Rivaria, tokohnya Pak Lukman dia dari PKB, yang namanya orang politik kan ingin populer. Kebetulan ada persoalan baru, yang masyarakat belum tahu persis. jadi dia memanfaatkan. Setelah Pileg dia kalah, selesai. Begitupun yang disini, di sini namanya Arif Budiman, PBB partainya sama Ganjar dari Partai Golkar. Setelah Pileg-nya kalah, selesai. Jadi, sangat kental urusan politiknya. Tapi, saya tidak mau memperpanjang itu karena bukan kewenangan saya.

T : *Kepentingan-kepentingan apa dan siapa saja yang terkena kebijakan pembangunan UPS ini?*

J : Yang terpengaruh oleh kebijakan ini, dari aspek ekonomi mungkin bisa memberikan nilai tambah. Dari aspek tanggungjawab, mungkin masyarakat bisa lebih bertanggungjawab. Terus juga mungkin aspek pembinaan lingkungan itu sangat terpengaruh, itu jadi bersih. Dan mungkin ada kebijakan nasional. Sekarang kan pupuk anorganik itu minus 3 juta ton pertahunnya, kemudian ada tren makanan sayuran organik. Barangkali nanti ini akan sinergis nantinya. Ingin menghasilkan pupuk organik, bisa menjadi barang substitusi pupuk anorganik, dengan begitu pembangunan sektor pertanian akan meningkat. Di sini banyak sentra-sentra tanaman hias, barangkali bisa membantu. Banyak aspek sosial, ekonomi, tenaga kerja yang terpengaruh.

T : *Tadi manfaat-manfaatnya sudah disebutkan. Apakah ada yang lain?*

J : Mungkin dunia pendidikan. Terus terang, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI ada penelitian, dari Fakultas Teknik Lingkungan juga. Tadi Juga saya ada dengan departemen/Fakultas Teknik. Mereka ada program pembinaan masyarakat 6 kelurahan dalam hal pemilahan sampah. Sampah-sampah plastiknya dijadikan kerajinan. Sangat

Lampiran 3 (lanjutan)

positif itu. Mungkin dunia pendidikan juga terasa untuk memikirkan masalah sampah, mencari solusi.

T : *Yang diharapkan dari pemerintah sendiri derajat perubahannya seperti apa? apakah pola pembuangannya?*

J : Kalau dari kami, bukan pola pembuangannya. Justru tidak diharapkan tidak ada lagi pembuangan. Jadi aktivitas kemandirian masyarakat itu harus tumbuh, itu yang kita inginkan dan ada rasa tanggungjawab. Jadi menyelesaikan masalah itu jangan tergantung kepada orang lain atau institusi gitu. Itu yang kita harapkan sehingga toh ujung-ujungnya mereka mungkin ya, merasakan dampaknya. FKM UI juga mengadakan seminar. Pembahasannya apa coba? Lalat, yang ada di tempat-tempat makan PKL yang ada, kan banyak mahasiswa UI yang suka makan malam juga. Dari situ ada..apa indikasinya itu? Mengandung bakteri *E.Coli*. dari mana? Dari lalat. Lalat dari mana? Ternyata dari pengelolaan sampah si PKL-PKL itu yang tidak benar. Jadi banyak aspek, pak. Mungkin kesehatan masyarakat juga akan meningkat.

T : *Adakah pengaruh letak/lokasi pengambilan kebijakan terhadap efektifitas implementasinya?*

J : Kalau lokasi itu kan tanah 600m² di kota ini, ini kan susah. Sementara kemampuan anggaran Pemda terbatas. Akhirnya menggunakan fasos/fasum (fasilitas sosial/fasilitas umum). Kalau fasos/fasum kan kewenangan pemerintah daerah. Ya itu tadi, pertama tentang *image* dulu, tentang perubahan, yang kedua keterbatasan anggaran. Langsung resistensi. Sebenarnya kalau mengerti dulu sih, mengerti gitu, paham. Tapi kan dibatasi oleh waktu. Perubahannya sangat cepat, 2006 ngomong, 2007 harus langsung jadi. Yang harus kami hadapi dalam sosialisasi itu banyak dan tingkat intelektualnya beda-beda. Kadang-kadang, ya maaf, yang pendidikannya lebih rendah, lebih cepat mengerti, memahami, daripada orang yang berilmu. Katanya kan, kata ilmu pendidikan, makin tinggi pendidikan, makin cepat... Nggak juga sih. Sekarang dalam realitanya?

T : *Kemarin itu yang saya dengar, 3 daerah yang resisten itu rata-rata di perumahan?*

J : Betul, elit, elit, pak. Tapi itu sekali lagi itu juga karena ada urusan di luar teknis.

T : *Bagaimana peran para pelaksana kebijakan UPS mulai tingkat atas hingga bawah?*

J : Kalau tingkat tataran kebijakan kan dari walikota dengan tim APBD, tim anggaran. Tim anggaran panitia daerah baik eksekutif maupun legislatif. Itu tataran kebijakan. Kemudian pelaksananya kami di sini. Terus ada juga Dinas Pasar yang mengelola sampah pasar. Kemudian juga yang bertanggungjawab di saluran, Dinas PU pengairan. Ada 3 lembaga yang bertanggungjawab di dalam pengolahan sampah. Pada tataran pelaksanaan ini memang, itu tadi ya, koordinasi kita juga. Untuk pengelolaan sampah, itu tanggungjawab dimana sampah itu "berdomisili", yaitu di mana sampah itu berada. Misalnya kalau di pasar, ya urusan dinas pasar. Kalau di badan air, sungai, itu urusan dinas PU.

T : *Kalau di 2008 ada UPS yang ditangani dinas pasar?*

J : Ada, di pasar Cisalak. Ada 1 unit. Nanti 2009 ini di Kemiri.

T : *Tapi yang resisten kebetulan di bawah DKP ya?*

Lampiran 3 (lanjutan)

J : DKP, karena kan kalau pasar kan otonom. Kalau kami kan, yang punya masyarakat, lurah dan camat, kami hanya teknis.

T : *Bagaimana strategi bapak sebagai kepala dinas untuk memastikan para pelaksana (staf) untuk mengimplementasikan kebijakan UPS secara efektif?*

J : *Pertama*, kami mengajak serta lurah dan camat setempat yang bertanggungjawab penuh. Yang *kedua*, persoalan yang 14 orang itu harus penduduk setempat supaya ada rasa memiliki. Yang *ketiga*, dibagi kewilayahan, ada berapa RW dibuat 1, itu kan bisa gesekan. Akhirnya nanti, maklumlah kondisi masyarakat kita dalam kondisi seperti ini, urusan kecil bisa jadi tawuran. Jadi, kami membagi wilayah pelayanan. Mengajak serta camat dan lurah untuk ikut bertanggungjawab. Mengangkat pegawai dari sekitar situ.

T : *Peran lurahnya seperti apa pak?*

J : Dalam hal ini dia harus ikut mengawasi di dalam operasional. Lokasi juga, melibatkan camat dan lurah. Hanya persoalan camat dan lurah kan bukan orang teknis, di dalam persyaratan asal-usul saja. Kan gitu. Begitu kami melakukan ini, ada sedikit masalah perbedaan, jadi mungkin camat nya asal tunjuk lokasi, ternyata masyarakatnya tidak terima. Jadi, masalah detail teknis, kadang-kadang tidak sepaham.

T : *Bagaimana pendekatan dalam sosialisasi, komunikasi kebijakan pembangunan UPS ini?*

J : Saya juga mengakui, jujur, karena program ini pelaksanaannya terlalu cepat gitu ya. Saya akui jujur betul. Jadi, sosialisasi yang dilakukan belum intensif benar. Itu yang pertama. Yang kedua ada aspek lain yang diluar kapasitas saya untuk menjelaskannya, masalah politik. Sebab gini pak, Pak Walikota ini kan didukung oleh PKS. Apapun yang, walaupun positif, yang dia gulirkan programnya, pasti ada resistensinya. Itu harus menjadi bahan kajian juga. Tapi yang saya rasa seperti itu. Dari dewan dihantam, dari masyarakat juga seperti itu. Dulu programnya bernama SIPESAT, sistem pengolahan sampah terpadu. Namun kami ganti jadi UPS, supaya orang tidak berkata:”wah, ini programnya Nur Mahmudi”. Tapi programnya sama.

T : *Dalam menerapkan kebijakan ini, kan butuh sumber daya, sumber daya apa saja pak yang dikerahkan DKP atau pemerintah kota? Kemudian bagaimana mengelola sumber daya itu?*

J : Yang pertama, sumber daya manusia. Yang setiap unit 14 orang itu dilatih dulu. Yang kedua, juga mungkin pendanaan. Karena untuk operasional tiap unit itu rata-rata 219 juta rupiah per tahun. Itu harus tersedia, pak. Untuk BBM, listrik, upah, untuk *spare-part*. Sumber daya yang lain mungkin gerobak, karena kalau pakai truk lagi gak mungkin.

T : *Bagaimana keterlibatan proses, kewenangan/peran, strategi aktor dalam implementasi kebijakan UPS?*

J : Mungkin legislatif, itu didalam hal pengesahan undang-undang. Eksekutif kan kami di sini, kami itu mulai dari perencanaan, perencanaan itu tentu dari aspek lokasi harus melibatkan camat dan lurah. Kemudian itu perencanaan. Mungkin dunia usaha, itu nanti terlibat. Kemudian di eksekutif lain, Pemda juga. Perencanaan APBD juga di situ. Kami setelah implementasi, operasional kami, baik mengelola SDM, mengelola sumber daya pembiayaan. Dan nanti hasil produk seperti pupuk itu kami harus koordinasi dengan dinas pertanian. Jadi dinas pertanian terlibat untuk mendistribusikan. Sementara

Lampiran 3 (lanjutan)

digratiskan dulu, untuk meyakinkan para petani. Kalau sudah tergantung kan, nanti mencari-cari kami. Dan kemudian mungkin nanti koperasi, kita sengaja bentuk. Kemudian juga nanti sentra-sentra akan tumbuh di sini.

T : *Mengenai resistensi sebagian warga, bagaimana aktor-aktor yang terlibat ini menghadapinya?*

J : Walikota sebenarnya kalau di pemerintahan, sudah mendelegasikan. Misalnya spektrum sosialnya, DKP merasa resistensi itu karena ketidaktahuan. Yang saya rasakan seperti itu. Yang penting jalan saja dulu. Itu yang di sini sampai ke pengadilan segala, di PTUN. Ya Alhamdulillah, karena hakim merasa bahwa memang ini hak Pemda. Adapun misalnya kurang sosialisasi, itu masalah lain.

T : *Bagaimana karakteristik lembaga-lembaga (DKP, Dinas Pasar, DPU yang terlibat, birokrasi camat dan lurah) ini seperti apa dalam mendukung implementasi kebijakan UPS?*

J : Kami kan koordinasinya cukup baik. Kalau pasar boleh dibilang sudah otonom penuh. Karena komunitasnya komunitas pasar, sampahnya juga hanya di situ, hanya tambah-tambah sedikit dari orang yang belanja. Kalau PU memang harus dengan kami. Karena yang buang sampah ke sungai itu kan warga. Jadi, PU hanya membantu tugas kami saja mengangkut sampah dari badan perairan ke atas. Setelah itu kami yang mengelola. Kemudian camat dan lurah yaitu karena mereka sebagai birokrasi yang menangani kemasyarakatan, secara langsung harus dilibatkan. Dalam urusan sampah, DKP menjadi koordinatornya. Karena secara, contohnya begini lah, Dinas Pasar, sudah selesai membersihkan sampah, dibuang ke TPA, nah itu wewenang kami. Jadi kami kan memberi arahan harus begini harus begini. Selain koordinator, kadang-kadang kita juga fasilitator.

T : *Kalau begitu tidak perlu ada pengelolaan sampah, UPS tersendiri?*

J : Tidak, begini, kalau sampah itu kan menurut undang-undang tanggungjawab bersama, saya dengan Pak Walikota sudah sependapat. Bahwa setiap komunitas di atas 300 rumah, itu wajib mengelola sendiri. Dan itu sudah ada yang berjalan, misalnya di Sawangan Golf, perumahan-perumahan elit. Dan kemarin Raffles Hills yang di Cibubur, itu ada sedikit masalah karena dia membangun dia beli tanah di luar komplek. Akhirnya warga di sekitar UPS merasa dilecehkan. Kami ini dijadikan tempat pembuangan sampah. Jadi, ada resistensi dari masyarakat sekitar.

T : *Seberapa jauh tingkat kepatuhan pengelola, mulai dari dinas sampai kelurahan terhadap kebijakan UPS ini?*

J : Ini ada bagusnya juga. Kan kita selalu diadakan penilaian dari kelurahan, oleh walikota, kalau kinerja dia tidak mendukung DKP. dengan adanya seperti itu mereka patuh terhadap kepada kebijakan pimpinan. Daya tanggapnya, saya kira positif mereka dan paham betul bahwa sampah ini, kan sudah menjadi isu strategis.

T : *Menjawab permasalahan sampah, tentang konteks kepemimpinan, bapak melihatnya seperti apa, di kota Depok? Kepemimpinan pemerintah daerah, Walikota dan jajarannya, dan ada DPRD. Itu kan sudah ditetapkan dalam RPJMD, Bapak melihat perjalanannya dalam konteks UPS ini seperti apa dinamikanya?*

Lampiran 3 (lanjutan)

J : Oh ya, sejak akan dengan disusunya Perda memang sedikit alot pembahasannya. Pembahasan untuk meng-goal-kan UPS di RPJMD ini. Tapi dengan argumentasi-argumentasi yang rasional, saya pikir kalau anggota Dewan, tahu persis dan harus bagaimana berbuat sesuai dengan landasan yang ada.

T : *Strateginya lebih ke politis?*

J : Terkecuali yang sifatnya situasional, mungkin nanti saat ada Pemilihan lagi, kan namanya juga orang politik, pak. Momentum, membaca kalau momentum begini, begini cara menyelesaikannya. Bisa jadi ada sedikit hambatan, bisa jadi.

T : *Tapi kalau dalam program?*

J : Kalau menurut saya situasional. Kalau aspek teknis, gak ada masalah sih.

T : *Untuk mengelola sampah ini seperti apa? karena kan butuh mendayagunakan seluruh komponen masyarakat.*

J : Kalau menurut saya, sistem dan mekanismenya sudah bagus. Tinggal mungkin ke depan, ini harus milik semua. Bukan milik satu kelurahan, supaya tidak ada resistensi. Itu yang susah itu. jadi kita jangan berpikir macam-macam, teknis saja. Kalau saya seperti itu.

T : *Mungkin pak, ada kiat-kiatnya?*

J : Ya, saya mencoba dalam merekrut orang, saya serahkan ke masyarakat sendiri. RT/RW dilibatkan. LPM dilibatkan. Soalnya, kepentingannya perut juga sih. Ini kan salah satu lapangan kerja yang lumayan, gajinya gak kecil-kecil amat, cukup. Dan itu sampai adu urat leher untuk mengangkat seseorang itu. Tapi kita berusaha melihat secara profesional, yang penting mau bekerja.

T : *Bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan di kota Depok itu seperti apa? Sampai ada UPS, kemudian gambaran mengenai latar belakang pembangunan UPS atau kebijakan pengolahan sampah di kota Depok?*

J : Depok ini kan penduduknya 1,4 juta orang. Kemudian volume sampah kira-kira 3445m³ per hari. Dengan pertambahannya berbanding lurus terhadap pertambahan penduduk tentunya, sekitar 3,6% setiap tahun. Kemudian sarana yang kami miliki, TPA hanya 11,2ha. Truk 57 unit, alat berat 5 unit, kemudian TPS 167 buah. Kemudian personal 602 orang. Administrasi 60, sisanya adalah tenaga lapangan. Kemampuan kami belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan warga karena keterbatasan. Kemudian sejak tahun 2006 kebetulan terjadi pergantian walikota dan wakil, kami diskusi dengan BPPT, dengan beliau, dan disimpulkan bahwa kalau polanya konvensional, kumpul-angkut-buang, tidak akan efektif dan efisien karena memerlukan sarana yang banyak plus TPA dengan lahan yang besar. Kemudian kami diskusi-diskusi, oke kalau begitu kita selesaikan. Kata kuncinya adalah kita selesaikan sampah di sumber sampah. Artinya, di kawasan yang padat penduduk harus diselesaikan. Nyambunglah secara teoretis dari BPPT. Lalu apa yang dilakukan? 3R: *Reduce, Reuse and Recycle*. Jadi, pengurangan, penggunaan kembali dan *recycling* (daur ulang). Mungkin kalau bahasa awamnya pemilahan. Setelah itu, ada pemikiran baru. Setelah dipilah harus dibagaimanakan? Kemungkinan sampah -kita waktu itu, karena BPPT yang menceramahi kita, mereka lebih dulu tahu- ada organik ada anorganik. Kalau organik dibagaimanakan, kalau anorganik dibagaimanakan? Organik dibuat kompos. Anorganik dipilah-pilah.

Lampiran 3 (lanjutan)

bisa didaur-ulang, bisa digunakan kembali. Itu kan rata-rata 60% organik, 35% anorganik, jenis sampah itu. Lalu untuk itu kan tidak mungkin manual, harus ada mesin. Yaitu mesin pengolahan sampah terpadu. Istilahnya dulu. Dan harus lengkap dengan hanggarnya, karena di situ kita harus mengolah sampah menjadi kompos, kemudian ada juga yang dipilah-pilah sisanya. Hasil pemilahannya di mana disimpan? Di bangunan hanggar. Rata-rata ukurannya 600m². Dari situ mula-mula, itu kan sistemnya pake mesin motor penggerak bertenaga 3000HP. Mula-mula kan masuk dari *conveyor*, dipilah, masuk ke dalam mesin pencacah. Ada juga *blower* yang menghembuskan plastik-plastik. Kemudian setelah masuk ke pencacah, kan menjadi potongan-potongan macam-macam ukuran. Kemudian masuk ke dalam *screen*/ayakan. Setelah yang kecil masuk ayakan, ditumpuk kemudian disiram pakai aktivator EM-4, sehingga terjadilah kompos. Di situ timbul *multiplier effect*. Menimbulkan lapangan kerja baru. Untuk 1 unit itu rata-rata 14 orang. Satu orang manajer, satu orang teknisi mesin, satu orang tenaga administrasi, dan 11 orang kuli kasarnya. Itu rata-rata kapasitas mesinnya 30-90m³ per hari. Setelah terjadi pemikiran itu disusunlah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2006. Karena sampah itu merupakan isu strategis, masalah maksud membangun UPS seperti tadi yang di dalamnya ada mesin pengolahan terpadu. Kemudian rencana pembangunannya pada tahun 2007 10 unit, 2008 10 unit, tetapi karena 2007 ada masalah perbedaan persepsi dengan dewan, adakan kajian dulu, begitu kan. Memang betul sih, jadi diadakan kajian pada tahun 2007. Akhirnya 2007 tidak bisa mengalokasikan dana untuk yang 10 itu. Jadi di tahun 2008 dibangun 20. Kemudian nanti 2009 10 unit, 2010 15 unit, 2011 15 unit. Totalnya 60 yang dibangun oleh Pemda. Sebelumnya sudah ada, tapi skalanya kecil. Bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup 1 unit, dari Kementerian PU 2 unit, dari propinsi 1 unit, kemudian yang dipakai uji coba 1 unit, jadi ada 5 tahun 2007 itu. Kenapa harus sampai di atas 60? Kan kita volume sampahnya 3445m³ kubik per hari, kalau rata-rata katakanlah tiap unit mampu mengolah 40-50m³ per hari dirata-ratakan, dikalikan 65 kan habis. Sisanya kira-kira 205 dibuang ke TPA, sehingga dengan program ini, sampah yang dulu merupakan masalah, menjadi berkah. Ya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. TPA umurnya bisa lebih panjang, karena yang dibuang ke sana lebih sedikit, cuma 20% dan ramah lingkungan. Itu konsep dasarnya kenapa kita ingin mewujudkan UPS di sumber sampah. Kebetulan pada tanggal 7 Mei 2008 ada undang-undang tentang sampah, no.18 tahun 2008. Isinya mengenai 3R, persis seperti konsep yang dicetuskan di Depok. Sebetulnya konsepnya bagus, cuma permasalahannya, kan pemahaman masyarakat yang beda. “apa sih kok seperti dijadikan TPA?”. Bukan untuk pemrosesan. Jadi, artinya komunikasi antara kami penanggungjawab dengan masyarakat belum mulus betul. Sehingga ada resistensi. Ternyata setelah berdiri, Alhamdulillah, sekarang. Perlu perjuangan istilahnya.

T : *Jadi dari 20 unit yang direncanakan, berapa yang sudah jadi?*

J : Sudah jadi 19 unit. Yang satu lagi karena ini disiplin anggaran saja. Kalau belum selesai Desember 2008, harus di-cut off. Inshaallah dimasukkan ke tahun 2009.

T : *Berarti kemarin yang sempat resisten di Rivaria?*

J : Yang di Rivaria, itu ada politiknya. Cinere, tapi sekarang sudah berjalan. Bukit Rivaria dan Taman Cipayung itu ada unsur politik. Kalau saya uraikan, begini: di Bukit Rivaria, tokohnya Pak Lukman dia dari PKB, yang namanya orang politik kan ingin populer. Kebetulan ada persoalan baru, yang masyarakat belum tahu persis. jadi dia memanfaatkan. Setelah Pileg dia kalah, selesai. Begitupun yang disini, di sini namanya Arif

Lampiran 3 (lanjutan)

Budiman, PBB partainya sama Ganjar dari Partai Golkar. Setelah Pileg-nya kalah, selesai. Jadi, sangat kental urusan politiknya. Tapi, saya tidak mau memperpanjang itu karena bukan kewenangan saya.

T : *Kepentingan-kepentingan apa dan siapa saja yang terkena kebijakan pembangunan UPS ini?*

J : Yang terpengaruh oleh kebijakan ini, dari aspek ekonomi mungkin bisa memberikan nilai tambah. Dari aspek tanggungjawab, mungkin masyarakat bisa lebih bertanggungjawab. Terus juga mungkin aspek pembinaan lingkungan itu sangat terpengaruh, itu jadi bersih. Dan mungkin ada kebijakan nasional. Sekarang kan pupuk anorganik itu minus 3 juta ton pertahunnya, kemudian ada tren makanan sayuran organik. Barangkali nanti ini akan sinergis nantinya. Ingin menghasilkan pupuk organik, bisa menjadi barang substitusi pupuk anorganik, dengan begitu pembangunan sektor pertanian akan meningkat. Di sini banyak sentra-sentra tanaman hias, barangkali bisa membantu. Banyak aspek sosial, ekonomi, tenaga kerja yang terpengaruh.

T : *Tadi manfaat-manfaatnya sudah disebutkan. Apakah ada yang lain?*

J : Mungkin dunia pendidikan. Terus terang, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI ada penelitian, dari Fakultas Teknik Lingkungan juga. Tadi Juga saya ada dengan departemen/Fakultas Teknik. Mereka ada program pembinaan masyarakat 6 kelurahan dalam hal pemilahan sampah. Sampah-sampah plastiknya dijadikan kerajinan. Sangat positif itu. Mungkin dunia pendidikan juga terasa untuk memikirkan masalah sampah, mencari solusi.

T : *Yang diharapkan dari pemerintah sendiri derajat perubahannya seperti apa? apakah pola pembuangannya?*

J : Kalau dari kami, bukan pola pembuangannya. Justru tidak diharapkan tidak ada lagi pembuangan. Jadi aktivitas kemandirian masyarakat itu harus tumbuh, itu yang kita inginkan dan ada rasa tanggungjawab. Jadi menyelesaikan masalah itu jangan tergantung kepada orang lain atau institusi gitu. Itu yang kita harapkan sehingga toh ujung-ujungnya mereka mungkin ya, merasakan dampaknya. FKM UI juga mengadakan seminar. Pembahasannya apa coba? Lalat, yang ada di tempat-tempat makan PKL yang ada, kan banyak mahasiswa UI yang suka makan malam juga. Dari situ ada..apa indikasinya itu? Mengandung bakteri *E.Coli*. dari mana? Dari lalat. Lalat dari mana? Ternyata dari pengelolaan sampah si PKL-PKL itu yang tidak benar. Jadi banyak aspek, pak. Mungkin kesehatan masyarakat juga akan meningkat.

T : *Adakah pengaruh letak/lokasi pengambilan kebijakan terhadap efektifitas implementasinya?*

J : Kalau lokasi itu kan tanah 600m² di kota ini, ini kan susah. Sementara kemampuan anggaran Pemda terbatas. Akhirnya menggunakan fasos/fasum (fasilitas sosial/fasilitas umum). Kalau fasos/fasum kan kewenangan pemerintah daerah. Ya itu tadi, pertama tentang *image* dulu, tentang perubahan, yang kedua keterbatasan anggaran. Langsung resistensi. Sebenarnya kalau mengerti dulu sih, mengerti gitu, paham. Tapi kan dibatasi oleh waktu. Perubahannya sangat cepat, 2006 ngomong, 2007 harus langsung jadi. Yang harus kami hadapi dalam sosialisasi itu banyak dan tingkat intelektualnya beda-beda. Kadang-kadang, ya maaf, yang pendidikannya lebih rendah, lebih cepat mengerti,

Lampiran 3 (lanjutan)

memahami, daripada orang yang berilmu. Katanya kan kata ilmu pendidikan, makin tinggi pendidikan, makin cepat. Nggak juga sih. Sekarang dalam realitanya?

T : *Kemarin itu yang saya dengar, 3 daerah yang resisten itu rata-rata di perumahan?*

J : Betul, elit, elit, pak. Tapi itu sekali lagi itu juga karena ada urusan di luar teknis.

T : *Bagaimana peran para pelaksana kebijakan UPS mulai tingkat atas hingga bawah?*

J : Kalau tingkat tataran kebijakan kan dari walikota dengan tim APBD, tim anggaran. Tim anggaran panitia daerah baik eksekutif maupun legislatif. Itu tataran kebijakan. Kemudian pelaksanaannya kami di sini. Terus ada juga Dinas Pasar yang mengelola sampah pasar. Kemudian juga yang bertanggungjawab di saluran, Dinas PU pengairan. Ada 3 lembaga yang bertanggungjawab di dalam pengolahan sampah. Pada tataran pelaksanaan ini memang, itu tadi ya, koordinasi kita juga. Untuk pengelolaan sampah, itu tanggungjawab dimana sampah itu “berdomisili”, yaitu di mana sampah itu berada. Misalnya kalau di pasar, ya urusan dinas pasar. Kalau di badan air, sungai, itu urusan dinas PU.

T : *Kalau di 2008 ada UPS yang ditangani dinas pasar?*

J : Ada, di pasar Cisalak. Ada 1 unit. Nanti 2009 ini di Kemiri.

T : *Tapi yang resisten kebetulan di bawah DKP ya?*

J : DKP, karena kan kalau pasar kan otonom. Kalau kami kan, yang punya masyarakat, lurah dan camat, kami hanya teknis.

T : *Bagaimana strategi bapak sebagai kepala dinas untuk memastikan para pelaksana (staf) untuk mengimplementasikan kebijakan UPS secara efektif?*

J : *Pertama*, kami mengajak serta lurah dan camat setempat yang bertanggungjawab penuh. Yang *kedua*, persoalan yang 14 orang itu harus penduduk setempat supaya ada rasa memiliki. Yang *ketiga*, dibagi kewilayahan, ada berapa RW dibuat satu, itu kan bisa gesekan. Akhirnya nanti, maklumlah kondisi masyarakat kita dalam kondisi seperti ini, urusan kecil bisa jadi tawuran. Jadi, kami membagi wilayah pelayanan. Mengajak serta camat dan lurah untuk ikut bertanggungjawab. Mengangkat pegawai dari sekitar situ.

T : *Peran lurahnya seperti apa pak?*

J : Dalam hal ini dia harus ikut mengawasi di dalam operasional. Lokasi juga, melibatkan camat dan lurah. Hanya persoalan camat dan lurah kan bukan orang teknis, di dalam persyaratan asal-usul saja. Kan gitu. Begitu kami melakukan ini, ada sedikit masalah perbedaan, jadi mungkin camat nya asal tunjuk lokasi, ternyata masyarakatnya tidak terima. Jadi, masalah detail teknis, kadang-kadang tidak sepaham.

T : *Bagaimana pendekatan dalam sosialisasi, komunikasi kebijakan pembangunan UPS ini?*

J : Saya juga mengakui, jujur, karena program ini pelaksanaannya terlalu cepat gitu ya. Saya akui jujur betul. Jadi, sosialisasi yang dilakukan belum intensif benar. Itu yang pertama. Yang kedua ada aspek lain yang diluar kapasitas saya untuk menjelaskannya, masalah politik. Sebab gini pak, Pak Walikota ini kan didukung oleh PKS. Apapun yang, walaupun positif, yang dia gulirkan programnya, pasti ada resistensinya. Itu harus menjadi bahan kajian juga. Tapi yang saya rasa seperti itu. Dari dewan dihantam, dari

Lampiran 3 (lanjutan)

masyarakat juga seperti itu. Dulu programnya bernama SIPESAT, sistem pengolahan sampah terpadu. Namun kami ganti jadi UPS, supaya orang tidak berkata:”wah, ini programnya Nur Mahmudi”. Tapi programnya sama.

T : *Dalam menerapkan kebijakan ini, kan butuh sumber daya, sumber daya apa saja pak yang dikerahkan DKP atau pemerintah kota? Kemudian bagaimana mengelola sumber daya itu?*

J : Yang pertama, sumber daya manusia. Yang setiap unit 14 orang itu dilatih dulu. Yang kedua, juga mungkin pendanaan. Karena untuk operasional tiap unit itu rata-rata 219 juta rupiah per tahun. Itu harus tersedia, pak. Untuk BBM, listrik, upah, untuk *spare-part*. Sumber daya yang lain mungkin gerobak, karena kalau pakai truk lagi gak mungkin.

T : *Bagaimana keterlibatan proses, kewenangan/peran, strategi aktor dalam implementasi kebijakan UPS?*

J : Mungkin legislatif, itu didalam hal pengesahan undang-undang. Eksekutif kan kami di sini, kami itu mulai dari perencanaan, perencanaan itu tentu dari aspek lokasi harus melibatkan camat dan lurah. Kemudian itu perencanaan. Mungkin dunia usaha, itu nanti terlibat. Kemudian di eksekutif lain, Pemda juga. Perencanaan APBD juga di situ. Kami setelah implementasi, operasional kami, baik mengelola SDM, mengelola sumber daya pembiayaan. Dan nanti hasil produk seperti pupuk itu kami harus koordinasi dengan dinas pertanian. Jadi dinas pertanian terlibat untuk mendistribusikan. Sementara digratiskan dulu, untuk meyakinkan para petani. Kalau sudah tergantung kan, nanti mencari-cari kami. Dan kemudian mungkin nanti koperasi, kita sengaja bentuk. Kemudian juga nanti sentra-sentra akan tumbuh di sini.

T : *Mengenai resistensi sebagian warga, bagaimana aktor-aktor yang terlibat ini menghadapinya?*

J : Walikota sebenarnya kalau di pemerintahan, sudah mendelegasikan. Misalnya spektrum sosialnya, DKP merasa resistensi itu karena ketidaktahuan. Yang saya rasakan seperti itu. Yang penting jalan saja dulu. Itu yang di sini sampai ke pengadilan segala, di PTUN. Ya Alhamdulillah, karena hakim merasa bahwa memang ini hak Pemda. Adapun misalnya kurang sosialisasi, itu masalah lain.

T : *Bagaimana karakteristik lembaga-lembaga (DKP, Dinas Pasar, DPU yang terlibat, birokrasi camat dan lurah) ini seperti apa dalam mendukung implementasi kebijakan UPS?*

J : Kami kan koordinasinya cukup baik. Kalau pasar boleh dibilang sudah otonom penuh. Karena komunitasnya komunitas pasar, sampahnya juga hanya di situ, hanya tambah-tambah sedikit dari orang yang belanja. Kalau PU memang harus dengan kami. Karena yang buang sampah ke sungai itu kan warga. Jadi, PU hanya membantu tugas kami saja mengangkut sampah dari badan perairan ke atas. Setelah itu kami yang mengelola. Kemudian camat dan lurah yaitu karena mereka sebagai birokrasi yang menangani kemasyarakatan, secara langsung harus dilibatkan. Dalam urusan sampah, DKP menjadi koordinatornya. Karena secara, contohnya begini lah, Dinas Pasar, sudah selesai membersihkan sampah, dibuang ke TPA, nah itu wewenang kami. Jadi kami kan memberi arahan harus begini harus begini. Selain koordinator, kadang-kadang kita juga fasilitator.

Lampiran 3 (lanjutan)

T : *Kalau begitu tidak perlu ada pengelolaan sampah, UPS tersendiri?*

J : Tidak, begini, kalau sampah itu kan menurut undang-undang tanggungjawab bersama, saya dengan Pak Walikota sudah sependapat. Bahwa setiap komunitas di atas 300 rumah, itu wajib mengelola sendiri. Dan itu sudah ada yang berjalan, misalnya di Sawangan Golf, perumahan-perumahan elit. Dan kemarin Raffles Hills yang di Cibubur, itu ada sedikit masalah karena dia membangun dia beli tanah di luar komplek. Akhirnya warga di sekitar UPS merasa dilecehkan. Kami ini dijadikan tempat pembuangan sampah. Jadi, ada resistensi dari masyarakat sekitar.

T : *Seberapa jauh tingkat kepatuhan pengelola, mulai dari dinas sampai kelurahan terhadap kebijakan UPS ini?*

J : Ini ada bagus juga. Kan kita selalu diadakan penilaian dari kelurahan, oleh walikota, kalau kinerja dia tidak mendukung DKP. dengan adanya seperti itu mereka patuh terhadap kepada kebijakan pimpinan. Daya tanggapnya, saya kira positif mereka dan paham betul bahwa sampah ini, kan sudah menjadi isu strategis.

T : *Menjawab permasalahan sampah, tentang konteks kepemimpinan, bapak melihatnya seperti apa, di kota Depok? Kepemimpinan pemerintah daerah, Walikota dan jajarannya, dan ada DPRD. Itu kan sudah ditetapkan dalam RPJMD, bapak melihat perjalanannya dalam konteks UPS ini seperti apa?*

J : Oh ya, sejak awalkan dengan disusunnya Perda memang sedikit alot pembahasannya. Pembahasan untuk meng-goal-kan UPS di RPJMD ini. Tapi dengan argumentasi-argumentasi yang rasional, saya pikir kalau anggota Dewan, tahu persis dan harus bagaimana berbuat sesuai dengan landasan yang ada.

T : *Strateginya lebih ke politis?*

J : Terkecuali yang sifatnya situasional, mungkin nanti saat ada Pemilihan lagi, kan namanya juga orang politik, pak. Momentum, membaca kalau momentum begini, begini cara menyelesaikannya. Bisa jadi ada sedikit hambatan, bisa jadi.

T : *Tapi kalau dalam program?*

J : Kalau menurut saya situasional. Kalau aspek teknis, gak ada masalah sih.

T : *Untuk mengelola sampah ini seperti apa? karena kan butuh mendayagunakan seluruh komponen masyarakat.*

J : Kalau menurut saya, sistem dan mekanismenya sudah bagus. Tinggal mungkin ke depan, ini harus milik semua. Bukan milik satu kelurahan, supaya tidak ada resistensi. Itu yang susah itu. jadi kita jangan berpikir macam-macam, teknis saja. Kalau saya seperti itu.

T : *Mungkin pak, ada kiat-kiatnya?*

J : Ya, saya mencoba dalam merekrut orang, saya serahkan ke masyarakat sendiri. RT/RW dilibatkan. LPM dilibatkan. Soalnya, kepentingannya, “perut” juga sih. Ini kan salah satu lapangan kerja yang lumayan, gajinya gak kecil-kecil amat, cukup. Dan itu sampai adu urat leher untuk mengangkat seseorang itu. Tapi kita berusaha melihat secara profesional, yang penting mau bekerja.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 3

Tanggal wawancara : 23 Juni 2009

Tanya (T) : *Mengenai latar belakang penolakan warga Taman Cipayung terhadap pembangunan UPS?*

Jawab (J) : Mereka nggak dalam konteks untuk menolak. Tadinya kan bangunan 18x30m, karena harus digeser 3m jadi 15x18m. jadi mengecil lebarnya.

T : *Ini rencananya buat RW berapa saja?*

J : Kalau menurut saya siapa saja boleh, individu boleh. Nggak ada pembatasan.

T : *Malah mereka yang membatasi? ini kira-kira apa nih pak? Ada kepentingan, ada kekuasaan, dan aktor yang bermain di sini.*

J : Kalau saya istilahnya begini lah, orang bodoh itu sangat potensial untuk disalahgunakan. Karena ketidaktahuan.

T : *Tapi masalahnya ini kan justru terjadi di kalangan yang lebih terpelajar?*

J : Ya itu tadi, seperti di Griya Cinere katanya ngakunya orang ahli lingkungan hidup. Ngomongnya ini-itu. Takut ada (limbah) B3, B2 saja nggak ada.. Ini kan khusus buat sampah rumah tangga. Jadi jangan dicampuradukkan dengan masalah B3.

T : *Jadi kayak harus operasi dulu?*

J : Untuk di Pangkalan Jati Baru, melihat ke Pangkalan Jati Lama selama 9 bulan. Saya selalu pesan, kalau ada waktu dicek lah ke Pangkalan Jati Lama. Lihat UPS yang sudah ada. Dan anehnya di sini, tokoh-tokoh yang menolak itu sudah diajak ke Sukatani. Tapi, bukan hal positifnya yang disampaikan. Kami sudah jelaskan bahwa sudah ada mengoperasikan UPS di Sukatani. Sukatani itu di lingkungan komplek Kopassus. Mungkin anda juga tahu. Anda juga tahu, anda bisa bayangkan ternyata reaksi mereka, kalau UPS ditempatkan di sana itu, mungkin kami sudah menemukan puing-puing kehancuran.

T : *Mereka jadi kelas tersendiri gitu ya pak? Gak bisa disamakan gitu ?*

J : Kalau mereka mau seperti itu silahkan. Saya berpikir tadinya dengan mereka ke Sukatani, *image* ini tuh bisa dibaikkan, bukan malah timbul kayak gini.

T : *Kira-kira strateginya gimana tuh pak?*

J : Ya memang, akhirnya bukan lagi bicara manfaat dari program ini. Akhirnya memang masalah harga diri, gengsi. Karena mereka awal itu sudah berjanji habis-habisan menolak.

T : *Sampai pada akhirnya Pak Walikota datang, itu juga masih dicurigai?*

J : Dan mereka waktu itu juga sampai ke masalah hukum.

T : *Digugat ke PTUN Bandung, sampai sidang ke-3?*

J : Ya pokoknya kalau sidang itu kan, mau sidang ke-3 atau ke-10, yang jelas putusan. Mau sidang 2 kali, mau sidang 10 kali, yang penting itu putusan. Saya turun ke lapangan

Lampiran 4 (lanjutan)

nih, “jangan banyak omong anda!”. Kita maju ke meja hijau, silahkan. “Bapak-bapak kan sebagai orang-orang terpelajar, bukan dengan merusak-merusak seperti ini”.

T : *Kalau dari daerahnya, yang kritis Taman Cipayung ya?*

J : Ya , pertamanya Taman Cipayung.

T : *Dan Rivaria, dua itu ya?*

YUS: Belum pernah dikubur sampah, harusnya dikubur sampah dulu.

T : *Kalau dari aparaturnya pemerintah mulai dari DKP sampai lurah, upayanya itu seperti apa? Ini kan perlu strategi tersendiri lah untuk sesuatu yang baru. Ini kan baru.*

J : Ya sebetulnya kalau sekarang konteksnya adalah mereka mau buka masalah, mereka gak obyektif. Anda sendiri kan (ada UPS) di Sadewa? Mana lebih...anda lihat ada positifnya?

T : *Ini dari penampilannya lebih cantik sekarang pak. Saya lewat sana gak bau.*

J : Jadi waktu awal dibawa ke sana, image terbangun. Seperti di Bojong, melibatkan pihak-pihak ketiga, masyarakat jadi pelengkap.

T : *Kan sidang di pengadilan sampai ke-3. Saya lihat di Monde masalah solusi itu nggak dibahas, isinya cuma masalah SK. jadi gimana pak duduk persoalannya?*

J : Begini, SK itu harus kita pahami sebagai suatu bentuk legalitas. Panjang lebar dari RPJM APBD semua, itu kebetulan legalitas yang diterapkan. Apakah semua implementasi dalam APBD itu harus selalu dengan SK? Contoh, saya beli gerobak motor, dibekali APBD kan? Waktu saya beli motor, itu kan jelas dari APBD, ada harganya. Apakah harus ada SK Pak Wali untuk beli 1? Nah, UPS kasusnya kayak begini. Ada lokasi fasos/fasum, ada lokasi tanah hak milik juga. Kalau fasos/fasum itu Pemda yang berkuasa atas lahan fasos/fasum itu. Itu apakah kita mau pakai itu harus bikin SK? Seperti yang di Taman Cipayung. Yang penting perizinan kan? IMB. Menentukan lokasi itu, itu mereka mengatakan harus lewat SK. Kalau setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus didasari SK-SK-SK, kapan beresnya? Itulah yang diplintir dengan pemahaman yang secara formal saja.

T : *Kalau sebelum UPS, itu kan ada TPS yang liar?*

J : : Kan, dari dulu ada petugas kita di sana. Apa yang mereka katakan? Kalau yang namanya liar itu tidak terdata. Tidak ada intervensi pengelolaan dari pemerintah.

T : *Kalau harus ada uji Amdal?*

J : Sudah kita siapkan semua lah itu.

T : *Kalau karakteristik pelaksananya pak? Kan dari DKP, sebagai pemilik program lah. Di lapangan kan camat, sebagai pemilik wilayah. Terus juga lurah, itu peran yang dimainkan seperti apa dari DKP ke lurah?*

J : Saya juga bingung menjawab ini. Saya tahu apa? Itu semua berangkat dari usulan lurah dan camat. Untuk dibuatkan UPS. Untuk 1 kelurahan, camat ada yang menawarkan 10 lokasi, 20 lokasi. Tapi kurang mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi usulan mereka. Kalau yang namanya pejabat kan tidak senang menjadikan usulan kan. Usulan itu disampaikan setelah melalui proses ya. Mereka ke bawah dulu. Misalnya: “Pak

Lampiran 4 (lanjutan)

Eko, gimana nih ini kalau seandainya UPS dibuat karena sampah seperti ini, terbengkalai dan menjadi sumber penyakit?”. “oh ya pak silahkan”. Baru dibuat usulan. Bukannya seperti ini: “tuh ada tuh di belakang”.

T : *Kalau dari kepemimpinan camat dan kelurahan?*

J : Sekarang, itu hak masyarakat juga untuk menjadikan apa-apa. Sebelum ada IMB-nya, harus ada penegasan, dimana UPS ini akan didirikan.

T : *Sebenarnya kekhawatiran mereka gak masuk akal?*

J : Kalau sudah sampai operasional, 1 hari saja kita akan evaluasi. Kalau hasil evaluasi 1 hari itu negatif, tutup saja. Seperti di Cipayung, “kenapa anda menolak?”. “Takut begini-begini”. “Takut suara mesin? Mengganggu tidur siang anaknya?”

T : *Pak Wali juga kan ke sana, bilang kalau nanti ada gangguan-gangguan. silahkan saja ditinjau ulang, tapi mereka tanggapannya pokoknya mau dijadikan tempat training.*

J : Di sana kan banyak sampah. Kenapa mau dibikin balai rakyat? Dilihat dulu lah prioritas kepentingannya. Kalau kita hanya mencantumkan “dilarang buang sampah – ancaman hukuman kurungan sekian bulan – denda Rp 50.000”, orang akan menganggap sampah masalah. Kita harus merubah pola pikir kita.

T : *Mungkin ini akan dimasukkan ke Perda sampah?*

J : Tidak akan, seberapa kuat sih Perda? Undang-undang yang melarang pembakaran liar saja dilanggar.

T : *Masyarakat tidak percaya pada fungsi lurah, camat, buktinya mereka hanya mau Pak Walikota yang datang.*

YUS: Cara seorang pejabat bawahan menghargai pimpinan, bahwa apa yang disampaikan itu harus disampaikan ke sana. Jadi, ”Anda kan sudah meremehkan Walikota”. “Nyadar nggak walikota itu, orang itu sudah tidak profesional?”

T : *Kalau sampai Walikota datang ke daerah situ, artinya jadi pukulan keras buat lurah dan camat? Kok untuk masalah seperti ini harus Walikota?*

J : Ada surat dari camat. Isinya apa. Ada Walikota. Itu kan bicaranya bukan bicara dari hati ke hati ke lurah.

T : *Kalau menurut bapak sendiri, gimana Pak Walikota?*

J : Ya, itu lah harus ada proporsi. Untuk pejabat dibawahnya kan malu harus bisa mempertanggungjawabkannya.

T : *Itu ada kaitannya dengan lurah Abadijaya yang dipindah?*

J : Lurah Abadijaya bagus juga, itu yang paling nurut.

T : *Kalau tanggapan Pak Wali sendiri terhadap ini bagaimana? cukup proporsional atau apa?*

J : Kecenderungannya jadi makin bertambah. Di APBD untuk lokasi tidak dianggarkan.

T : *Di 2009 ini ada anggaran khusus untuk sosialisasi?*

J : Ada.

Lampiran 4 (lanjutan)

T : *Kalau masalah komunikasi lurah dengan RW-RW-nya? untuk masalah tanah, kan ada pertemuan mingguan. Usulan ini seharusnya tahu.*

J : *Lurah itu kan setiap rapat mingguan, itu kan menginventarisir masalah. Dan lurah, RW-RW dikumpulkan. Dari situ kan bisa terbaca. Kalau misalnya ada tanah orang dipakai buat buang sampah, carilah orangnya, kita minta baik-baik.*

T : *Bisa jadi RW-nya gak datang-datang pak?*

J : *Gak datang tuh RW 27 (Taman Cipayung).*

T : *Artinya kalau masalah komunikasi sudah berjalan, kan nggak perlu sampai ada demo?*

J : *itu sudah...sudah negatif.*



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 4

Tanggal wawancara : 14 Juni 2009

Tanya (T) : *Bagaimana gambaran mengenai latar belakang pembangunan UPS atau kebijakan pengolahan sampah di kota Depok?*

Jawab (J) : Kebijakan itu dasarnya adalah RPJMD Walikota Depok kemudian Perda No.2 tahun 2006, UU No.18 tahun 2008.

T : *Kepentingan-kepentingan apa dan siapa saja yang terkena kebijakan pembangunan UPS?*

J : Pada taraf pengambilan kebijakan itu dilakukan oleh Walikota, tapi Dinas teknis sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah.

T : *Jenis manfaat yang akan dihasilkan pemerintah dari kebijakan UPS ini? Bagaimana agar hasilnya terealisasi?*

J : Manfaatnya adalah sampah terkelola dan tertangani dengan baik. Supaya terealisasi, antara perencanaan dengan pelaksanaan harus sesuai.

T : *Sejauh mana perubahan yang diharapkan terjadi pada implementasi kebijakan UPS ini?*

J : Yang diharapkan itu sesuai target, misalnya target pembangunan UPS 60 buah itu tercapai. Tidak hanya itu, tetapi juga sampai dengan implementasi operasionalisasi.

T : *Bagaimana bentuk perubahannya dalam lingkup individu, kelompok, masyarakat, aparatur pemerintah?*

J : Tidak mudah, karena dalam perjalanannya untuk mencapai terjadinya mengimplementasikan kebijakan ini banyak hal, tentunya penolakan dari masyarakat. Kemudian pro-kontra lah namanya program baru, yang dianggap sosialisasi juga belum maksimal sehingga banyak benturan dengan masyarakat. Apalagi dalam situasi kondisi politik ya, kalau di Depok ini cukup kental politiknya. Jadi karena pemerintah kita orang politik, jadi semua yang kebijakan yang keluar itu dipolitisir. Kadang-kadang ditunggangi oleh itu. Tetapi betul dalam perjalanannya tidak seperti yang diharapkan, banyak sekali berbenturan dengan masyarakat.

T : *Adakah pengaruh letak/lokasi pengambilan kebijakan terhadap efektifitas implementasinya?*

J : Sejauh ini saya memang melihat karena yang membangunnya siapa, memang ada lokasinya yang tidak bisa dimasuki truk sampah atau lokasinya terlalu jauh kemudian juga itu kurang efektif. Sebenarnya saya tidak boleh mengatakan itu tetapi memang kenyataannya seperti itu. Kalau kita bicara, itu kan masih ada kajian apakah dengan ditempatkan di lokasi ini sangat efektif atau tidak. Kan harusnya kita mengacu pada berapa timbunan sampah yang terbesar di titik lokasi. Biasanya timbunan sampah yang terbesar dan beragam itu di kompleks perumahan. Kalau masyarakat yang masih punya lahan yang jauh kemana-mana, mereka bisa menimbun dengan cara dikubur, dibakar. Tetapi memang letak lokasi ini memang harus menjadi bahan pertimbangan. Karena buat apa dibangun dengan harga yang mahal, kalau efektifitasnya kurang.

Lampiran 5 (lanjutan)

T : *Berarti kemarin tidak ada pertimbangan khusus kenapa dipilih di lokasi-lokasi ini?*

J : Pada awalnya kita sudah membuat rencana sekian unit, ok. Ternyata setelah dicek ke lokasi itu tidak seperti apa yang disampaikan oleh camat, lurah. Jadi akhirnya kita juga jadi kejar target. Yang penting ada dimana (penggantinya). Jadi agak kurang. Diharapkan di tahun 2009 ini, saya sudah ngomong dengan Pak Yusmanto, ini tidak boleh terjadi. Kalau kita memanfaatkan lokasi itu harus sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ketika menempatkannya salah, itu tidak akan efektif.

T : *Bagaimana peran para pelaksana kebijakan UPS mulai tingkat atas hingga bawah?*

J : Kalau kita sebagai Dinas instansi teknis, kita melaksanakan kebijakan yang direncanakan sesuai program dari Walikota. Artinya dari mulai Dinas teknis sampai dengan ke camat lurah sebetulnya sudah.

SEN: *Bagaimana strategi kepala DKP untuk memastikan para pelaksana (staf) untuk mengimplementasikan kebijakan UPS agar efektif ?*

J : Dalam tahap operasionalisasi, kita juga ada bahan evaluasi. Artinya dengan pelaporan tiap minggu, jadi kita juga tahu berapa sampah yang masuk, berapa sampah organik yang diolah menjadi kompos, berapa jumlah sampah non organik. Berupa *feed back* laporan dari tiap UPS. Untuk Perda pada UPS baru pada pembangunan saja, RPJMD. Untuk program dan kegiatan itu ada *feed back* untuk menilai apakah strategi mengimplementasikan kebijakan UPS ini efektif..

T : *Bagaimana pendekatan dalam sosialisasi, komunikasi kebijakan pembangunan UPS ini?*

J : Kalau bicara pendekatan dalam sosialisasi, komunikasi, itu juga tergantung orang yang menilainya. Kalau menurut kita misalnya cukuplah transfer *knowledge*-nya melalui camat, lurah, RW, kan tidak semua kelompok masyarakat yang cukup besar, tetapi bisa transfer *knowledge*. Tetapi pada kenyataannya banyak tuntutan bahwa penolakan terjadi akibat tidak adanya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi, kurangnya komunikasi, jadi tergantung kalau sebetulnya saya sih kalau sosialisasi itu sudah kita laksanakan per kecamatan. Sosialisasinya berupa penyampaian bahwa kita akan membangun UPS, konsepnya seperti ini dengan segala macam dampaknya. Tapi itu dianggap kurang. Tuntutan masyarakat itu tidak jelas, pokoknya bilang kurangnya sosialisasi. Kita kan ada struktur, ada lurah, camat, RW, RT. Kalau dalam pertemuan itu ada lah beberapa orang yang tidak setuju. Beberapa orang memprovokasi, akhirnya pada jadi tidak setuju. Tapi pada prinsipnya sekarang UPS sudah berjalan, jadi kalau yang namanya perubahan itu pasti selalu ada hambatannya. Setiap ada kebijakan baru, ditolak. Kalau sudah berjalan, apalagi nanti kalau sudah terlihat hasilnya, pasti akan diterima.

T : *Bagaimana pengelolaan sumber daya yang diperlukan dan bagaimana pengaturannya, apa saja pertimbangannya? Kendalanya?*

J : Sumber daya: dana, tenaga, sarana. Dana masih ditanggung APBD dua. Ini juga dana yang dikeluarkan untuk operasional per bulannya cukup besar. Sarana, otomatis di tiap UPS harus dipenuhi dengan sarana seperti misalnya untuk pegawainya diperlukan alat pelindung diri, sarana yang lain seperti gerobak sampah dan yang lainnya. Kemudian dari segi tenaga, kita memang melibatkan masyarakat sekitar. Supaya merasa memiliki. Pertimbangannya dan kendalanya, untuk biaya operasionalnya yang ditanggung APBD

Lampiran 5 (lanjutan)

itu cukup berat untuk 60 UPS. Diharapkan dalam 2 tahun ke depan sudah bisa mandiri. Sebagai gambaran, jumlah pegawai tiap UPS ada 14 orang dengan masing-masing gaji Rp.750.000. kalau sampai sekarang baru ada 20 unit, nanti tahun ke depannya bertambah lagi. Belum lagi BBM yang dikeluarkan untuk mesin.

T : Bagaimana keterlibatan (proses, kewenangan/peran, strategi) dalam implementasi kebijakan UPS?

J : Mungkin saya akan menyoroti masalah di Dinas sendiri kan mungkin sama dengan camat dan lurah juga itu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam program kerja. Dalam melaksanakan kebijakan ini kan semua kita mengacu kepada program yang sudah disetujui oleh Dewan. Jadi dalam prosesnya seperti itu. Jadi prosesnya pelaksana kegiatan melaksanakan kebijakan kemudian kewenangan dalam bentuk kalau sekarang kan apa yang sudah tertuang dalam DPA ya dia sudah menjadi tanggungjawab, tugas dan kewenangan. Kalau kebijakan secara umum adanya di Walikota. Itu sama mulai dari dinas kemudian kecamatan pun sama.

T : Kalau menurut Ibu sendiri peran Pak Walikota dan DPRD dalam menjalankan kebijakan ini seperti apa? karena RPJMD disahkan oleh kedua belah pihak ini.

J : Pada saat Walikota mencalonkan diri dalam Pilkada, beliau kan punya program, ini lho, kalau saya terpilih menjadi walikota saya akan melaksanakan ini. Salah satunya adalah ini ya. Misalnya UPS dan lain sebagainya. Nah, salah satunya ini, pembangunan UPS. Kemudian disetujui oleh dewan. Ini sudah berjalan tapi kan ada kendalanya pada saat pelaksanaan. Ini seharusnya kan berjalan mulai tahun 2007, pembangunan 10 unit UPS. Tapi ternyata kan tidak mudah mencari lokasi. Ada lokasinya fasos/fasum (fasilitas sosial/fasilitas umum), ada juga yang hak milik. Jadi, ini tidak mudah. Akhirnya terealisasi mulai tahun 2008. Jadi jumlah unit UPS yang dibangun ini kumulatif. Dalam 2 tahun terbangun 20 unit. Jadi rencananya tahun 2009 ini akan dibangun 10 unit UPS. Jadi kalau dari bapak (Walikota) mempunyai kebijakan dengan programnya kemudian Dewan juga sebagai salah satu fungsinya sebagai legislatif, sudah ya. Mereka melegislasi, kemudian kalau kita implementasikan dalam bentuk kebijakan program. Programnya pembangunan UPS. Itu ada di RPJMD, ada bukannya, mungkin bisa minta di perencanaan.

T : Berikutnya terkait dengan karakteristik lembaga, jadi kebijakan diimplementasikan, itu kan ada lembaga-lembaga yang berwenang. Bagaimana karakteristik lembaga itu, kapasitasnya seperti apa? dalam hal ini DKP. Menurut Ibu karakteristik DKP dalam melaksanakan kebijakan ini cukup siap atau sudah cukup bagus? Karena ini kan kebijakan baru, apakah perlu inovasi lagi atau seperti apa?

*J : Pada tahap sebelum mengimplementasikan, atau perencanaan, kita ini kan sudah beberapa kali rotasi. Berarti pejabatnya banyak yang mutasi ya, termasuk saya. Termasuk Pak Yusmanto melanjutkan kebijakan yang rencana awal. Sehingga memang ada stagnan dalam perputaran itu. Jadi kalau menurut saya untuk kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan kebijakan ini sudah sesuai karena kan ada aturannya. Jadi DKP sebagai *leading sector* untuk pembangunan UPS ini. Tapi ada sebetulnya sektor-sektor yang terkait sebetulnya kan harus sama-sama. Karena ini kan programnya kan program unggulan. Misalnya di sana ada Kominfo, itu kan bisa jadi corong kita untuk masyarakat. Kemudian camat, lurah itu otomatis mereka mempunyai lokasi yang akan ditempati. Jadi tetap tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus melibatkan lintas program dan lintas sektor.*

Lampiran 5 (lanjutan)

T : *Selama ini seperti apa berjalannya Bu? DKP kan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab terhadap sukses tidaknya program ini. Sedangkan program ini merupakan program unggulan?*

J : Sebagai contoh saja, ketika ini akan SPL (Surat Penentuan Lokasi) sudah ditentukan misalnya, saya ingat pertama kali saya masuk kesini, tahun 2008 itu baru dirapatkan dengan semua camat dan lurah. Mereka kebingungan karena pada saat ditanya sama Pak Walikota , “coba kecamatan sukrajaya mau berapa lokasi? “, dijawab sekian, kecamatan yang lainnya sekian, Begitu dicek ke lapangan ternyata itu asal sebut saja. Ternyata belum siap. Kelihatan sekali. Sehingga banyak pada saat, banyak misalkan bahwa ini harus terbawa, harus ada. Kenapa kapasitas ada kaitannya dengan berapa perlengkapan lokasi itu ada yang tidak benar. Berarti ini perencanaannya kurang bagus. Satu, dari sisi perencanaan kurang matang, kalau perencanaannya matang itu otomatis sudah ada kajiannya. Mungkin penghasil sampah terbanyak, tempat yang sangat strategis untuk dibangun UPS. Tapi kenyataannya tidak begitu karena ada ketidaksiapan dari pelaksana sampai ke bawah itu.

T : *Peran kepemimpinan, pemimpin di skala yang lebih tinggi, kepala DKP, atau DPRD itu seperti apa, sebagai mitra?*

J : Kalau DKP, saya pikir sudah *all out* ya untuk meng-*goal*-kan program ini. Karena terus terang banyak penolakan kemudian didemo hampir setiap saat kita tetap lanjut terus, apapun sampai ke pengadilan segala macam ya. Cuma kalau peran dewan sebetulnya kalau kita lihat dari fungsi Dewan itu kan sebagai wakil rakyat, dia sudah ketok palu, sudah ok, artinya harusnya kan dia harus ikut mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita sudah mensahkan undang-undang dan melegalisasi program pemerintah. Ini idealnya menurut saya. Tapi kenyataannya ketika masyarakat berbondong-bondong demo ke Dewan, itu diterima oleh Dewan dan seolah-olah menyalahkan kita. Menurut saya ini agak tidak benar. Padahal kalau mau dibalikkan, anda kan sudah tandatangan, ngapain juga ribut. Jadi belum menjadi wakil rakyat yang baik. Harusnya kan Dewan itu bisa menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat.

T : *Kalau yang lebih detail, camat lurah itu seperti apa? sebagai penyedia lahan, tadi dibidang ada yang ketika diminta lokasinya ternyata belum siap.*

J : Itu awal ya, pada awal kenapa lokasinya ada yang seolah-olah asal. Pada perjalanannya ke sini, mereka sangat mendukung, karena dari awal ini kan pengalaman pertama, kita masih meraba-raba seperti apa maksudnya belum jelas. Kalau sudah ada yang terbangun, mereka juga ingin menggoalkan ini. Kan, nanti kalau sudah tidak ada pembangunan UPS lagi, tiap kelurahan sudah punya, sementara di kelurahan yang lain belum, kan itu juga jadi masalah.

T : *Ke depannya ini nanti ada lembaga khusus yang untuk mengelola UPS ini. Mengingat UPS-UPS ini kan semacam pabrik kompos lah bisa dibidang dari sampah itu sendiri. Apakah akan dikelola DKP atau diserahkan ke masyarakat ?*

HEN: Saya tidak tahu. Mungkin itu ada di Bappeda yang lebih tahu mengenai hal ini. Kami hanya melaksanakan bagaimana UPS ini bisa berjalan dengan baik. Tapi untuk ke depannya, statusnya mau seperti apa, mau diserahkan kepada masyarakat atau bagaimana mungkin Bappeda yang lebih tahu.

Lampiran 5 (lanjutan)

T : *Bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan UPS ini?mulai dari level tertinggi sampai bawah.*

J : Jadi berarti dari sisi aparat ya, kalau kita sebetulnya bukan membela diri. Kita pasang badan istilahnya, setiap saat kita diminta sosialisasi. Mau hari minggu, mau malam hari, mau apa, kita datang. Walaupun pada ujung-ujungnya penolakan. Tapi ya, dengan setelah kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa konsep UPS seperti ini dan ke depannya seperti ini. Kemudian kita melaksanakan implementasi dari undang-undang dan RPJMD maka dari sekian banyak, mungkin dari 20 yang direncanakan, itu hanya 3 yang ada resistensi, menurut saya kalau lebih dari 75% masih bagus.



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 5

Tanggal wawancara : 11 & 14 Juni 2009

Tanya (T) : *Bagaimana gambaran mengenai latar belakang pembangunan UPS atau kebijakan pengolahan sampah di kota Depok?*

Jawab (J) : Dalam waktu kampanye Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) itu sudah dikemukakan masalah SIPESAT. Namun SIPESAT ini dianggap bermasalah. Alasannya saya juga tidak tahu. Pak Walikota menulis mengenai SIPESAT di harian *Kompas*. Sampah itu terutama di kota-kota besar menjadi masalah yang besar karena dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah sampah yang dihasilkan pun meningkat. Lahan untuk TPA yang representatif di kota Depok pun tidak ada. Memang ada lahan yang dipakai untuk TPA, tapi ukurannya tidak sebanding untuk melayani besarnya kota. Itu dibuat saat status Depok masih kotif (kota administratif). Yaitu yang terletak di Cipayang. Dan itupun harus ditutup dalam beberapa tahun ke depan karena berbenturan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar situ. Jika TPA diperluas akan mengancam kenyamanan warga sekitar. Jadi sebagai jalan keluarnya akan dibangun UPS-UPS yang letaknya dekat dengan tempat dari mana sampah itu berasal. Jadi letaknya di dalam permukiman dalam radius tertentu. Karena di kota Depok ini yang banyak dihasilkan itu sampah rumah tangga yang mengandung banyak sampah organik. Sampah yang akan diolah yaitu sampah organik. Mengenai sampah yang bukan organik, tetap akan diangkut ke TPA. Atau kalau mau dijadikan komoditi oleh masyarakat sekitar, dipersilahkan. Hasil dari pengolahan sampah organik itu kompos. Di beberapa TPS, sudah ada masyarakat yang biasa menjual kompos. Namun banyak juga yang belum tersalurkan kompos hasil pengolahannya. Kita akan koordinasi dengan dinas-dinas yang lain yang membutuhkan kompos untuk penyalurannya. Jadi hasil komposnya itu boleh dijual oleh yang sudah punya pasar sendiri, maupun digunakan oleh pemerintah kota Depok. Untuk lahan yang dipakai UPS ada beberapa yang berstatus hak milik dengan perjanjian antara pemilik lahan walikota, ada juga lahan kosong. Lahan kosong itu ada yang berasal dari pengembang kompleks perumahan, maupun dari kawasan industri yang harus menyediakan untuk itu. Selain itu ada juga peningkatan dari TPS-TPS, maksudnya TPS yang lahannya masih luas, dibangun UPS. Ada juga pembangunan UPS di atas lahan TPA, yang jumlahnya sekitar 4 buah, di dekat TPA Cipayang.

T : *Kepentingan-kepentingan apa dan siapa saja yang terkena kebijakan pembangunan UPS?*

J : Kalau mengenai kepentingan, sebetulnya ini merupakan kepentingan warga Depok walaupun saat pengusungannya itu dibawa pada saat PILKADA oleh salah satu calon tertentu yang kemudian memenangi PILKADA. Itu kepentingan politisnya. Tetapi kepentingan sosialnya itu warga masyarakat. Berikutnya kepentingan ekonomi.

T : *Jenis manfaat yang akan dihasilkan pemerintah dari kebijakan UPS ini? Bagaimana agar hasilnya terealisasi?*

J : Manfaatnya yaitu untuk mengurangi debit sampah di kota Depok, mengurangi beban TPA, edukasi kepada masyarakat supaya aktif terlibat dalam pengelolaan sampah kota Depok. Supaya hasilnya terealisasi, adanya pendidikan caranya membuang sampah atau pengoperasian UPS di sekitarnya.

Lampiran 6 (lanjutan)

T : *Sejauh mana perubahan yang diharapkan terjadi pada implementasi kebijakan UPS ini?*

J : Diharapkan pemilahan sampah bukan di UPS, tetapi di rumah warga masing-masing. Jadi diharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masyarakat menjadi mengerti (masalah pengelolaan sampah), dari sampah tersebut bisa jadi lahan ekonomis terutama untuk masyarakat yang selama ini mendapat penghasilan dari sampah. Untuk lingkup individu diharapkan bisa menjadi lapangan kerja bagi yang belum mendapat pekerjaan. Untuk lingkup kelompok, sebenarnya di lingkungan masyarakat sudah ada beberapa kelompok yang sadar tentang pengelolaan sampah, Dengan adanya kebijakan ini tentunya ikut membantu membantu mereka. Karena mereka tidak sendirian. Sedangkan untuk lingkup masyarakat dan aparat pemerintah, perubahan yang diharapkan adalah adanya distribusi informasi mengenai pengelolaan sampah dari aparat pemerintah ke masyarakat, sehingga masyarakat pun jadi lebih tahu. Masalah sampah penanganannya mahal. Jadi jika masyarakat ikut terlibat, ini akan meringankan beban yang ditanggung pemerintah.

T : *Adakah pengaruh letak/lokasi pengambilan kebijakan terhadap efektifitas implementasinya?*

J : Menurut saya hal ini adalah masalah kritis. Ini kan problem jualannya Walikota, tapi terus terang saja sebagai orang yang ada di biro program, idealnya begitu keluar program, harus diketahui bagaimana pelaksanaannya kelak, Apakah nyata atau sulit merealisasikannya. Menurut saya, untuk masalah UPS ini berada di antara keduanya. Kenapa saya bilang demikian? Dibilang hal ini nyata, karena permasalahannya sangat jelas dan harus cepat ditanggulangi. Dalam hal ini yaitu sampah. Jadi harus segera dikurangi. Yang sulit adalah menentukan lokasinya dimana. Karena pada saat dia (Walikota) mengambil program tersebut, dia tidak pernah secara terperinci memberikan penjelasan mengenai detail langkah apa saja yang akan dilaksanakan sampai ke tingkat kelurahan. Itu akan memberikan dampak sampai ke bawah karena tidak semua (kelurahan) siap untuk menyiapkan lahan. Seharusnya program ini dilaksanakan di tahun 2007. Namun baru 1 tahun kemudian dimulai, itu pun dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sehingga berkesan tumpang-camping terutama dalam hal penyediaan lahan dan legalitasnya. Legalitas lahannya tidak disiapkan secara baik secara struktural dari Sekdanya. Dari awalnya tidak pernah ada pembicaraan yang serius mengenai langkah-langkah pelaksanaannya. Sehingga kami di tingkat pelaksana mencoba-coba (*trial & error*) untuk menjalankannya. Syukurlah bisa selesai.

T : *Bagaimana peran para pelaksana kebijakan UPS mulai tingkat atas hingga bawah? Bagaimana strategi kepala DKP untuk memastikan para pelaksana (staf) untuk mengimplementasikan kebijakan UPS agar efektif ?*

J : Mestinya itu ditanyakan ke Kepala Dinas, karena saya hanya Kepala Bidang.

T : *Bagaimana pendekatan dalam sosialisasi, komunikasi kebijakan pembangunan UPS ini?*

J : Sebelum pembangunan UPS yang berjumlah 20 (tahun 2008), sebelum tahun 2007 (karena pada awalnya memang direncanakan pembangunan UPS mulai tahun 2007, namun tertunda sampai 2008) ada sosialisasi secara umum per kecamatan bahwa dalam 5 tahun ke depan di Kota Depok akan dibangun 60 UPS. Rencananya tahun 2007 akan

Lampiran 6 (lanjutan)

dibangun 10 UPS. Ada juga pendekatan sosialisasi per tahun yang disampaikan dalam pertemuan mingguan yang disampaikan oleh camat di kecamatan. Bahwa akan ada pembangunan UPS, dan apabila ada warga yang mau tanahnya dipakai untuk UPS, silahkan menghubungi DKP. Jadi para pemilik tanah datang ke DKP, lalu DKP akan mengecek lokasi dan memberitahukan pemilik tanah untuk menyiapkan legalitasnya. Saya rasa sosialisasinya sudah cukup, tapi saya tidak tahu untuk masalah kualitas sosialisasi tersebut. Apakah mereka pernah melakukan semacam angket, itu juga kan penting. Jadi kita tahu *feedback* dari masyarakat seperti apa. Karena kita tidak tahu sampai dimana mereka mengerti apa yang disosialisasikan. Respon dari masyarakat tidak pernah ada secara tertulis.

T : *Bagaimana pengelolaan sumber daya yang diperlukan dan bagaimana pengaturannya, apa saja pertimbangannya? Kendalanya?*

J : Kalau masalah jadwal dan pengelolaan dana untuk apa saja kita tahu, tapi mengenai pertimbangannya saya rasa itu bukan pertanyaan yang tepat buat kami. Kendalanya kita baru pertama kali melaksanakan hal seperti ini, namun ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Ada masalah kecelakaan kerja, walaupun masih bisa ditangani. Selain itu ada masalah dengan tumpukan hasil kompos yang dihasilkan, karena hubungan dengan pembeli kompos juga belum terjalin secara simultan. Ada juga masalah mesinnya, *conveyor belt*-nya belum jalan, jadi banyak hal untuk pembelajaran untuk masa mendatang.

T : *Dalam implementasi kebijakan sampah (UPS) ada aktor-aktor yang terlibat. Siapa saja aktor formal dan informal yang terlibat dan berkepentingan terhadap kebijakan itu?*

J : Aktor formal: (1) Pemerintah kota (Walikota, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH), bagian hukum Sekda kota Depok, bagian perlengkapan Sekda kota Depok, Dinas Tata Kota dan Bangunan, aparat di lokasi masing-masing lurah dan camat; (2) Kontraktor, konsultan perencana, pelaksana konstruksi, pengawas yang berasal dari luar pemda. Mereka diadakan dengan Keppres no 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang /jasa pemerintah. Selain itu juga ada penyedia mesin. Semuanya melalui lelang. Untuk aktor non-formal dari masyarakat ada LPM, RT/RW, dan masyarakat sekitar UPS tersebut.

T : *Masing-masing kepentingan berbeda, bagaimana peran, kewenangan dan tanggung jawab mereka?*

RDT: Untuk itu, yang lebih terperinci, kalau saya kan sudah saya beritahu, jadi lihat saja dari hasil wawancara sebelumnya.

T : *Bagaimana karakteristik dan kapasitas kelembagaan DKP dalam menyikapi kebijakan ini ?*

J : Kalau menurut saya sudah cukup *perform*, karena (pembangunan) yang 20 itu sudah jalan. Kalau dari segi perencanaan sudah cukup bagus lah. Tapi mungkin dari segi implementasi agak sedikit kurang. Ada yang perlu ditingkatkan dalam masalah komunikasi dengan masyarakat. Lalu masing-masing pihak yang terlibat di DKP harus saling membantu. Terus masalah pendanaan juga itu yang paling pokok. Untuk tahun ini ada, tapi masih belum cair.

Lampiran 6 (lanjutan)

T : *Bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan UPS ini? (mulai dari dinas terkait hingga pelaksana proyek).*

J : Sangat patuh. Bahkan pihak kecamatan dan kelurahan sangat mendukung. Tapi tingkat kepatuhan bisa juga dilihat dari ini ya pak ya, misalkan kita lihat per lokasi, kalau dilihat dari luar mungkin kurang responsif tapi sebenarnya tidak. Terkait dengan kondisi, apakah pencarian lokasi itu gampang? Kalau gampang ya mereka sangat patuh. Tapi kalau misalnya agak sulit, bukannya mereka tidak patuh. Tapi memang karena sulit. Dalam hal ini daya tanggap di masing-masing lokasi disesuaikan dengan keadaan. Kan, di sini tidak kerja sendiri. Kalau masalah pembangunannya dilihat dari personilnya juga.



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 6

Tanggal wawancara : 8 Juni 2009

Tanya (T) : *Mengenai latar belakang pembangunan UPS?*

Jawab (J) : Jadi intinya, UPS ini Alhamdulillah, meskipun kita tahu memberitakan karena itu sebelum lahirnya undang-undang sudah direncanakan memang. Alhamdulillah, selama pendekatan kepada masyarakat Cipayung yang terpenting pembangunan sudah terwujud. Kemarin itu waktu kita pertemuan dengan masyarakat Cipayung. Kalau pas pada waktunya nanti terjadi gangguan lingkungan, kan secara undang-undang itu kan pertama yang lebih dekat dengan permukiman, kedua fasilitas umum, ketiga kali, memang kalau berbicara normatif aturan itu memang boleh dikatakan sedikit melanggar, tapi harus kita pahami sebagai warga Depok kondisi lahannya yang akan menjadi pengolahan, tapi Alhamdulillah Pak Wali pendekatan dengan masyarakat mengizinkan sampai dibangun. Walaupun nanti akan di operasikannya UPS itu yang menimbulkan gangguan kepada masyarakat kita akan meninjau kembali.

T : *Terkait dengan UPS kira-kira kepentingan apa saja yang terpengaruh oleh kebijakan sampah dan pembangunan UPS?*

J : Yang jelas kalau kepentingan – kepentingan secara umum kepentingan masyarakat.

T : *Kepentingan pemerintah apa dalam hal ini masyarakat apa?*

J : Kepentingan pemerintah yang jelas melayani masyarakat dibidang persampahan, masyarakat juga kalau pemerintah tidak melayani ya tentunya mereka tidak jelas, sekarang mohon maaf kita berbicara penilaian Adipura, justru yang paling jelak kalau sampah dibakar nilainya anjlok 30, masyarakat tidak suka, makanya kita harus memahami katakter masyarakat terus kita juga harus pelan-pelan kepada masyarakat.

T : *Nah manfaatnya diperoleh dari pembangunan UPS dari segi pemerintah ?*

J : Cukup banyak untuk menghasilkan ekonomi nilai tambah, karena di lokasi UPS itu terjadi pemilahan mana yang bisa dijual, mana yang bisa di daur ulang, kedua menambah lapangan kerja tadi.

T : *Kita ada berapa orang Pak?*

J : Kita ada 11 orang

T : *1 UPS?*

J : Ya 1 UPS, terus yang kedua ramah lingkungan bisa dikatakan itu pemerintah, yang ketiga masyarakat juga tidak pusing tidak terjadi penumpukan dibeberapa titik, misalnya kalau kita buang di TPS kadang-kadang alasan kalau pemerintah kota lewat TKP armada kurang, dan memang ditampung dari UPS diolah dan nanti hasil olahannya bisa jadi pupuk.

T : *Kemudian perubahan yang diharapkan dari masyarakat kelompok terhadap diadakannya UPS apa yang diharapkan oleh masyarakat, prilaku?*

Lampiran 7 (lanjutan)

J : Pertama harapan dengan adanya pembangunan UPS kita anggap pertama disiplin masyarakat tentang membuang sampah, jadi kita sudah mencoba melalui RW, PKK, siaga bagaimana lingkungan itu menyediakan sampah organik dan non organik.

T : *Jadi sudah dipilah di awal ya?*

J : Kita selalu mengajak masyarakat, kedua buanglah sampah sesuai tempatnya. Dengan kehadiran UPS mudah-mudahan masyarakat akan mandiri nantinya.

T : *Kalau penentuan lokasi itu Pak, Seperti apa dulu?*

J : Saya, mohon maaf mungkin kalau bicara ke belakang memang belum bertugas, nanti dilantik 31 Desember... Januari. Tetapi karena saya bagian dari warga Abadijaya. Kenapa kita mesti jalur 50, pertama di sana ada TPS. Dua sebelumnya itu ada TPS.

T : *Sebelumnya memang ada TPS?*

J : Ya, resmi TPS di tempat pembuangan sementara di Jalur Merdeka 2 satu, di Jalur Merdeka 1 satu, jadi yang menimbulkan gejolak masyarakat di jalur merdeka 1 di Cipayung memang ada TPS, harapan kan dulu kalau mas lewat misalkan jadi, dulu pemerintah seminggu tidak dipulangkan dari beberapa perumahan tidak diangkut sehingga begitu diangkat aroma wanginya kemana-mana, sehingga pemerintah punya kewajiban saja kan menangani mengatasi sampah dan ditentukan lah lokasi dari TPS menjadi UPS. Peningkatan!

T : *Pengaruhnya itu ternyata masyarakat malah menolak, mereka kan ingin yang tadinya bau menjadi tidak bau?*

J : Jadi kalau yang saya langsung dialog dengan teman sekalian saya kan tidak mau masyarakat mengusik kita, karena kita bagian dari mereka mohon maaf kalau segala kesalahan dari bapak Presiden sampai tingkat Kelurahan itu kan semua untuk masyarakat, jangan sampai bagaimana kita bersahabat dengan masyarakat kita coba pendekatan, ternyata juga mereka menolak intinya menolak Cuma mungkin keberadaan itu ditinjau kembali ke lokasi, ternyata memang tadi kurang kepada masyarakat mereka kan, kenapa tidak berdialog sebelumnya, itu kan saya tidak menuduh kepemimpinan yang terdahulu, tetapi mungkin introspeksi ke depan juga bagaimana, tapi syukur Alhamdulillah mudah-mudahan dengan terwujudnya UPS akan sedikit mengurangi aroma itu.

T : *Kemudian kewenangan untuk lurah dalam hal ini apa Pak?*

J : Pertama peran kali ya. Sebelum didirikan UPS kita sosialisasi dimana titik yang akan ditentukan, kalau misalnya masih dibutuhkan titik lokasi pembangunan baru. Sekarang kalau sudah berdiri peran kita tadi menginformasikan kepada teman-teman, kepada Pak RW tolong sampaikan bahwa kita sudah ada UPS yang beroperasi, tolong. Suatu saat mungkin pemerintah juga bertahap tidak semua se-Abadijaya ke UPS tetap ada yang diangkut ke TPA makanya peran kita tentang dioperasikannya UPS.

T : *Kalau dulu mungkin kompensasinya ada bermasalah tidak?*

J : Yang sama merdeka 2 Alhamdulillah dukungan masyarakat, dulu taman merdeka 1 yang di merdeka 1 memang masyarakat kampung sangat setuju ada dukungannya. Cuma Taman Cipayung kadang memang tadi mungkin di sisi lain ada pembahasan dengan UPS Cipayung. Sehingga memang keberadaannya selalu dekat pandangan mereka dan

Lampiran 7 (lanjutan)

mungkin Pak Lurah bersama LPM belum sempat sosialisasi karena dianggap bahwa itu ada pembatas.

T : *Bukan wilayah sana?*

J : Bukan wilayah sana. Sebelumnya memang pernah ada komunikasi tidak sampai titik temu jadi pemerintah tetap nanti membangun itu karena peningkatan.

T : *Dan hubungan antar struktur birokrasi seperti apa Pak? Dari Dinas se-kecamatan, se-kelurahan dalam implementasi UPS ?*

J : Ya jadi betul kewajiban Dinas selama ini Dinas DKP menginformasikan kepada lurah.



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 7

Tanggal wawancara : 12 Juni 2009

Tanya (T) : *Pertama-tama saya minta informasi latar belakang pembangunan UPS, latar belakang warga khususnya warga Abadijaya yang sempat menolak, kronologis penolakan itu seperti apa, dan sekarang kondisinya seperti apa menurut bapak?*

Jawab (J) : Minta sosialisasi pertama katanya, namun sudah berupaya lurah dan LPM yang terdahulu. Sosialisasi di Kelurahan Abadijaya mungkin gak datang warga 27, bukan mungkin tapi memang gak datang warga 27, terjadilah...

T : *Tapi diundang?*

J : Diundang, akhirnya ada sosialisasi di kecamatan, warga 27 minta fasilitasi pertemuan lagi di kecamatan. Salah satu warga 27 H.Lutfi tidak datang sampai di jemput sama saya, dia pinginnya di lingkungan, bukan di kecamatan secara kekeluargaan, bukan secara kedinasan, masyarakat tetap minta hadir akhirnya tetap Pak Yusmanto dan Ibu Heni ada di tempat nah, terjadilah miskomunikasi, Pak Camat ada di tempat, terjadi di kantor kecamatan, langsung mengarah terjun lokasi UPS.

T : *Karena wakil Cipayung tidak ada yang hadir?*

J : Ya, dari kecamatan demo massa berulang sampai demo ke DPRD, sampai datang orang DPRD. Tapi waktu itu juga tidak diikuti sama saya, datang langsung pembangunan digeser dalam artian 8 meter dari 4 meter dari titik tembok. Dari situ , terus pemerintah sendiri akhirnya pembangunan berjalan. Jadi, latar belakangnya begitu saja awalnya demo ampai ke DPRD, sosialisasi dilayani oleh kecamatan, lalu Kabid prasarana datang, lalu cek ke lokasi, lalu ada balasan dari Dewan, ada surat dari DPRD

T : *Surat dari DPRD, pembangunan dilanjutkan?*

J : Tidak, tidak ada bahasa seperti itu, pembangunan di kaji ulang lah, gak ada suratnya sih, saya cuma baca saja.

T : *Surat dari komisi C?*

J : Betul, dari komisi C datang ke RW 27 juga, sifatnya sih pembangunan UPS yang akan direncanakan harus dijalankan. Cuma tidak ada bahasa dilanjutkan. Cuma RPJMD harus selesai sekian UPS, gitulah, harusnya pemerintah tidak tetap terus dibangun.

T : *Baik, selanjutnya adalah mengenai isi kebijakan pengelolaan sampah kegiatannya adalah pengadaan UPS di kelurahan-kelurahan, menurut pak Irawan kepentingan-kepentingan warga apa yang terpengaruh dari kebijakan pembangunan UPS ini, kepentingan yang terganggu apa sebenarnya?*

J : Bau, sebetulnya tanggapan mereka bau, namanya sampah dan pemerintah ambil kebijakan di Cipayung itu sampah sudah tidak memadai sehingga harus dibangun UPS, supaya sampah yang ada diolah berkurang, dibersihkan supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, itu masyarakat karena judulnya sampah ditaruh di dekat lokasi, Masyarakat tahunya bau. Bau dan suara mesin.

Lampiran 8 (lanjutan)

T : *Mereka tahu bedanya TPS dan UPS?*

J : Mereka katanya tahu, saya dengar juga waktu marah-marah, tahu. Protes RW 27 tau, hanya karena itu di situ tidak ingin saja ada. Supaya tidak terganggu bau, karena sampai ada lalat maghrib-maghrib, itu waktu masih menjadi TPS, sekarang kalau UPS saya jamin, gak.

T : *Kekhawatiran mereka dampaknya, ya?*

J : Ya, dampaknya

T : *Sekarang dari LPM manfaat apa yang diperoleh dari pembangunan UPS ini harusnya?*

J : Pertama ya dirasakan dari pertama kali operasi tanggal 20 Mei. Kita ada di dalamnya di situ, tenaga kerja dari kampung sini sendiri, mereka kita bawa ke tempat operasi. Ternyata itu mudah, yang tadinya kebisingan itu ternyata tidak. Orang yang tadinya dia anggap sampah itu jijik, tapi dia akhirnya dengan di tempati suatu tenda terus mesin, terus dia lihat sendiri perputaran mesin sehingga keluar itu, tampaknya karyawan itu malah tidak dianggap itu menjijikkan, itu yang saya ikuti.

T : *Ada lagi manfaatnya?*

J : Manfaatnya sampah yang tadinya menumpuk sampai berserakan. Tapi kalau misalnya diolah jangan dibayangkan kalau sampah itu tidak berarti, sampah itu berarti. Sampah itu emas.

T : *Berarti ada manfaat secara ekonomi untuk warga sini?*

J : Ada, karena begini, ketika sampah di buang ke TPS oleh tukang sampah, TPS ke mobil gak ada yang milah-milah, botol-botol plastik aqua, plastik mie.

T : *Paling ada pemulung?*

J : Ya pemulung, tapi sekarang yang kerja juga milah-milah, ya artinya jadi rupiah gitu.

T : *Dari pembangunan UPS ini apa yang diharapkan pemerintah menurut Bapak? perubahan apa dari tadinya tidak ada UPS jadi ada UPS?*

J : Perubahan apa nih? gunung sampahnya apa? ya tadi kan itu, mengurangi debit sampah di TPS, sehingga bisa diangkut ke UPS diolah, ya mungkin mengurangi volume sampah yang harus di buang ke TPA.

T : *Berarti mengurangi volume sampah di TPA. Pengaruh letak atau lokasi pengambilan keputusan, ya disini dari pendahuluan tadi sepertinya ada? kenapa di sini? nggak disini?*

J : Kan tadi disitu ada TPS, justru UPS itu dibangun berdekatan dengan TPS gitu.

T : *TPS kan cuma tempat singgahan dari lingkungan tapi ini dijadikan UPS yang kapasitasnya juga besar sehingga dianggap bermasalah bagi warga yang dekat lokasi*

J : Ya

T : *Berarti menurut bapak penentuan lokasi ini seperti apa sih?*

Lampiran 8 (lanjutan)

J : Penentuan sih memang kalo di situ mungkin karena untuk Taman Cipayung ada UPS gitu, kekhawatirannya itu, sampah dari mana-mana masuk karena itu kan jalur alternatif, dari mana-mana saja bisa masuk ke situ. Itu kekhawatiran kalau tidak terolah gitu lah, adanya sampah yang kelihatannya banyak, mesin satu kayaknya, mungkin kekhawatirannya itu.

T : *Dirasakan bermasalah tidak menurut bapak?*

J : Kalau saya lihat permasalahan yang di Taman Cipayung, ya kalau menurut saya yang menentukan titik itu kan bukan kita.

T : *Yang menentukan siapa pak?*

J : Yang menentukan ya dikaji dari TPS yang ada di situ.

T : *Ya ini katanya peningkatan dari TPS ke UPS.*

J : Ya peningkatan TPS jadi UPS, Dulu kan bagian H.Lutfi tata usaha DKLH.

T : *Dia yang menentukan lokasi itu?*

J : Ya termasuk, sama-sama sih waktu itu ada LPM, lurah, Pak Lutfi, Pak Tisna, ya waktu itu dilihat ada TPS, ya akan diolah terus di sini, begitu.

T : *Terus warga?*

J : Warga Cipayung sebetulnya begini..., itu kan tanah RT 5 RW 01, Abadijaya, kalau Cipayung dibatasi oleh tembok RW 27. Nah, di situ mungkin miskomunikasi. Harusnya kan waktu itu bareng sebelum adanya, ini loh, UPS di sini.. setuju tidak?, setuju tanda tangan. Itu kan dulu tidak ada. Dibuat itu seperti itu.

T : *Jadi dipermasalahkan dibelakang ya pak?*

J : Ya, Taman Cipayung merasa tidak sosialisasi, tapi sosialisasi diundang bahwa akan ada pengolahan sampah.

T : *Tentang pelaksana program UPS ini pelaksananya siapa-siapa saja pak? mulai dari dinas, lurah, camat, warga, siapa-siapa saja pak?*

J : Pelaksana yang mengelola di UPS? Yang berkaitan ya DKLH, ya pimpinan Walikota, ya berantai, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan.

T : *Camat tahu tidak?*

J : Kecamatan, kelurahan, RW, LPM.

T : *Nah dinas itu seperti apa tugasnya?*

J : Kembali ke kecamatan itu berantai itu, tetap dari dinas, camat, lurah.

T : *Untuk camat itu tugas/perannya apa?*

J : Perannya waktu itu ya ini aja sebagai pelapor dari tingkat kelurahan.

T : *Kalau lurah?*

J : Lurah waktu itu bersama, kembali itu kedinasan tidak mengajak pihak kecamatan, pihak kecamatan yang ditunjuk mengawal titik tempat.

Lampiran 8 (lanjutan)

T : *Ada orang yang ditunjuk?*

J : Gak ada, jadi sehingga akan ada pembangunan itu loncat langsung ke kelurahan, jadi ketika ada masalah baru camat diajak, ya berantai gitu Walikota ke camat, camat dinas.

T : *Kalau kelurahan penanggung jawab kelurahan?*

J : Maksudnya?

T : *Ada orang penanggungjawab untuk UPS di kelurahan, atau lurah langsung*

J : Ya lurah bersama dengan LPM cek lokasi.

T : *Jadi di level kelurahan yang bertanggung jawab lurah ya?*

J : Ya, pemimpin wilayah.

T : *Bukan pemilik proyek ya? pemilik proyek tetap DKLH, artinya penanggungjawab secara teknis, supply alat?*

J : Supply alat ya DKLH

T : *Lewat kontraktor yang mereka adakan tendernya, kan?*

J : Pengembang sama DKLH

T : *Jadi perannya lurah hanya menentukan tempat, berhubungan dengan warga juga?*

J : Ya betul

T : *DKLH tidak langsung berhubungan dengan warga juga kan? camat dalam sosialisasi*

J : Dalam sosialisasi DKLH melapor ke kelurahan, kelurahan memfasilitasi memanggil warga.

T : *Yang memberi materinya DKLH, dari kelurahan ada tidak sumber daya warga yang dikerahkan dalam pembangunan?*

J : Yang mana lagi? 27 lagi?, yang sudah berjalan apa belum nih?

T : *Yang sudah berjalan*

J : Dari segi pembangunan? Pembangunan yang tidak, tetap dari pihak pelaksana kontraktor, ya kalau disini tidak, kalau di tempat lain saya dengar ada warga dilibatkan untuk kerja, nah disini tidak

T : *Kemudian yang dikerahkan itu hanya penyediaan lahan saja ya, disini ada yang selain dari fasos/fasum?*

J : ya dua-duanya fasos/fasum.

T : *Di tempat lain kan ada lahan milik warga, jadi sewa gitu kan? jadi fasos/fasum semua ya?*

J : Ya, betul-betul.

T : *Inikan yang berperan atau yang terlibat dalam pembangunan UPS banyak Pak. Ada Walikota, DPRD, dinas, camat, lurah, LPM, warga sekitar selain juga ada kontraktor itu kan di bawah DKLH, nah kaitan-kaitan mereka itu seperti apa pak? perannya atau*

Lampiran 8 (lanjutan)

kekuasaannya atau kewenangannya dari mulai Walikota, kewenangannya apa dalam pembangunan UPS?

J : Maksudnya kewenangan siapanya, nih?

T : *Masing-masing, Dinasnya apa, Walikotanya apa, camatnya apa?*

J : Kalau saya, ya masing-masing ga tau, camat apa, kelurahan apa. Waktu itu proses tender ya, tender berjalan ada pemenang. Terus tiba-tiba si pihak pelaksana yang dapat kerjaan buat bangun UPS datang ke kelurahan, datang ke LPM, saya akan membangun ini tempatnya disini, pertama sih ke ..., ga lapor justru main mendirikan bangunan saja, saya keliling lihat ada bedeng, saya lewat saya berhenti padahal saya tahu mau dibangun. UPS tapi surat itu belum sampai ke saya, tapi bedeng sudah berdiri, saya tegur, disini ada 2 satu disini satu disini, rupanya pertama yang ngebangun disini yang dulu disini. Jadi tidak tahu sket gambarnya karena dia bukan orang sini, ga tahu medannya dia bangun aja bedeng, terus ga lama datang lagi, terus saya lihat dua-duanya gambarnya, wah ini yang ini. Yang pertama bangun bukan disini tapi disana, nah yang ini benar di sini. Terus dibongkarlah itu bedeng, dipindahkan, barulah dibangun. Jadi itulah harusnya dia ngebangun. Itu pembangunan ditemui ketika bedeng berdiri

T : *Sebelumnya ada pemberitahuan? Pak, kita mau bangun disini.*

J : Walaupun pihak DKLH katanya suruh datang ke kelurahan, LPM, RW, tokoh masyarakat

T : *Tapi kenyataan belum?*

J : Tidak ternyata dia langsung membangun karena merasa dia sebagai pemenang tender ingin membangun saja. Padahal di situ salah tempat, coba kalau dia ke kelurahan dulu, pasti tidak ada ini salah bedeng dibongkar dulu.

T : *Tapi pada akhirnya baru dipindahkan setelah tahu bahwa ini salah, bukan disini. Jadi keterlibatan warga saat pembangunan tidak ada ya?*

J : Ya, Langsung kontraktor.

T : *Sekarang terkait dengan penolakan warga, yang bapak lihat siapa saja yang terlibat dalam penolakan?*

J : Ya. waktu itu, warga RW 27 orang-orangnya.

T : *Ada kepentingan-kepentingan apa saja pak?*

J : Saya lihat kalo kepentingan politik sih Pak Arip Budiman caleg dari Bulan Bintang dan dia juga salah satu yang melamar jadi wakil walikota, sumber saya dari mulut ke mulut.

T : *Untuk calonnya?*

J : Bukan calonnya, pelamar untuk wakil walikota dulu dan itu salah satu tokoh agama.

T : *Tapi menurut bapak perannya besar tidak?*

J : Tapi dulu ya memang dia yang selalu angkat bicara menolak keras, ya dia.

T : *Yang lain-lain pak?*

Lampiran 8 (lanjutan)

J : Ya itu, pak RW sama Pak Najat. Dia mengikuti pembongkaran. Warga Taman Cipayung saja yang menolak keras, warga RW 01-nya tidak.

T : *RW 01 ikut ya waktu sosialisasi? Jadi indikasi tidak ada sosialisasi cukup besar ya pak?*

J : Cukup, harusnya memang. Saya kan dari LPM ya, jadi saya netral tidak mendukung pemerintah, bahkan saya juga masuk ke RW 27 nanya kenapa sih, sudah tidak usah dibangunlah itu dampaknya bahaya buat RW 27, bakal ramai karena begini-begini amdal, kalo emang mau kenapa tidak tempat lain saja?

T : *Dia juga mengusulkan tempat lain saja, dimana?*

J : Tidak, pokoknya dia nolak aja jangan di belakang rumah dia aja. Sudah, ini kan program bagus coba aja dulu, kita kan mitra kelurahan. Bahkan saya datang ke teman saya yang ketua RT ya ga mempan juga dia tetap menolak saja.

T : *Walaupun setelah dibangun itu ada sosialisasi ke mereka?*

J : Ada, Pak Wali juga sempat datang

T : *Tapi tetap menolak juga?*

J : Kalau nolak juga pembangunan berjalan juga sih, waktu itu saya tidak ikut diajak rapat, pemerintah saja bersama dinas terkait.

T : *Terkait dengan penolakan warga, peran walikota seperti apa? Apa yang diharapkan masyarakat?*

J : Dia sempat datang, saya tidak mengikuti ya, mungkin bisa ditanyakan di RW ya. Karena ketika datang saya lihat pembangunan berjalan saja tuh, lama-lama pesan asbes. Jadi saya lihat memahami, mungkin Walikota menjelaskan.

T : *Kepemimpinan walikota dalam penerapan UPS menurut bapak ini seperti apa?*

J : Sebetulnya ini juga sih, ketika demo, lah sebenarnya dia hadapi, itu warganya dia kenapa takut kenapa malah pergi, warga 27 datang ke walikota setelah datang ke DPRD, sebenarnya warga 27 itu anaknya, temui saja ketidakpuasan warga disitu, tampung saja keluhannya, harus bagaimana win-win solusinya. Sebenarnya minta duduk bareng belum pernah akhirnya sowan dari pada Walikota disitu ketika mau pemilihan caleg. Ya, itu tadi *gentle* ketika anaknya marah ketika misalnya yang satu dikasih duit yang lain tidak, kan marah. Harusnya dikasih penjelasannya hadapi jangan malah ini.

T : *Kalau lurah sendiri?*

J : Lurah yang terdahulu ya, bukan (lurah) yang ini yang terdahulu ya, ditanggapi sampai ke lokasi.

T : *Tapi ditanggapi sama warga?*

J : Ditanggapi, dia datang sama LPM ya gak ada masalah, dia menanyakan pemimpin yang tertinggi gitu.

T : *Kalau lurah, camat tidak dianggap sama warga?*

J : Ya.

Lampiran 8 (lanjutan)

T : Mereka maunya pemimpin yang tertinggi, Pak Nur, ya padahal kan ada jenjangnya, birokrasinya dan Walikota proyeknya juga dipegang oleh DKLH. Datang juga Pak Yusmanto selaku dinas juga datang kan, pokoknya semua pejabat yang terkait dengan ini datang juga ke lokasi kan? Berdialog juga dengan warga, kan?

J : Ya, tetap dia tidak mau, mereka mintanya Walikota misalnya pindah atau diteruskan gitu, sehingga dia tidak mau dengar Dinas. Dia tidak mau dengar ini.

T : Kalau peran DPRD menurut bapak bagaimana?

J : Menurut saya DPRD itu juga tidak ini.., *back up* pemerintah keliatannya... tidak terlalu, kayaknya pada ulur-ulur tangan semuanya.

T : Cuci tangan semuanya, harusnya sama-sama tanggung jawab?

J : Tanggung jawab harusnya, makanya sebenarnya ga ada. Yang saya alami ketika dia datang bersama saya demo diterima, DKLH sampai diundang tapi pihak ininya tidak ada, dinas yang ada, pihak walikota tidak ada, duduk di ruang dewan itu sehingga masih ada putusan-putusan dari warga yang demo terus dikaji anggota dewan, dibuatlah surat tembusan ke RW 27, tidak duduk bareng lagi. Walikota, lurah diundang, kek, dari pihak Walikota atau sebaliknya DPRD diundang oleh pihak Walikota, terus masyarakat. Tidak ada forum resmi yang seluruhnya hadir semua.

T : Tidak adanya forum resmi yang seluruhnya datang semua, yang terkait dengan penolakan warga, gak sampai, tidak duduk semua sama-sama...

J : Ya harusnya ada. Cuma ada waktu itu keluhan dari warga diterima oleh Dewan, Dewan buat surat, di situ tanggapannya tidak Walikota membahas surat dari Dewan, seharusnya diundanglah perwakilan misalnya 3 orang, dinas 3, DPRD 3, masyarakat 3, yang nerima yang tidak menerima. Itu tidak. Kalau ada pasti saya diikuti

T : Terus, ini kan proyek pemerintah, Pak. Bapak melihatnya sebagai warga masyarakat, kepatuhan atau daya tanggap birokrasi seperti apa dari mulai pimpinan, camat, lurah?

J : Bukan yang penting jadi, puncak pimpinan ketika ingin di bangun UPS, berkaitan dengan yang dibawah, Dinas, kecamatan semua gak ada yang bisa, wah pak sebaiknya punya duit gitu kan, beli jangan dijalur ini, gimana gitu lah, beli-beli lahan, terus dibangunlah disitu, tapi disitu sudah steril benar-benar. Itu jadi di bangun UPS di masing-masing kelurahan semua ok, mengikuti program tertinggi tapi giliran di bawah ada masalah, harusnya dia buru-buru ini mem-*backup* gitu.

T : Jadi bagaimana menurut bapak?

J : Ya itu tadi nurut gitu, karena program Pak Wali mengenai UPS, ya ngikut pimpinan.

T : Artinya dari pihak kelurahan, kecamatan tidak ada penolakan. Kalau dari warga kan ada penolakan

J : Ini tidak, tapi ada yang ditolak oleh lurah, ini kan mau dibangun lagi jalur 50 bantuan yang sudah rapat sama saya camat, saya diajak rapat, ada ini tahun 2009 atau 2010, bantuan dari bank dan langsung saya *cut* saja artinya bukannya kita tidak mendukung, ya melihat di lokasi ini sudah ada 2 ya kan, untuk pemerataan di kelurahan lain coba dikaji ulang dan di situ sebagai permukiman, kalau di situ saya lihat ada permukiman tapi dianggap itu bukan hadap-hadapan, jadi lurah bersama LPM buat surat yang isinya, tolong dilihat jalur resapan air, jalur bermain, itu kan tempat *jogging track* dan sudah ada

Lampiran 8 (lanjutan)

pembangunan UPS, lurah dengan kerendahan hati dengan segala hormat tidak menerima UPS yang dibangun di sana, dari luar dananya.

T : Sejauh yang bapak alami dijalur 50 itu alokasinya sesuai tidak sebenarnya dengan peraturan, misalnya harus 1 km dari warga atau harus apa harus apa?

J : Amdalnya sih, tapi sampah itu diolah harus dekat dengan menumpuknya sampah, kalau tidak, sekarang logikanya begini kan katakan kita ada sampah di Abadijaya, di UPS yang lagi dibangun itu masih di Taman Cipayung di situ tidak dibangun misalnya. Tapi dari situ tetap kita ambil. Pasti ketidakterimaan dari lingkungan gitu. Jadi kalau bicara amdal ya hitung-hitungan, ya melihat dari arus-arus titik kelemahan antar UPS itu memang. Jadi, sebetulnya semuanya tidak ini, tidak pada sepadan yang diinginkan karena memang di situ sudah ada sampah.



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 8

Tanggal wawancara : 10 Juni 2009

Tanya (T) : *Latar belakang warga disini itu seperti apa? Di RW ini ada beberapa KK? latar belakang seperti apa?*

Jawab (J) : RW kita itu terdiri dari 6 RT. Sedangkan jumlah KK itu sekitar 368. 368 itu saya belum hitung tetapi secara ini, kan ada yang kosong rumahnya itu. Tapi yang pasti kemarin itu yang terdaftar pada pemilihan 360 KK, di lingkungan kita. Sebenarnya lingkungan cukup kecil untuk 1 RW, yang mana kita 1 kompleks. Makanya 1 kompleks sama Cipayung ini dijadikan 1 RW yaitu RW 27.

T : *Kalau mengenai latar belakang sosial-ekonomi warganya?*

J : Kita, kalau bisa saya katagorikan untuk RW 27 itu untuk masyarakatnya golongannya menengah ke atas. Untuk lingkungnya dan hampir rata-rata 75% atau sampai 80% warganya adalah sarjana.

T : *Pendidikannya?*

J : Rata-rata sarjana S1.

T : *Pekerjaannya?*

J : Pekerjaannya kebanyakan swasta.

T : *Sekarang mengenai latar belakang pembangunan UPS awalnya seperti apa?*

J : Awalnya juga kita kurang tahu, cuma kalau saya ini pada saat itu mungkin datanya ada, bahwa pada suatu malam jam 2 saya dibangunkan oleh warga karena mereka mendengar ada bunyi-bunyi aneh di belakang kompleks kita, ternyata pada malam itu jam 2 malam itu ada penurunan batu-batu untuk pondasi. Setelah kita ketahui pondasi itu pagi. Setelah pagi ada apa ya? karena bentuk belakang kita itu seperti landai, lembah yang mengapit dengan jalan. Jalan merdeka itu di situ. Nah, itu kok tahu-tahu ada suara batu-batu, warga mengontek saya. Dari situlah awal kita ketahui bahwa disitu akan dibangun UPS, kalau disampaikan bahwa awal adanya UPS itu, karena memang kita tidak diberitahu bahwa ada UPS atau ada apalah selayaknya suatu bangunan yang begitu besar, seyogyanya itu ada report kepada lingkungan. Artinya saya jadi tidak bisa menginformasikan kepada warga, oh ini apa? saya sendiri tidak mengerti.

T : *Dari pihak berwenang tidak memberitahukan sebelumnya? Peruntukannya untuk apa?*

J : Tidak ada, justru setelah itu kita melakukan, karena kebetulan di sini kita juga ada yang kenal, kita tanyakan Pak Sutisna (Lurah) yang biar mempersingkat cerita, memang sering datang kesini, kebetulan ada temannya di sini. Kita sempat, saya ajak pengurus RT untuk mendengarkan sebenarnya fungsinya untuk apa? akhirnya disampaikan bahwa itu akan dilaksanakan UPS.

T : *Itu setelah warga meminta?*

J : Setelah warga mulai gelisah, sudah mulai langsung bikin pondasi.

Lampiran 9 (lanjutan)

T : *Setelah itu mulai penolakan UPS itu sampai dimana, RW menggalang warganya seperti apa Pak ?*

J : Itu sebenarnya kalau awalnya cenderungnya dari karena dalam hal ini RT 2 yang berhubungan langsung dengan lokasi UPS. Maka memang itu sebagian besar inisiatif dari RT 02 yang akhirnya di *support* dari lingkungan RT lain. Untuk kita bukan menolak, sebagai upaya kita menanyakan fungsi UPS ini.

T : *Upaya itu seperti apa pak? upaya untuk RW yang formal, bukan individu-individu lagi ya Pak?*

J : Tidak, tidak, dari awalnya memang kita tidak bersifat individu. Kita langsung bahwa itu diarahkan ke RW.

T : *Ada forum sendiri untuk itu?*

J : Ada akhirnya karena kita melihat bahwa ke depannya ini kayaknya masalah ini tidak sering yang kita lihat. Akhirnya dibentuk warga peduli sampah. Kalau tidak salah dibentuk tim, itu ada tim kita yang dibentuk nanti kita arahkan.

T : *Itu komponennya?*

J : Seluruh warga, komponen itu anggotanya mewakili seluruh warga RT 1 s/d 6 yang tentunya mereka mewakili bidangnya masing-masing. Disitu ada bidang hukum, bidang lingkungan, itu lengkap. Alhamdulillah memang warga saya itu pada saat itu hampir semua lini itu ada kita.

T : *Warga melakukan advokasi tidak secara pribadi, secara bersama-sama dan ini merupakan bentuk solidaritas dan komitmen bersama RW 27 sehingga tindakan-tindakan kemudian ke depan tidak bisa dikatakan individu?*

J : Oh.. tidak.

T : *Kondisi saat ini seperti apa pak?*

J : Kondisi terakhir telah terjadi negosiasi dan kesepakatan dan kalau menurut saya saling memahami antara pihak warga Taman Cipayung dengan pihak pemda.

T : *Untuk kesepahamannya?*

J : Kesepahamannya bahwa memang janji dari bapak Walikota sendiri bahwa lokasi tersebut dialihfungsikan, menjadi direlokasi, dijadikan sebagai - yang saya dengar terakhir, tapi saya belum dapat datanya, akan bahwa tempat tersebut akan dijadikan balai latihan, BLKM ya istilahnya apa sih namanya. Untuk latihan tapi tidak lepas dari fungsinya sebagai tempat latihan calon-calon proyek-proyek UPS itu pengelolaannya itu nanti akan dilatih disitu.

T : *Kepentingan-kepentingan apa saja yang terpengaruh dalam UPS ini?*

J : Itu juga salah satunya seperti mengenai itu sudah otomatis bahwa itu kita tidak bisa pungkiri bahwa lingkungan dekat dengan pasar kayak disini kan orang sudah senang. Bahwa ini memang saya pun memilih ini karena dekat dengan pasar, dekat tempat sekolah, sekarang malah ada pom bensin. Artinya itu secara ekonomis bagus. Umpamanya warga saya ingin menjual rumahnya atau apa. Tapi setelah itu memang sangat terbukti, ada tetangga saya menjual rumahnya bisa turun sampai 75juta. Pada saat proses ini dia tidak menuntut atau gimana karena memang dia fikir ya itulah,

Lampiran 9 (lanjutan)

Alhamdulillahnya memang sudah segitu. Tapi itu tadinya ya itulah buat sebagai gambaran buat yang tadinya ditawarkan 200 juta menjadi 125 juta karena infonya. Apalagi setelah kejadian-kejadian yang telah kita alami, ya itu, orang makin peka. Itu pertama. Yang kedua, kesehatan sudah jelas ya, apa pun judulnya kalau terkait dengan sampah pasti itu ada ekses-ekses yang muncul dan yang sudah kita rasakan bahwa sudah terjadi kesalahan bahwa pada awalnya kan tadi saya sampaikan bahwa warga saya itu mewakili semua lini. Sampai dari insinyur teknik semuanya itu ada disini. Mereka sudah dari jauh hari menyampaikan bahwa lokasi UPS tersebut berada di lokasi yang salah. Karena itu mereka lokasinya berada di atas PAM, dan itu kejadian 2 kali bocor dan itu tidak terjadi efek langsung tapi itu efeknya ke warga Depok timur. Kemarin di koran pun sudah di motif 9.000 warga terganggu airnya itu lewat situ. Kalau kita memang dirugikan, merembes ke tembok pembatas kita, dan itu seperti banjir dan Alhamdulillah kalau kita tidak melaporkan tidak ada ini, itu kita melaporkan sendiri bahwa itu terjadi kebocoran.

T : *Kepentingan lain ada tidak yang coba mempengaruhi ini? Dalam kasus ini? Ada kepentingan terkait politik?*

J : Kalau soal itu tidak ada, mungkin itu ekses ya timbul dari karena memang saya mendengar bahwa ini ada efek dari politik karena memang setahu saya bahwa hal ini meruncing itu, bukan meruncing kayanya, kalau meruncing bagaimana gitu. Mulai memuncak itu gencar-gencarnya mau pemilihan legislatif itu, karena prosesnya gak jauh ya dan itupun karena itu kita menjalani proses begitu saja. Makanya saya katakan bahwa kebetulan di lingkungan saya semua lini itu ada, dari unsur politik pun ada. Kalau memang itu ada pernyataan bahwa itu ada unsur politik saya katakan tidak ada.

T : *Secara RW yang resmi tidak menjadikan politik ya?*

J : Tidak ada, bersih itu karena dengan niat bersih warga kita bahwa kita *concern* terhadap mengenai sampah. Artinya kalau terjadi memang ada politik atau gimana, ekses kalau saya bilang, tapi kalau saya katakan murni ungkapan hati warga yang merasa tidak diajak urun rembuk untuk lokasi tersebut.

T : *Kalau undang-undang itu kan biasanya pemerintah berharap ada manfaat yang dihasilkan atau dampak, dengan adanya ini, sejauh ini menurut warga manfaatkah yang didapat atau malah dampak?*

J : Bisa dikatakan langsung bahwa itu dampak, kalau manfaat sampai saat ini mungkin kita katakan tidak tahu. karena memang perlu, ini juga sejarah, bahwa kita tidak ada keterkaitan dengan masalah sampah yang penumpukan sampah di belakang kompleks kita. Karena kita sudah dari awal dari kita ini tuh kita sudah melakukan upaya-upaya untuk mengeliminir pembuangan sampah, karena kita pun bersinggungan dengan pembuangan sampah kita. Artinya kita punya di belakang itu untuk tempat pembuangan sementara dan itu selalu biasanya bekerjasama dengan apa ya dari pihak kota itu, diambilnya tersendat-sendat. Jadi, kita diambilnya tidak secara kontinyu. Notabene-nya kita telah membayar administrasi secara benar. Akhirnya terfikirilah oleh warga kita bagaimana menyiasati ini supaya kita jangan selalu dengan masalah sampah. Karena kebetulan lokasi pembuangan sampah sementara itu dekat dengan warga saya juga. Artinya mereka yang sangat terganggu disitu karena dia berdampingan. Kalau Pak Eko bisa lihat sendiri dilokasinya, tapi sekarang sudah berubah 100%. Tadinya itu ada warga. Yang namanya warga ada yang begitu saja membuang sampahnya karena dia pikir wah itu tempat pembuangan sampah. Padahal itu juga adalah bagian dari *landscape* Taman Cipayung. Jadi artinya kita

Lampiran 9 (lanjutan)

sendiri sudah melakukan membuang sampah, jadi kita secara langsung tidak ada kaitannya dengan UPS itu. Yang ada cuma kita berdampingan dan itu sangat-sangat ngefek kalau melihat bentuk bangunannya pun secara konstruksionalnya itu berbahaya karena itu hanya 6 meter, kalau tidak salah.

T : *Dan itu peruntukannya bukan untuk Taman Cipayung, ya?*

J : Bukan, bukan, untuk lingkungan sekitar itu.

T : *Berarti manfaat secara langsung tidak diterima, tapi dampaknya? Kemudian dari upaya-upaya yang dikelola oleh warga, apa yang diharapkan dari pembangunan kalau pemerintah berharap terlaksana dengan baik kemudian oleh warga apa yang diinginkan?*

J : Setelah jadi bangunan atau bagaimana?

T : *Setelah kondisi sekarang.*

J : Awalnya sebenarnya dari nego-nego kita, itu adalah tidak ada bangunan, disitu adalah jalur hijau tetap difungsikan sebagai jalur hijau. Karena sebenarnya ini bukan baru ya, di tahun 2002 kita sudah mengajukan surat untuk minta memindahkan lokasi tempat pembuangan sampah. Sementara di situ itu sebelum camat yang baru sekarang itu, itu menurut jawabanya RWnya sebelum saya, jawabannya bahwa itu belum serah terima, karena kan di situ dipakai juga sebagai BTN. Kalau tidak salah ada jalur juga di jalur tengah perumnas, jadi mereka belum serah terima. Jadi nanti mereka belum ada kewenangan untuk melaksanakan. Cuma mereka sudah menanggapi bahwa kita pernah *complain* dengan lokasi sampah tersebut karena itu sampah terbuka dan liar artinya siapa pun bisa buang sampah disitu tidak ada batasan. Kalau saya lihat siapa pun, karena kan itu pas di pinggir jalan, lewat-buang.

T : *Kalau bapak pengaruhnya ada tidak? Pengaruh lokasi pengambilan kebijakan ini kan kebijakan ini yang menentukan lokasinya lurah ya pak? Artinya di lingkup kelurahan Abadijaya diputuskannya lokasinya disini itu lebih terpengaruh atau ketimbang yang memutuskan Walikota menetapkan lokasi ini?*

J : Sekarang pengaruh masalah itu kan timbul karena tidak ada komunikasi. Artinya kalau ada komunikasi tidak mungkin dong, pasti otomatis saat itu juga kalau kita umpamanya ada komunikasi dulu, logikanya memang standarnya seharusnya memang begitu standar untuk melakukan. Sekarang begini saja, kita bicara bahwa ada kita kayak sekarang membangun rumah, ya kan ada suratnya untuk izin tetangga. Itu aja sederhananya. Warga saya juga berfikir sederhana, kesannya yang timbul saya yang lalai atau bagaimana, jangan –jangan RW-nya yang lalai atau bagaimana. Itu yang timbul, tanda tanya itu yang saya rasakan, kok tidak ngerti sih proyek besar begitu.

T : *Memang pada awalnya tidak disosialisasikan dan memang tidak di lokasi dalam komplek sebenarnya ya?*

J : Apanya?

T : *UPS-nya?*

J : Iya.

T : *Setelah administrasi itu, daerah itu lokasi?*

J : Punya siapa? Wilayah siapa? Itu wilayahnya RW 1 kalau tidak salah

Lampiran 9 (lanjutan)

T : *Mungkin itu yang disampaikan oleh wilayah RW 1?*

J : Dan memang sudah diakui dari tim KLH daerah Dinas Kebersihan itu memang mereka sempat mereka berfikir kita sudah di ajak ngomong. Jadi ini sebenarnya begini, kembali lagi di atas, saya ini kan lurah, kelurahan difikirkan kalau menurut saja Dinas Kebersihan itu menanyakan ini. Saya mau memberikan sosialisasi, tolong panggil lingkungan itu, mereka sudah melakukan itu. Tapi yang saya sayangkan, di situ tidak ada RW 27. Ternyata itu pun setelah kita investigasi ternyata dia bilang bukannya bapak sudah datang sudah setuju? Dan saya tidak pernah. Itulah timbulnya pertanyaan-pertanyaan besar warga terhadap saya sejauh mana.

T : *Berarti memang saat itu tidak ada warga atau?*

J : Tidak ada.

T : *Nah, ini kan terkait dengan pelaksanaan program, berarti terkait dengan orang pak RW melihat bagaimana kepemimpinan para pelaksana program ini dari mulai pemda. Artinya Perda ini dibuat oleh Walikota. Bagaimana peran walikota seharusnya, DPRD seharusnya seperti apa?*

J : Kalau peran DPRD sejauh ini kalau waktu pada saat kita kan sampai demo, ya kita sudah demo di dua tempat tersebut, di DPRD, yang terakhir ke Walikota. Dari situ mereka memperlihatkan sikap yang responsif. Artinya bisa memahami dengan melihat ke lokasi. Tapi kalau kita bukan saya ini ya saya juga karena disini kan juga ada orang – orang pemerintah juga. Kita sampaikan bahwa sebuah proyek akan jalan itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan DPRD. Gitu aja sebenarnya sederhananya. Gak mungkin mereka *blank*, tahu-tahu ada sebuah proyek. Artinya mereka juga menyetujui itu semua. Nah, itu yang sedang kita minta perhatian mereka, bahwa itu sebaiknya ditinjau ulang segala macam, dan nyatanya sejauh ini belum ada reaksi. Justru reaksi itu timbul setelah kita berinteraksi dengan Walikota langsung.

T : *Peran Walikota langsung seperti apa pak?*

J : Cukup responsif dan cukup tanggap dengan kondisi ini meskipun beliau juga menyatakan bahwa ini program dari pemda, melaksanakan UPS dan mungkin akan terus bertambah. Memang kita sebagai warga, saya sebagai ketua RW memang kita sangat *men-support* program beliau. Karena memang sampah itu masalah. Dimanapun, sampah itu sangat dan tidak akan habis-habis. Dan mungkin satu cara mengeliminir ini beliau mendirikan program UPS. Cuma itulah, kita juga orang-orang dari yang disini. Saya juga punya warga di lingkungan hidup itu paham sekali fungsinya ini segala macam. Cuma masalahnya sederhana, kenapa lokasinya disini? Padahal banyak lokasi lain yang logis. Jadi begini, sedikit banyak sebenarnya kenapa pada saat waktu pertemuan dengan lingkungan yang berkepentingan langsung dengan sampah ini, mengapa mereka tidak menyarankan lokasi mereka? Itu kan sebuah ini ya, mereka menyadari sekali bahwa sampah itu seyogyanya sangat dihindari. Padahal banyak dan pada akhirnya ada lokasi yang memang layak untuk ini, itu lho yang jadi pertanyaan buat kita.

T : *Kalau peran DKP sendiri? Dinas Kebersihan dan Lingkungan?*

J : Wah benar-benar mereka itu kalau saya itu, bukannya saya ini ya, mereka sangat tidak kooperatif.

Lampiran 9 (lanjutan)

T : *Kepala Dinas?*

J : Semuanya.

T : *Yang terlibat siapa saja pak?*

J : Kepalanya, semua, terus bidang ini mungkin Pak Fargob yang bersinggungan langsung dengan mereka. Tapi saya melihatnya memang, sayangnya kalau saya sebagai pimpinan, caranya salah sekali gitu untuk meng-*counter*-nya, mungkin gayanya begitu ya.

T : *Seperti apa pak?*

J : Menganggap bahwa itu seperti itu, kamu terima saja. Itu menurut saya salah besar untuk kondisi yang sekarang ini. Politik sekarang ini tidak layak, jaman dulu banget. Memaksakan itu yang menimbulkan semangat warga saya untuk bertahan. Mereka itu tidak memberikan solusi dan malah seperti menimbulkan suatu pertentangan. Itulah maknanya sampai bertentangan dengan pemda. Saya kembali lagi ke depan, bahwa sebenarnya itu hanya miskomunikasi. Sebenarnya kembali lagi dalam hal ini Pak Walikota sebagai penentu. Beliau oke saja, artinya di sinilah yang saya pikir cerita dulu ABS itu, memang sampai detik ini masih berjalan.

T : *Padahal ketika di konfirmasi ke pimpinan petinginya, bisa mendengar? bisa menerima?*

J : Dan beliau itu menyangka proyek sudah *full*.

T : *Sudah tidak ada masalah?*

J : Sudah tidak ada masalah. Artinya kalau saya tangkap, ini sudah jadi dan kita meradang. Proyek sudah jadi, padahal beliau sendiri melihat di lokasi - langsung *on the spot* bahwa baru pondasi-pondasi saja. Dan salah satu juga cara mereka membangun itu kayak mafia, kucing-kucingan. Pertama tidak ada papan namanya. Pas kita demo, baru dimunculkan detailnya begitulah.

T : *Kalau camat disini berperan tidak?*

J : Kurang ya saya bilang ,dan memang tidak tersentuh, camat dan lurah tidak tersentuh nah ini dia mungkin.

T : *Seharusnya yang pimpinan level terendah itu yang melakukan pendekatan kepada masyarakat ya?*

J : Mediasi atau gimana ya. Kalau saya lihat justru mereka itu ikut saja. Karena memang *case* ini kalau saya lihat ini, kita tuh sebenarnya memang ngikutin levelnya. Tapi kalau secara nonformal kita itu banyak yang kita langsung, kayak kita tidak bertemu langsung dengan pak lurah, langsung dengan apa namanya? ada warga saya juga bisa mempertemukan dengan Walikota gak seperti ini.

T : *Berarti jalur-jalur informal justru malah digunakan lebih efektif?*

J : Lebih efektif, betul.

Lampiran 9 (lanjutan)

T : *Berarti ada kemajuan di jalur informal birokrasi ya pak?*

J : Betul, itu kelihatan sekali itu saya lihat nyata sekali dan itulah yang saya juga sering kalau tidak menyalahkan, bahwa kondisi kadang-kadang warga mau ikut formal tapi malah sering mendapatkan kesulitan, ternyata beginilah.

T : *Berarti lurah yang kemarin tidak memediasi dengan Walikota? atau keluhan warga dimediasi karena tidak bisa dijawab oleh lurah, dimediasi ke level yang lebih tinggi?*

J : Sejauh ini saya gak ada artinya. Cuma sekali waktu ini pertemuan dan itu. Cuma itu aja.

T : *Jadi semacam pertemuan dengan Pak Wali itu di mediasi sendiri, tidak dengan mediasi pemerintah?*

J : Gak ada.

T : *Baik, kalau LPM sendiri pak sebagai wakil masyarakat lembaga pemberdayaan masyarakat pernah melibatkan RW? Karena kan secara resmi kan mereka...*

J : Dan itu juga memang mereka seharusnya tahu, ya LPM mengenai pembangunannya. Itu tidak ada.

T : *LPM itu kan di ambil dari RW-RW lalu dipilih?*

J : Ya itu pak, jadi kita itu sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya harusnya yang lebih dekat kepada kita, yaitu yang terlibat. Itu kan LPM, lurah, camat, itu yang seharusnya lebih intens ya untuk mengadakan mediasi. Karena kalau saya lihat ini kalau kita mundur ke belakang tuh sudah banyak kerusakan mental, prilaku sampai kalau ada remaja saya yang ditahan, itu kalau menurut saya. Untungnya lagi saya punya warga yang psikiater bisa memberikan ini langsung terhadap mereka. Memang saya melihat sendiri di lapangan betapa *shock*-nya mereka menghadapi kenyataan kalau mereka harus dihukum, dengan tanda ini, ya garis bawah mereka melakukan. Menurut mereka tuh membela haknya dia.

T : *Jadi sempat ditahan ya beberapa hari?*

J : 2 Hari.

T : *Tahanan Polsek ya?*

J : Di Polres bukan di Polsek.

T : *Berapa orang?*

J : 6 orang termasuk di situ ada anak SD-nya satu.

T : *Jadi atas desakan warga dilepaskan?*

J : Ya Alhamdulillah itu setelah kerjasama.

T : *Terakhir tidak ada proses hukum kan?*

J : Sejauh ini tidak ada.

T : *Terkait dengan sumber daya yang dikerahkan dalam pembangunan UPS seperti sumber daya dari RW yang dilibatkan?*

J : Tidak ada.

Lampiran 9 (lanjutan)

T : *Sekarang kita bicara dengan konteks kebijakan. Jadi seperti apa hubungan-hubungan antar pelaksana program dengan masyarakat itu seperti apa?*

J : Tidak ada

T : *Baik dari DKP, lurah, penyelenggara proyek?*

J : Apalagi kita, malah mencari mereka.

T : *Sampai saat ini misalnya, kontraktor tidak pernah berhubungan dengan pelaksana?*

J : Ini tidak pernah bertemu yang kontraktornya mana, yang ini gak jelas, kami pernah di sini kan, dipertemukan menurut versinya dan warga saya kurang yakin, itu siapa sebenarnya? itu konsultan yang menyatakan bahwa itu *safe*.

T : *Berarti keterlibatan warga dalam pembangunan ini praktis tidak ada?*

J : Tidak ada.

T : *Kemudian mengenai keterlibatan dalam upaya penolakan UPS itu siapa saja pak yang terlibat?*

J : Seluruh komponen warga.

T : *Mereka punya peran tugas?*

J : Oh iya, itu terjadi begitu saja.

T : *Itu kalau tidak salah ada dua kali Walikota dulu ya pak?*

J : Ke ini dulu, ke pemda.

T : *Ke DKP?*

J : Gak, ke DPRD.

T : *DPRD? apa yang disampaikan?*

J : Ya sejauh itu kita ditanggapi, kan kita memberikan berkas.

T : *Dengar pendapat?*

J : Dengar pendapat.

T : *Kemudian cara yang dipilih untuk menolak keberadaan lokasi diberdirikan UPS? Cara yang dipilih?*

J : Bagaimana pak?

T : *Cara yang dipilih memang secara sadar, dipilih untuk bersama-sama warga ke DPRD, DPD, ke Walikota, secara sadar memang diarahkan kesana?*

J : Itu kesepakatan gimana, nih? demo aja, demo.... Demo gitu kan, warganya. Dan memang saya tidak tahu prosedurnya. makanya saya bilang ada warga yang kebetulan pemerintahan yang tahu prosedur-prosedurnya. Oh ini sebaiknya kita kesini-kesini, kita langsung demo dengan itu. Ya, awalnya sebenarnya demo-demo kecil kita di lokasi langsung tidak ada tanggapan dan malah tanggappannya dari Dinas itu dibuat spanduk baru juga, jadi perang spanduk kayaknya kesannya.

T : *Awalnya dipasang spanduk itu?*

Lampiran 9 (lanjutan)

J : Pasang spanduk, banyak dokumentasinya ada kok kalau bapak lihat, dan jawabannya juga ada.

T : *Jadi sepertinya yang terlibat penolakan itu hampir semua warga ya?*

J : Hampir semua kayaknya.

T : *Sampai bapak-bapak sampai anak kecil kemarin kan?*

J : Itu dia, makanya saya, bahwa kesan yang timbul kemarin kita mengorbankan itu perlu saya inikan juga ya. Inikan dulu kesannya yang timbul waktu itu di media kita menggunakan akan-anak untuk demo. Padahal itu inisiatif mereka untuk ikut, dan terus terang pada saat kejadian itu saya... aduh... itu memang sangat disayangkan. Saya sampai sekarang pun masih menyesal kenapa sebenarnya kita tidak niat untuk demo, justru hari itu karena kan kita kalau demo itu kita lapor ya ke Polsek. Karena itu prosedur, tiga hari sebelum melakukan aktivitas kita lapor. Hari itu rencananya cuma ingin lihat lokasi. Tapi karena kita tidak diperhatikan, mungkin gak tahu inisiatif siapa, anak-anak spontan langsung merobohkan. Itu saja, gak ada unsur, saya berani jamin bahwa saya gak ada, gak ada kita begini-begini, besoknya langsung spontan.

T : *Sekarang lebih dalam secara kritis lembaga atau badan-badan yang melaksanakan UPS ini seperti apa? Dan juga kepemimpinannya bapak lihat Walikota dengan Pak Nurnya dalam kasus UPS ini seperti apa? Yang seharusnya seperti apa? Yang dilaksanakan seperti apa? Dewan juga harus seperti apa dalam keinginan warga, ya sehingga tercapai keinginan warga sampai Dinas itu lembaganya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, camat lurah sehingga tidak sampai...*

J : Seharusnya tidak begini sebenarnya mudah itu

T : *Efektif lembaga badan pelaksana?*

J : Itu menurut saya, sebenarnya hari ini gak kalau sejauh ada komunikasi dan menghormati masing-masing hak dan kewajiban tidak masalah.

T : Berarti ada masalah?

J : Jelas, dan kalau saya lihat ada itikad-itikad mau... mungkin kesalahan ini mereka sendiri mereka sadari, letakkannya segala macam dengan awal yang sudah saya sampaikan bahwa mereka melakukan itu tengah malam, tidak ada pemberitahuan sebenarnya sudah kebaca disitu ketidak jelasan kontraktornya. Itu saja sebenarnya, dari situ sudah kelihatan dan sejauh mana lurah mengantisipasi camatnya. Mereka sejauh ini hanya sebagai pasiennya, menerima laporan ya sudah nanti saya akan teruskan, itu kan standar banget.

T : *Sehingga lurah tidak menjadi PR (public relation) yang baik. Misalnya dari pemerintah. Seharusnya kalau terbawa menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Mulai dari Dinas Kebersihan sampai lurah, mereka dibebani tugas harus dijalankan kebijakan ini. Sejauh mana menurut bapak tingkat kepatuhannya dan daya tanggap mereka terhadap ini?*

J : Kepatuhannya luar biasa menjalankan artinya sampai tidak meng-ini-kan norma-norma kalau buat saya.

T : *Daya tanggapnya?*

Lampiran 9 (lanjutan)

J : Tanggap dari kita, itu kurang sekali. Bertolak belakang, artinya itu adalah inisiatif kami mencari upaya untuk menyelesaikan masalah ini.

T : *Jadi, pemerintah sendiri selaku pelaksana program pembangunan UPS seperti apa agar mereka berkepentingan untuk program ini? sudah dianggarkan, mau tidak mau harus jadi, karena ini akan menjadi ukuran indikator keberhasilan program mereka. Sedangkan di sisi lain ini ditinjau ulang. Ini kan ada dua kepentingan yang bertolak belakang. Upaya-upaya pemerintah untuk mendekati dengan masyarakat agar program ini disetujui atau masyarakat juga ada seperti apa ini?*

J : Sosialisasi, itu paling gampang. Sebenarnya itu sederhana. Itu di level paling bawah RT saya pun kalau saya bilang sederhana. Kalau saya ambil contoh, saya mau menaikan iuran bulanan, itu saya harus sosialisasikan ke RT-RT saya. Kalau gak, warga datang ke rumah saya, apa-apaan ini? itu prosedur? ini yang tingkat level yang paling rendah istilahnya RT/RW itu apa? kalau secara pemerintahan itu struktur yang paling rendah, kan? Artinya kami saja sudah menaikan 10.000 yang setelah berapa tahun. Contoh saja, kita tidak menaikan iuran sedangkan kita harus membayar satpam. Itu dengan mendadak

begitu, otomatis besar gak?. Dua ribu atau langsung sepuluh ribu. Itu kalau tidak dengan sebuah solusi yang baik antara warga dan hubungan yang baik antara pengurus, tidak mungkin warga menerimanya.

T : *Prosedur-prosedur itu tidak dijalankan?*

J : Tidak jalan, saya bilang itu. hal itulah saya bilang tidak tahu, simpulkanlah sendiri kalau saya bilang. Kalau mereka..., jadi kayak ada keyakinan bahwa kalau saya ajak ngobrol pasti di tolak. Artinya, jadi timbul begini, ini coba masukan saja, timbul bahwa proyek ini adalah proyek yang sebenarnya ee..dipaksakan. Padahal kalau kita lihat ini proyek-proyek yang sangat baik. makanya kami ini seluruh warga Cipayang sangat mendukung karena kita pun melakukan proses itu.

T : *Artinya level RW itu buat level kelurahan, pola pengolahan sampahnya karena memang warga sudah mengelola sendiri dan mandiri untuk lingkungan sendiri. Sekarang level RW-RW yang lain?*

J : Harapan saya, seharusnya RW-RW yang lain contoh model kita seperti ini, kita bikin kompos gak harus begitu. Mereka kan alasannya banyak keterbatasan lahan segalanya, akhirnya pakai lahan yang dekat kita. Saya dapat menjauhkan, saya sebenarnya ketawa juga waktu saya tanya ke RW 01,... “Bapak berpikir tidak? Itu kan tanah saya, waduh itu kan bicara panjang.” Saya bilang saya bangun tanah saya, tapi jauhkan dari bapak. Karena itu sepi kalau buat mereka. Karena dipisahkan oleh jalan jalur hijau dan kalau kita pas banget deh.

T : *Jadi tepat ya kalau saya bilang ada semacam ego-ego, ini tanah saya untuk dijadikan, tempat bapak atau saya lurah itu kewajibannya menentukan ini. Persoalan yang lain tidak setuju bukan masalah saya, jadi saya tanggap kuat itu pak?*

J : Memang sangat kuat. Semua itu merasa jadi ini punya saya, bidang saya, jadi tidak usah. Artinya makin kelihatan bahwa warga adalah korban. Kita bukan.., Katanya ini buat warga, tapi kita jadi korban. Sebenarnya tidak usah terjadi itu. Ini nih, kesalahan yang di bawah ini kadang-kadang.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 9

Tanggal wawancara : 7 Juni 2009

Tanya (T) : *Latar belakang warga masyarakat Taman Cipayung ?*

Jawab (J) : Kalau di Depok, RW 27 cukup plural. Ada akademisi, pedagang Pasar Agung, ada sementara 80% tetap, 20% kontraktor (mengontrak rumah). Perumahan ini berdiri tahun 92-an (7 tahun ke belakang)

T : *Latar belakang pembangunan UPS?*

J : Informasi dari warga, lurah menganggap tempat pembuangan sampah sementara agar sampah tidak bau. Karena selama ini, komplain warga itu karena bau, dari rumah saya 500m tercium bau sampah. Awalnya warga menolak adanya TPS yang ada yang awalnya liar dan entah mengapa jadi legal.

T : *Perihal pembangunan UPS sendiri tahu tidak?*

J : Warga tidak pernah dilibatkan secara langsung dari awal, terkait diskusi dari awal itu tidak pernah dilibatkan, camatpun mengakui tidak pernah melibatkan masyarakat, sampai lurahnya pun diganti oleh Walikota

T : *Kronologis penolakan warga terhadap pembangunan UPS, tahun 2008 ada berapa kali?*

J : Pertama warga kaget mau dibangun apa, lalu warga mencari tahu dengan RW dan diketahui akan dibangun UPS.

T : *RW sudah diberitahu?*

J : Belum diberitahu, ketika dibangun baru warga heboh.

T : *Pembangunan sudah berapa persen?*

J : Itu baru, ketika pemerataan lahan, lahan itu kan agak berbukit, karena konturnya becek karena ada sampah, dan ketika hujan pun air agak tergenang disana, ketika pembersihan ada bedeng ada spanduk akan dibangun UPS, lalu warga komplain ke RW lalu RW lapor ke kelurahan. Itu terjadi awal-awal 2008, prosesnya tidak terlalu lama lalu warga berunjuk rasa mencari klarifikasi ke pemerintah daerah, namun tidak direspon dengan baik. Warga kecewa tidak diberi kesempatan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Walikota, warga hanya ditemui oleh camat, sama waktu itu kabidnya bpk Yusmanto. Lalu warga demo kembali dan pemerintah daerah juga tidak menemui dengan alasan pembangunan itu adalah bagian dari rencana kerja pemerintah daerah dan warga harus mengikuti. Padahal yang namanya di aturan warga juga lebih mengerti, artinya harus ada persetujuan dari warga, kita saja kalau mau membuat IMB saja pemerintah harus lihat ke kiri kanan, apalagi ini unit pengolahan sampah yang dampaknya cukup besar buat masyarakat, intinya pemerintah juga harus mendengar warga lah.

T : *Sudah berapa kali aksi?*

J : Kalo tidak salah 2 kali.

T : *Yang terakhir, perobohan itu ya?*

Lampiran 10 (lanjutan)

J : Ya, sebenarnya bukan aksi, warga kumpul-kumpul karena tidak ada respon lagi, ke-3 kalau tidak salah, di sana banyak anak-anak, lalu terprovokasi, kumpul-kumpul ingin rapat, biasanya kita rapat di samping masjid.

T : *Kondisi saat ini?*

J : Saat ini kita *cooling down* dalam artian berupaya konsolidasi dan dalam hal ini RW ingin bernegosiasi dengan pemerintah daerah, kemarin Pak Nur kita datangkan kesini bertemu warga dan warga pun sudah datang kerumah Pak Nur, sudah 2 kali dan Pak Nur berjanji bahwa bangunan tersebut bukan lagi diperuntukkan untuk UPS/tidak akan direalisasikan, dan diganti menjadi kegiatan pelatihan, awalnya memang, tadinya mau tukar guling kata Pak Nur, namun karena harganya untuk membangun UPS yg baru, namun ini kan persoalannya berbeda dengan di Cinere. Di Cinere pengelolanya sudah tidak ada, jadi mungkin warga berat harus membangun satu lingkungan sampah dengan harga 600 juta-an dan warga tidak sanggup. Akhirnya solusi terbaiknya adalah bangunan tetap dilanjutkan tapi bukan diperuntukkan UPS.

T : *Kepentingan-kepentingan warga apa sajakah yang dipengaruhi oleh pembangunan UPS?*

J : Ini dilematisnya, latar belakang kenapa dampak kasus ini mencuat karena ada juga dari salah satu partai yang ingin suaranya didengar oleh masyarakat, caleg yang melakukan cukup keras ini terjadi sebelum pemilu, juga ada dari salah satu pengurus partai yang lain yang melakukan *black campaign*, terlepas dari persoalan yang secara prosedural pemerintah kami anggap salah, karena tidak mendengarkan masyarakat.

T : *Selain ada kepentingan politis, prosedural, dan masyarakat merasa terganggu dengan bau?*

J : Kalau dari teman-teman ya karena gak ada UPS saja, baunya sampai saat ini, apalagi warga yang rumahnya tepat di belakangnya itu. Kalau pagi saat buka jendela itu suara lalat seperti lalat tempur. Nah dikhawatirkan ke depan seperti itu, yang ketiga, mesin, dengan kapasitas besar, dikhawatirkan mengganggu ketenangan masyarakat.

T : *Jadi masyarakat menganggap dengan adanya UPS tidak ada yang menguntungkan? Dengan di banggunya UPS apa harapan masyarakat?*

J : Secara normatif, masyarakat Taman Cipayung mendukung program pengelolaan sampah secara sistemik. Namun yang menjadi masalah, masyarakat tidak dilibatkan. Yang kedua, posisi UPS itu berdekatan dengan lingkungan. Ini sebenarnya yang dikeluhkan masyarakat. Kalau saja UPS ini lebih jauh dari lingkungan warga, saya pikir teman-teman dan warga disini juga tidak menolak, bayangkan saja lokasi UPS dengan rumah warga 6 meter. Walaupun sekarang sudah digeser jadi 12 m, namun tetap saja.

T : *Warga sudah diberitahu belum, UPS yang akan dibangun itu seperti apa? manfaatnya apa?*

J : Sebelumnya belum, ketika terjadi, baru warga diajak kesana-kesana-kesana.

T : *Respon warga?*

J : Bagus, bagus tapi sekali lagi ketika dibangun di lokasi yang salah. Jadi tidak tepat.

T : *Artinya dapat dibedakan TPS dengan UPS?*

Lampiran 10 (lanjutan)

J : Cukup cerdas ya, bahkan ada dari departemen lingkungan menolak juga.

T : *Berarti letak/lokasi pengambilan kebijakannya yang kurang tepat. Para pelaksana implementasi pengelola sampah, seperti apa kira-kira kepemimpinannya, mulai dari turunnya perda, imb, adanya program, kegiatan, proyek lalu dilanjutkan operasional. Bahkan sampai pada tahap proyek itu terjadi resistensi penolakan warga, urutannya itu seperti apa, mulai dari perda tidak ada masalah, lalu sampai pada proyek itu baru?*

J : Sebetulnya ketika ini sudah dijadikan suatu program kerja tahunan oleh anggota dewan sepertinya mulus-mulus saja. Artinya *clear* lah, cuma memang kembali pada perasaan yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Saya pikir ini kurang, jadi dari camat minta pada lurah mana titik-titik TPS yang bisa digunakan. Bisa jadi peran serta masyarakat punya lahan yang diberikan untuk dijadikan UPS, kalau saja lurah mau berdialog, terus sosialisasi terkait program pemerintah, hasilnya pasti beda. Yang pasti dapat dukungan dari masyarakat.

T : *Berarti peran lurah kurang optimal sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kalau terhadap konsultan atau kontarktor proyek itu ada kaitannya tidak?*

J : Ya, warga tidak menuntut secara langsung walaupun secara etika kontarktor/konsultan harusnya berdialog dengan warga agar tidak terjadi hal-hal yg tidak diinginkan, harusnya dia silaturahmi dong ke RW, selama ini tidak ada.

T : *Ketika ada pengrusakan bangunan pun, merugikan mereka. Yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek ini menurut bapak, siapa?*

J : Pemerintah ya, Walikota walaupun mengatakan sudah dilimpahkan kepada Dinas, lalu kepada camat, camat ke lurah, akhirnya kalau kita cari siapa yang salah gak ada nama, tapi secara pemerintahan struktur birokrasi maka pemimpinlah yang kita salahkan.

T : *Peran apa yang harus dilaksanakn oleh walikota, dinas, camat, lurah sampai proyek, meraka harus meletakkan diri seperti apa?*

J : Dalam kacamata warga, seharusnya, alibi dari walikota dalam hal ini, “kok saya tidak tahu menahu, karena hal ini sudah diserahkan kedinas, camat dan lurah”. Seharusnya ketika lurah berperan dalam mencari lokasi itu, lurah lapor ke camat, seharusnya camat meyakinkan dulu, survei dulu apakah tempat, temui warga secara ulang, apakah warga menerima, oke *clear*, lalu kepala dinas dalam hal ini DKP, DKP pun harus melakukan ulang baik secara administratif maupun keterlibatan masyarakat, barulah nanti berita itu 80-90% *fix* sebelum sampai pembangunan, baru diterima oleh Walikota. Walikotapun seharusnya cek ulang, inikan standar kerja yang harus dilakukan berulang ulang dan pemerintah dalam hal in lebih jago dari kita karena birokrasi panjang. Ada namanya nota dinas yang harus dipelajari oleh pemerintah, oh *clear* semua, ya itu secara administratif, tapi secara lapangan? masa sih Walikota gak mau datang ke lokasi? toh nanti kalau terjadi apa-apa akan berdampak pada dia.

T : *Hal tersebut tidak dilaksanakan? baik secara administratif maupun lapangan tidak dilakukan?*

J : Tidak dilaksanakan, Walikota pun sampai detik terakhir tidak mau mengunjungi. Ketika selesai ada negosiasi yang difasilitasi saya secara internal, baru mau mengunjungi lokasi.

Lampiran 10 (lanjutan)

T : *Pemimpin yang selama ini ketika ada resistensi, turun secara langsung siapa?*

J : Ya, hanya Kabid Yusmanto, dan warga tidak mau karena dia bukan *decision maker*, camat juga begitu, hilang-hilangan, yang sering hadir ya itu Kabid Yusmanto. Lurah tidak bertanggungjawab diajak rapatn ada alasan ini-itu, takut ditentang warga. Ya akhirnya Pak Yusmanto dan warga tidak mau bertemu bukan karena keterlibatan nasional, tapi karena tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Akhirnya tetap meminta Walikota memberikan keputusan dan akhirnya Walikota menjanjikan akan alih fungsi itu akan diperuntukkan Diklat.

T : *Adakah sumber daya masyarakat yang dikerahkan dari pembangunan UPS ini?*

J : Tidak ada.

T : *Menurut bapak, bagaimana pemerintah mengelola sumber dayanya (lahan pemerintah), apakah pemerintah berhak mengelolanya 100 %, terserah masyarakat menerima atau tidak, bagaimana?*

J : Ya melihat kejadian sekarang, kesannya pemerintah otoriter. Akhirnya pemerintah berhak menggunakan 100 % walaupun warga menolak. Padahal pemerintah yang baik, walaupun itu rumah dia, milik dia, tapi kan ada lingkungan tetangga yang bisa di ajak ngobrol/diskusi.

T : *Konteks kebijakan terkait dengan relasi kekuasaan, kepentingan, aktor yang terlibat. Siapa pelaksana program yang berhubungan langsung dengan masyarakat?*

J : Pak Yus ya, yang lain gak, lurah, camat itu minim. Dia hanya sekali mempertemukan lalu kabur. Warga menolak, dia angkat tangan.

T : *Peran lurah?*

J : Harusnya dia dapat memediasi.

T : *Camat?*

J : Sama, dia harus memediasi agar upaya ini berjalan dengan baik. Warga tidak dirugikan.

T : *Karena diimplementasikan di wilayahnya ya?*

J : Betul.

T : *Warga yang terlibat dalam penolakan UPS ini siapa? perannya apa?*

J : Ya disini berjalan cukup baik. Berjalan secara formal, RW dan DKM. Memang ada sebagian kecil warga yang tidak ikut-ikutan bisa dihitung lah. Pertama mereka kerja di pemda. Ada juga karena berdekatan dengan pemerintah. Akhirnya tidak ikut, tapi secara hubungan sosial dia ikut. Untuk membubuhi tandatangan misalnya, atau turun ke lapangan tidak ikut. Contoh, saya untuk turun ke lapangan saya agak berat, karena kedekatan saya dengan pemerintah. Tapi secara hati nurani, secara kewargaan saya menolak.

T : *Pernah ada beberapa pertemuan warga khusus untuk membahas ini?*

J : Kita rutin rapat bertemu, bahkan sampai saat ini masih terus berupaya agar bangunan itu tidak diperuntukan UPS.

Lampiran 10 (lanjutan)

T : *Ada berapa warga yang mendukung dan tidak?*

J : Sekitar 75 %, Kita itu disini ada 400KK. Aduh, gak hapal, nanti bisa ke RW, bisa dihitung kok, tapi yang pasti di RT 05 saja ada 400 kk.

T : *Menurut bapak, karekteristik lembaga pelaksana kebijakan harusnya seperti apa, yang terlibat dalam pembangunan ini seperti apa?*

J : Seharusnya ada panitia khusus, saya gak tahu apakah ada panitia khusus, yang saya tahu, adanya panitia tender. Ya orang-orangnya merakyatlah, melayani dan mensejahterakanlah.

T : *Koordinator UPS-nya disini dari warga?*

J : Tidak dari warga, dari mereka sendiri, kita gak ada yang terlibat karena kita menolak.

T : *Perihal tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan UPS, bagaimana dulu dan sekarang? Bagaimana warga ini juga memiliki kepatuhan dan daya tanggap juga, supaya kebijakan itu berjalan dengan baik perlu ketanggapan dari pelaksana program di lapangan, lurah, camat. Kalau dia tidak yakin dengan tugas ini maka tidak optimal. Nah, tanggapan lurah sendiri bagaimana terhadap hal ini?*

J : Kalau saya lihat begini, lurah setengah hati menjalankan program yang dituangkan atau dibebankan kepada mereka. Kenapa setengah hati? Ya itu tadi, dia tidak melaksanakan dengan *full* untuk mensosialisasikan program ini. Harusnya kan ada pertemuan bulanan di RW, pertemuan bulanan itu harusnya dimanfaatkan oleh lurah untuk mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan. Nah, dari situ kan dia sudah dapat melihat, merespon, sebenarnya tanggapan dari masyarakat itu seperti apa? dan dia bisa mengambil sikap, “oh itu buruk, dia mengambil sikap yg lain”, “wah ini bagus”, sikapnya diambil. Hal-hal in saya lihat tidak ada, walaupun ada seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Belum di kecamatan. Kalau tidak salah ada 2 mingguan sekali, lurah bisa melaporkan. Oh. begini, begini, begini.

T : *Dari mereka yang paling bawah, apakah mereka setuju, camat tidak bermasalah terhadap UPS ini? dia setuju? Daya tanggapnya bagaimana? kalau dia tanggap maka dia akan mensosialisasikan, begitu juga lurah, kalau dia setuju dengan program pemerintah maka dia akan mensosialisasikan pada masyarakat, usaha-usaha sosialisasi ke masyarakat?*

J : Ya lurah dan camat setuju, namun usaha-usaha sosialisasi tidak ada, sampai terakhir ketika Pak Nur datang kesini, datang bersama Pak camat dan Pak lurah. Pak camat ditunjuk hidungnya oleh warga terkait tidak adanya sosialisasi. Ya dia diam saja, karena dia merasa bersalah tidak pernah mensosialisasikan terkait UPS.

T : *Jadi belum pernah ada sosialisasi dari camat, lurah, DKP?*

J : Tidak ada.

T : *Sampai sekarang jadi masyarakat belum tahu secara jernih duduk permasalahannya persisnya seperti apa?*

J : Tidak ada.

T : *Penjelasan tentang dampak, manfaat buat masyarakat?*

Lampiran 10 (lanjutan)

J : Itu dilakukan setelah kejadian ini, kejadian bermasalah. Warga memprotes, baru dilakukan sosialisasi. Ya sudah gak efektif, warga sudah terlanjur sakit hati

T : *Walaupun pada akhirnya warga memahami esensi pembangunan UPS?*

J : Ya, namun tetap menolak. Jadi, tidak ada rasa memiliki, ya masih berunding.



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 10

Tanggal wawancara : 19 Juni 2009

Tanya (T) : *Bisa cerita dulu Pak? UPS ini dulu seperti apa perjalanannya? Mulai dari pembangunannya, awal. Terus akhirnya jadi di sini, akhirnya demo, kemudian, jalan.*

Jawab (J) : Yang pertama mengenai adanya program UPS. Ini lokasi Kampung Sasak. Sehubungan kalau bicara program awal mungkin saya...mungkin koordinasi Pak lurah dan Pak camat. Jadi hanya saja saya terus dipanggil ke Pak lurah, bahwa adanya UPS di Kampung Sasak. Dan saya tanya, lokasinya di mana? Di kebun Haji Sahir. Nah bicara itu ngontrak maupun tidak ngontrak, saya tidak menanyakan seperti itu. Yang saya tahu ya. Tolong dibantu. Dan saya dikasih surat sama Pak lurah untuk pembangunan UPS ini yang berdekatan warga. Tanpa persetujuan. Karena saya punya RT, saya serahkan kepada RT. "RT, ini ada UPS. Dan bukan pembuangan, pengelolaan". Pembuangan sama pengelolaan, lain. Kalau pembuangan, habis dibuang ditinggal. Nah, bentuknya seperti apa? Dan kita juga tidak tahu, nanti ke depan. Yang pertama, surat itu saya kasih RT. RT ada beberapa warga yang persetujuan lingkungan, artinya yang berdekatan ini-ini-ini. Saya lihat ada, diserahkanlah ke Pak lurah. Dan saya tidak menanyakan mengenai masalah pemborong, maupun apa, yang jelas kalau dari lingkungan setempat kalau sudah menjalankan, sudah persetujuannya RT. Setelah undangan itu dan saya tidak akan menanyakan bahwa lingkungan komplek, lain RW. Nih, ceritanya, kalau RW-nya gak ke 12 ke 13, nah kalau saya kan RW 06. Dan saya tidak menanyakan ke Pak lurah. Seharusnya lurahnya yang menanyakan. Nah, itu RW berapa? Jadi saya hanya sebatas lingkungan saya. Setelah terjadi itu, datang-datang dari warga komplek, adanya UPS ini tidak setuju.

T : *Ini RW berapa saja Pak, yang dekat-dekat ?*

J : RW 14, 13, 12 dan termasuk jalan Griya ini gabung ke komplek sana ke jalan Pelikan, eh apa, Graha. RW 12 kalau gak salah, gabung dia. Kalau RW 14 dekat jalan Galunggung sana. Nah tiba-tiba mengadakan demo dengan gabungan. Alasannya ke 07. Jadi bukan saya yang ditanya. Salah satunya ada salah satu warga sini menemui saya, 4 orang, sebelum demo. Warga komplek.

T : *Warga komplek apa namanya?*

J : Warga Komplek Graha Cinere. Konsultasi kepada saya. Menanyakan mengenai tentang ini. "Pak RW, ini mengenai masalah UPS apa nantinya tidak membawa wabah penyakit? Bagaimana sih ceritanya?." Ini program, bukan program RW, program pemerintah, Walikota. Sebatas saya tahu, akan saya jawab, tapi kalau tidak, kan kita punya kelurahan. Mari kita sama-sama duduk bareng ke kelurahan. Kalau perlu ke kecamatan. Bagaimana nanti ke depannya- pemerintah? "Oh begitu?". Kalau saya punya..katakanlah punya penggerak atau ini program saya, saya bisa jelaskan. Tapi sebatas saya jelaskan, hanya saja di kita di kelurahan bahwa UPS ada di Kampung Sasak. Begitu, jawaban saya sama orang komplek. Ceritanya, saya nggak tahu akhirnya mengadakan demo pada tanggal sekian dan saya tidak diundang Pak. Yang diundang warga-warga ini. Tapi kalau saya perhatikan asalnya demo, ya wajar. Kalau itu hak mereka demo. Hanya saja kata dia kurang komunikasi. Mungkin di antara kelurahan dengan warga komplek. Saya kan tidak tahu Pak.

Lampiran 11 (lanjutan)

T : *Tapi kok yang tahu cuma bapak saja? Yang tidak ikut, yang lain-lain kan pada itu (tidak datang atas undangan Pak Lurah). Dianggap tidak tahu berarti? Yang lain-lain, RW-RW lain ...*

J : Kan, begini Pak, kalau bicara RW-RW komplek kan nggak seperti saya, saya nggak kerja. Biasanya kalau saya, setahu saya kalau RW-RW komplek itu sulit Pak untuk menemui kalau ada undangan.

T : *Berarti mungkin diundang semua ya?*

J : Kemungkinan, kata Pak Lurah diundang. Cuma setahu saya, ini bukan lagi menjelekkan orang komplek, banyak rapat mingguan yang orang komplek itu jarang hadir. Kadang-kadang sekretarisnya. Persoalan itu kan, saya nggak peduli persoalan masing-masing RW. Yang jelas untuk pribadi saya. Setelah demo, Pak, saya diwawancarai sama wartawan. Dan saya jawab, nah ternyata ini didirikan, mesin turun, saya diajak ke Sukatani sama dari Pak...apa yang bagian sampah ini?

T : *Pak Yusmanto?*

J : Ya, Pak Yusmanto dan Pak Syafrudin apa? Untuk membuktikan bahwa UPS yang sudah berjalan di Sukatani. Saya melihat langsung, Pak. Begitu saya lihat, hasilnya seperti ini dan saya sampaikan kepada warga. "Oh, jadi hasilnya seperti ini- seperti ini." Jadi, bukan katanya Pak, saya lihat sendiri ke Sukatani yang sudah berjalan. Dan saya sama karyawan bertanya, begini-begini-begini. Jadi kalau saya ditanya warga, pendapat saya karena sudah melihat, kerjanya seperti ini-seperti ini. Nah ternyata begitu demo, demo tetap jalan, saya dengar di sini, lurah di forum menyampaikan, bahwa adanya ini-ini-ini. Nah, melihat saya warga ini melihat saya itu kayaknya jadi bukan kita dengar apa pemerintah yang disampaikan, dia *menyeroto*, Pak (memotong pembicaraan). Saya spontan, ya jelas dong, saya bilang kalau ini cara demo hak bapak, gak masalah. Memang begitu apa yang kita lihat. Tapi ini pembicaraan pemerintah, kata saya, lagi bicara. Nah kalau adanya UPS pemerintah ini menyediakan lahan ini untuk membawa wabah penyakit, contohnya kata saya, DBD demam berdarah dari Walikota, program pemerintah itu menyediakan adanya *fogging* untuk membasmi yang ...menjaga penyakit. Masa' Walikota dengan adanya UPS menjadi wabah penyakit? Kata saya. Sekarang gini saja, gak usah ribut, jalan saja dulu. Kalau memang itu sudah berjalan ditemukan artinya ke depan itu tidak baik, tutup, dibikin GOR, kata saya begitu. Nah, begitu berjalan secara pelan-pelan Pak, menurut saya pemerintah...jadi ada salah satu warga kita yang bisa kerja di sini.

T : *Ada berapa orang Pak?*

J : 14 orang. Yang kedua Pak, dari warga sekarang sudah sadar secara pelan-pelan. Jadi ada salah satu warga Cinere, datang kemari. Saya ngomong sama warga Cinere. Jadi, (komplek) Graha yang tadinya demo, membuang kemari. Dilihat hasilnya, terjadinya kata dia, bau, airnya banyak, ternyata - kalau lagi dibuang memang bau - sampah. Tapi setelah digiling...ya baunya sementara. Saekilas nggak bau. "Ini Pak hasilnya." Dengan sendirinya sadar. Saya ngomong, "Pak, bapak warga Cinere, kelurahan Cinere belum punya UPS. Dan ini memang khusus program Walikota. Nah nantinya kalau ada program UPS di kelurahan Cinere, bapak bisa menjelaskan - hanya jangan cuma katanya." Ada Pak orang warga Cinere datang kemari. Setelah lihat hasilnya,"bener bagus ya, Pak RW".

Lampiran 11 (lanjutan)

Ya, inilah yang saya jalani sampai saat ini. Jadi kalau ada warga tidak setuju dengan adanya UPS, gak usah jauh-jauh, datang saja kemari. Untuk membuktikan bagaimana sih hasilnya. Gitu lho Pak. Jadi kalau bicara masalah awal pembangunan, itu kan urusannya Pak Lurah dengan Pak Camat. Tapi selama ini Pak, yang saya tidak suka, yang namanya orang yang membangun ini, pemborongnya, gak pernah menemui saya Pak. Waktu pembangunan UPS.

T : *Jadi nggak tahu?*

J : jadi pemborongnya siapa? Gak pernah ada di hadapan saya. Itu nggak pernah. Artinya tahu-tahu, kalau dia kan ngambil tender, artinya dia pemborong. Saya kalau mau bicara ke situ, saya mau jadi pemborong tadinya. Kenallah sama Pak RW atau nggak, *low profil*-lah dia sama Pak RW. Lha, tadinya dia bisa memborong di sini kan, semua program ini kan, saya membantu kelancaran. Paling tidak kalau saya gerakkan warga, punya efek yang tidak baik. Dulu gak saya tandatangan, bisa nggak terjadi ini! Jadi, saya membantu segalanya program Walikota. Dan semua ini berjalan, Alhamdulillah. Jadi sampai saat ini saya atas nama ketua RW 06 untuk di Kelurahan Limo, sampah - saya sudah himbau kepada warga, jangan lagi membuang sampah itu (secara) liar. Yang pertama, kita punya UPS. Membaiklah keadaan lingkungan. Gini kan, waktu kemarin sampah, pinggir kali, dilemparkan. Terus di sana juga satu truk yang sudah 3 meter tingginya, itu yang bawa wabah penyakit, sampah yang tidak diolah, Pak. Kalau lagi bisa, panas, dibakar. Kalau lagi hujan, ini jadi yang banyak kemana-mana itu airnya. Dan air warga lingkungan situ airnya sudah nggak enak. Adanya di UPS begini, jadi secara sadar secara pelan-pelan masyarakat kita sekarang, ada sampah suka dibawa di plastik ditaruh di sini. Ini secara pelan-pelan Pak. Makanya saya ingin masing-masing kelurahan sadar, bahwa adanya UPS ini sebetulnya Walikota ini ngasih lahan pekerjaan orang-orang kita juga. Nah nanti untuk kelanjutannya saya nggak tahu tahun berapa, mungkin saya juga nggak selalu jadi RW saja, ke depannya ini supaya tiap kelurahan ada. Jangan nggak menjadikan pengalaman kemarin nih di Kampung Sasak. Ada demo, ada ini, masyarakat supaya sadar bahwa program Walikota seperti ini. Gitu Pak.

T : *Kemarin kira-kira kepentingan apa saja yang keganggu, gitu ?*

J : Sampai demo? Jadi begini Pak, masyarakat, lingkungan bukan lingkungan saya Pak. Jadi bapak perlu tahu, masalah demo ini bukan lingkungan setempat Pak. Artinya gini, dari pihak warga komplek, yang orang-orang pintar itu Pak. Jadi kalau untuk lingkungan saya, warga lingkungan saya nggak ada yang demo Pak, hanya menonton lihat orang ramai. Tapi kalau bicara masalah ini akan maju begini, nggak. Dan saya selalu menyampaikan kepada warga saya, maksud dia yang pertama, hanya komunikasinya yang kurang, dari pihak kelurahan yang disalahkannya. Yang kedua, untuk mengenai masalah peresapan air. Yang nantinya air itu gak enak. Tapi kalau kita lihat contoh itu Pak, di Sukatani, di rumah-rumah mewah Pak, rumah tingkat yang berjauhan dengan UPS, kalau ini bapak bayangkan ini bukan rumah, ini gak ditunggu, ini bedeng. Jauh kan Pak perbandingannya berapa ratus meter dari UPS ini. Jadi, saya rasa takutnya dari air.

T : *Kalau di Sukatani, kan dekat itu?*

J : Nah, makanya kan saya bilang, saya bodoh Pak, pendidikan saya. Bapak nggak usah jauh-jauh, sebelum ini berjalan kita ke Sukatani sama-sama, dan dia sudah diajak. Bapak lihat bagaimana sih? Tanya orang-orang yang dekat situ. Daripada nanti bilang katanya-katanya, Bapak lihat. Hasilnya bagaimana dan keluhannya apa? Itu sampai sat ini gak ada

Lampiran 11 (lanjutan)

omongan. Justru kemarin dari pihak anak buahnya membuang sampah selama ini sampah dia diambil sama TPA Depok pakai mobil. Dia datang kemari untuk membuang ke sini. Saya bukannya gak perlu. Koordinatnya harus menghadap dulu sama saya. Tujuan saya biar membuktikan bahwa biar yang kemarin demo saya tahu. Jadi kalau kamu orang kerja yang suruh membuang. Koordinatnya suruh ke sini dan berhadapan sama saya. Begitu dilihat, oh benar. Jadi semua ini kita-kita menyalahkan warga karena warga tahu tidak tahu. Cuma asal jangan ada orang-orang, pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Saya mohon dengan sangat, ini suatu contoh di RW 06.

T : *Jadi manfaatnya apa saja yang dirasakan??*

J : Yang pertama, ada manfaatnya, masalah plastik ini kan...jadi mengenai masalah UPS ini kalau yang tidak bisa digiling kan hanya plastik kemasan *Indomie*, jadi selainnya dikumpulkan, ada yang ambil, dikelola, gak tahu mengelola di mana perusahaannya. Terus organiknya, pupuk ini, ini sampai saat ini saya belum sejauh mana. Apakah koperasi, apakah nanti kita ada pembeli kita jual. Kalau pot kembang nggak tahu. Kalau menurut saya ya hikmahnya terutama buat warga saya, yang tadinya pengangguran, bisa kerja. Anak-anak muda biasa nongkrong, saya tarik kemari. Pada mau kerja. Artinya walaupun memang kerja ini bau, tapi bersyukur saya dengan adanya itu.

T : *Yang diharapkan dari adanya UPS ini Pak, buat masyarakat?apa yang berubah dari masyarakat?*

J : Yang pertama, kalau bicara wabah penyakit Pak. Karena dari sadar sampah itu pertama menjaga lingkungan. Lingkungan bersih. Kedua, sampah ini tidak ada lagi yang buang sembarangan. Kareana kadang - kadang warga, ya yang saya katakan tadi, kalau ini tidak diadakan UPS, otomatis sampah mau dibuang kemana? Sekarang lahan ini sudah terbatas Pak, ini punya orang, itu punya orang, gak usah sampai yang ratusan meter gini, kalau kita taruh sampah di depan saja, orang bisa marah. Tapi adanya UPS ini, semua ini berjalan lancar. Kalau menurut pendapat saya, gak tahu pendapat orang lain.

T : *Jadi kalau sekarang, tentang lokasi, ini masih dipermasalahkan gak?*

J : Yang selama ini, gak. Aman-aman saja.

T : *Jadi kekhawatiran saja ya, kekhawatiran warga sekitar kalau ini bisa mencemarkan?*

J : Iya, mencemarkan. Terus air juga jadi nggak enak diminum. Tapi berjalan dua bulan ini tidak terbukti. Tidak ada yang *complain* ke saya. Mudah-mudahan ya seperti itu.

T : *Sekarang mengenai pelaksananya Pak, yang bikin UPS ini? kalau menurut bapak, seperti apa harusnya?ini kan program pemerintah. Ada Dinas, camat, lurah.harusnya mereka seperti apa? supaya program UPS ini berjalan dengan baik.*

J : Yang pertama begini Pak, masalah mekanik, ini jangan sampai mesin ini mati, artinya berlarut-larut. Kalau bicara sini terlalu lama. Saya mengusung, ada salah satu, itu keponakan saya, ibaratnya mesin mati nih, barusan, kalau saya telepon ke Depok, kayaknya agak sedikit lambat. Karena terlambat menggiling, jadi ada penghambatan juga. Nah, tadi kebetulan keponakan saya mekanik, mengerti mesin ini. Jadi kalau ada kerusakan minta dibantu sama keponakan saya. Saya mengusung, apa salahnya sih se-kecamatan 5 UPS, sebagai mekanik, keluarga saya itu dimasukkan dan untuk melancarkan. Kalau saya, siang malam juga rumah saya kan dekat. Ya terutama yang berdekatan ini lho. Jadi bukan nggak ada mekanik di Depok. Cuma kan nggak secepat itu.

Lampiran 11 (lanjutan)

Ini keluhan saya. Yang kedua, maksud saya gini Pak, dari pemerintah kota, karena ada pekerja ini kan - kita mudah-mudahan sehat Pak, kalau perlengkapan pakaian karena lagi diusul, secara pelan-pelan – yang kedua kesehatan terutama perlu dijaga ini. Paling tidak, susu Pak. Kalau nggak, seminggu sekali, benar nggak Pak? Karena orang kerja ini bukan main-main lho Pak. Kalau kurang-kurang bisa TBC, saking baunya. Bukan masalah air bau. Itu untuk kesehatan supaya untuk melancarkan pegawai. Yang pertama itu paling nggak ya seminggu sekali, kalau tiap hari gak mungkin lah. Itu keinginan saya. .

T : *Kalau itu Pak, apa...peran kepala Dinas seperti apa Pak dalam pembangunan ini?*

J : Kalau orang dinas yang saya tahu persis, Casmin sebagai yang punya lahan.

T : *Ini lahan punya siapa?*

J : Haji Sahir, kan dikuasai sama anaknya Casmin. Kalau saya sebatas ketua lingkungan, jadi kalau mau bicara Dinas, dia kan yang langsung Pak. Jadi yang lebih jelas, kalau masalah Dinas ini tanyakan ke Casmin. Jadi ada dibagi kerja Pak, saya sebagai koordinator lapangan untuk ada orang yang membuang di sini. Dan saya menanyakan sampah itu dibuang mendetail. Kalau dari DKI bakal saya tolak. Saya tidak melihat duit, saya yang penting kerja. Jadi saya mengawasi takutnya ada sampah-sampah liar masuk di sini.

T : *Kalau ini dari RW mana saja Pak ?*

J : Kalau ini satu kelurahan Pak. Jadi sampah ini dari satu kelurahan, cuma karena secara bertahap jadi belum semua. Itu ada forum rapat dulu.

T : *Harusnya warga kelurahan ini bersyukur banget ya, Pak ? sampah satu kelurahan dikelola di sini.*

J : Nah, makanya sadar sendirinya orang komplek pada datang kemari. Mohon sama saya mau membuang. Ya kalau saya sih kalau untuk kelurahan Limo, Kecamatan Liko kenapa tidak? Cuma gak ada salahnya nanti, saya takut ada masalah, saya koordinasi dulu sama Pak lurah. Sama Pak camat. Karena di kelurahan lain, Cinere belum ada, terus baru ada di Pangkalan Jati, ada. Grogol baru lagi mulai. Nah gara-gara demo itu Pak jadi pada masing-masing. Satu, lahan Pak, yang pertama lahan mungkin. Kalau Cinere kan lahan sudah mahal. Siapa yang mau menyediakan cuma-cuma? Kalau ini kan Haji Sahir namanya. Dan kalau di Cinere berdekatan sama warga komplek. “Wah nanti saya bisa kebauan,” bisa begitu Pak. Makanya sampai saat ini belum jalan. Dan saya mengharapkan semua supaya lebih ngerti di tiap kelurahan, ya kalau yang saya denger dari Walikota ini kan menyediakan lahan bukan sekelurahan Limo saja, jadi dana sudah ada, cuma pelaksanaannya yang belum. Jadi jawaban saya, mungkin sebatas saya tahu seperti itu. Secara hati nurani saya seperti itu. Dan saya ke depan ini supaya lebih baik di lingkungan, yang pertama. Saya bersyukur Pak, dengan adanya program Pak Walikota. Tapi kalau bicara lahan, itu awalnya ngontrak atau beli, saya nggak sejauh itu lah Pak. Karena kalau sudah kesepakatan Haji Sahir, berarti udah *deal* kan Pak? Nanti mungkin kalau komentar saya kurang, lebih jelas lagi ke Casmin untuk masalah Dinas. Seperti apa sih? Gitu.

T : *Kalau dengan lurah, camat itu seperti apa Pak? Camat itu perannya seperti apa/lurah, waktu pembangunan awal-awal.*

Lampiran 11 (lanjutan)

J : Kalau saya pernah dengar dari Pak camat begitu, kalau memang sekiranya ini..."kita jalan saja dulu, kalau kira-kiranya mengganggu lingkungan atau menjadikan bahwa ini wabah penyakit segala macam, kita tutup saja". Mungkin perjanjian Pak camat komitmennya seperti itu. "Saya berjanji kalau ada apa-apa, kita bikin GOR saja". Katanya begitu. Lihat saja dulu bagaimana ke depan. Ya ternyata berjalan.

T : *Kayaknya orang-orang itu perlu bukti dulu ya Pak?*

J : Kayaknya....

T : *Bagaimana Pak selaku pemimpin warga di sini. Untuk mengelola sumber dayanya Pak? kan ada mesin, ada orang, ada macam-macam lah yang dikelola di sini. Bagaimana itu mengaturnya Pak?*

J : Saya pesan mengenai masalah tenaga kerja. Yang kerja, katakanlah, jadi berhati-hati jangan sampai terjadi, artinya yang terutama mesin ini kalau mau dihidupkan, lihat air. Karena ibaratnya mesin ini sama juga mobil. Kalau kita mau pakai, kita mau jalan terutama lihat air *accu*, "Terutama *ente* juga jangan banyak tangan, kalau nggak tahu, ada mekanik. kalau nggak tahu, tanya," Saya memperhatikan karyawan seperti itu. Jadi terutama saya lihat itu air Pak, karena banyak terjadi, jadi kalau air itu panas misal terjadi. Dan *accu* juga kalau airnya habis bisa meledak. Jadi saya selalu rewel Pak. Jadi, kalau masalah untuk pekerjaan ini, jadi saya selalu mengingatkan saja, begitu.

T : *Terus ini Pak, pas pembangunan ini masyarakat dilibatkan nggak Pak? pas hanggarnya dibangun.*

J : Ada, jadi sebagian warga saya banyak yang kerja. Sampai ke penyelesaiannya ada warga saya. Istilahnya RT-nya keamanannya.

T : *Cuma si kontraktor langsung nggak sempat ketemu?*

J : Saya belum lihat batang hidungnya itu siapa? Bapak boleh jelaskan Pak, secara jujur, kontraktor ini sama Pak RW belum pernah ketemu. Jadi kalau sama RT dekat. Saya tadinya sakit hati sebetulnya. Saya bukan bicara ucapan terima kasih lah, silaturahmi.

T : *Tapi sama Pak RT ketemu?*

J : Dia kan jadi keamanannya, dipakai. Saya tidak. Saya bicara jujur. Paling tidak, silaturahmi lah kita duduk bareng. Sampai saya nghomong juga sama Pak Syafrudin, sama orang bagian ini..."Kenapa takut sama saya?," Gak pernah melihat saya.

T : *Terkait yang kemarin nolak Pak, orang-orangnya siapa Pak ? warga atau RW-nya sendiri atau...*

J : Kalau bicara Pak, jadi demo kemarin itu saya tidak melihat...kayaknya bukan warga sini semuanya. Jadi, kalau orang komplek ini berdekatan. Ada orang Sawangan, yang Haji Sahir kenal sampai dibilangin, " Ngapain kamu orang Sawangan jauh-jauh ikut demo?." "Ada undangan". Jadi begitu Pak kalau bicara.

T : *Yang koordinir siapa itu Pak?*

J : Ya, warga komplek. Justru kalau warga saya nggak pernah demo.

T : *Atau kalau orang kompleknya sendiri lagi pada kerja Pak?*

J : Gak tahu, kan lagi hari libur. Jadi ada orang ketiga lah, Pak.

Lampiran 11 (lanjutan)

T : *Jadi intinya banyak yang bukan dari warga, ya?*

J : Dari warga nggak ada masalah. Kalau saya bilang nggak ada ya nggak ada. Hanya saja begini Pak, kalau orang kampung melihat ramai-ramai kan ikut melihat. Jadi kalau masalah demo, warga saya Alhamdulillah nggak ada.

T : *Itu kepentingannya apa tuh Pak, demo?*

J : Maksudnya ini nggak boleh diteruskan. Kan tadi saya ngomong, “Bapak punya hak berbicara, bapak orang pintar, orang berpendidikan. Kalau memang ini tidak boleh, bapak silahkan usul sama Pak Walikota. Program ini bukan program RW,” saya gitukan. “Silahkan !, Bagaimana nanti ke depannya, bisa didirikan UPS ini.”

T : *Sekarang kan ada RW, ada lurah, ada camat, menurut baPak, ke depannya harus bagaimana?RW-nya bagaimana terhadap UPS ini.*

J : kalau saya untuk bicara ke depan, begini Pak, karena selama ini saya mungkin...karena saya sudah 2 periode jadi RW, dan ini sudah mau habis masa bakti saya. Tapi sebagian warga saya diusung kembali, tapi saya merasa capek Pak. Dan kemungkinan saya mau istirahat dulu. Tapi itu pun, saya di warga sih belum. Pada intinya seandainya saya ke depan nggak jadi RW, bukan saya lagi programnya, jadi selama saya pegang seperti itu mengenai masalah UPS yang di Kampung Sasak.

T : *Kalau organisasi UPS ini siapa saja sih Pak? Kepengurusannya apa saja?*

J : Selama ini belum ada. Kita kan baru berjalan satu bulan ini.

T : *Tapi nanti bakal ada?*

J : Kalau saya rencananya saya terikat untuk anak-anak, supaya ada manfaat ini, gaji, saya mengadakan arisan lah. Grup karyawan, tujuannya kalau terikat gitu kan dia lebih mantap gitu kan Pak. Dan bagi dia juga gajinya ada manfaatnya. Ini rencana baru.

T : *Waktu dulu ada yang ramai-ramai demo, yang menghadapi siapa Pak dari...*

J : Kelurahan.

T : *Oo, jadi langsung kelurahan?*

J : Camat, semua, polisi, banyak benar.

T : *Jadi mereka ngertinya sama siapa? belum ngerti, pas jalan, baru...*

J : Ngertinya begitu demo ini, ya Pak Lurah kasih masukan. Turun memberi pengarahannya, “Jadi UPS bukan buat menampung sampah.” Jadi, Pak Lurah beberkan semua permasalahan nanti untuk ke depan. Semua program oleh lurah diceritakan. Dengan sendirinya, sadar,sadar,sadar. Dari situ dia bikin “UPS ini akan ditutup”. Saya bilang, “biarkan saja”. Pas nggak lama, perbandingan saya ajak begini, “Sekarang pengelolaan ini bapak demo, harusnya saya demo sama bapak,” saya balikkan seperti itu. “Lihat, sampah yang sudah 3 meter tingginya, pembuangan liar. Ini sudah nggak ketampung. Dan tanahnya juga bukan milik warga, tanah PT. Kalau memang itu PT stop, sampah ini mau dibuang ke mana?” Pak camat, Pak lurah untuk membuktikan itu. “Nih, Pak yang menjadikan wabah penyakit”. Saya gitukan. Kan saya ada di *Monde*, tuh. Ini yang jadi wabah penyakit. Kalau sampah dibakar nggak bisa, dibuang-buang saja itu bermacam cara, itu airnya kemana-mana. Ini warga *complain*, sumurnya sudah nggak enak, karena terserap air itu. Nah, kalau ini ditutup? Seharusnya kita koreksi, bersyukur. Bahwa

Lampiran 11 (lanjutan)

adanya UPS, pemerintah menyediakan UPS. Nah, mungkin ini suatu contoh Pak. Ya memang harus ada awal. Semua ini kalau nggak ada cerita ya Pak, berarti nggak ada tanda tanya. Kalau kita berbuat baik, itu tantangan pasti ada. Jadi kita jalan saja, dan mungkin ke depan juga baPak bisa pertemuan lagi ke saya. Saya belum sejauh itu karena ke depannya bagaimana. Dan saya punya rencana, nanti kan kalau sudah 2 tahun dilepas. Sekarang masih digaji. Kalau sudah lepas, karyawan gak ditangani Pemda. Jadi sebatas itu, mungkin kalau ada pertanyaan yang lain, kalau bapak mau ketemu Casmin untuk masalah Dinas ya boleh-boleh saja. Sebatas keterangan saya seperti itu.



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 11

Tanggal wawancara : 10 Juni 2009

Tanya (T) : *Bagaimana gambaran mengenai latar belakang pembangunan UPS atau kebijakan pengolahan sampah di Kota Depok?*

Jawab (J) : Latar belakangnya adalah pada saat Kota Depok mendapat kritikan kota terkotor di Indonesia. Kemudian walikota menulis di harian *Kompas* mengenai SIPESAT (Sistem Pengolahan Sampah Terpadu). Saya melihat Pak Walikota ini kan dari BPPT, dan di BPPT sana memang ada tim peneliti yang berkaitan dengan pengolahan sampah. Sehingga ketika ada gagasan SIPESAT untuk menjawab kritikan kota terkotor tadi, muncul gagasan untuk menerapkan apa yang sudah dilakukan/diujicoba oleh BPPT. Setelah saya berdiskusi dengan orang BPPT (Bu Sri) yang meneliti bidang persampahan ini, ternyata konsep yang dibawa Pak Walikota itu adalah cara yang sudah ditinggalkan oleh BPPT, dimana metode yang digunakan untuk memilah sampah yaitu dengan mesin. Sedangkan dalam panduan dari Bank Dunia yang memberikan subsidi kepada produsen kompos, cara yang dipakai adalah cara manual. Karena mesin lebih baik digunakan bila lingkupnya luas, sedangkan cara manual bisa digunakan pada skala kecil. Walaupun demikian, Pak Walikota tetap pada cara berpikrinya, yaitu dengan menggunakan mesin. Kemungkinan hal ini dikarenakan oleh pengaruh dari pak Singgih (pemasok mesin). Sehingga program SIPESAT ini tetap menggunakan mesin, yang kemudian dituangkan dalam program pemerintah kota. Jadi proses pengambilan kebijakan program UPS ini, merupakan keputusan Pak Walikota sendiri. UPS ini tidak pernah di-debat-publik-kan secara serius. Sebenarnya program pengolahan sampahnya benar, yang salah adalah cagaimana caranya yang tidak pernah didiskusikan dengan serius. Bisa dibayangkan apa jadinya jika sampah ditumpuk di suatu lokasi (UPS) tanpa dipilah dulu. Hal ini akan berdampak serius.

T : *Bagaimana latar belakang penolakan UPS?*

J : Saya kira setiap individu mendambakan lingkungan permukiman yang nyaman. Mereka ingin lingkungan yang asri, bebas sampah. Bahkan mereka berani bayar mahal untuk itu. Ketika ada program ini dimana tiba-tiba ada UPS di sekitar lingkungannya, maka mereka akan merasa tidak nyaman. Karena di UPS ini akan ditumpuk sampah dari area sekitarnya. Tumpukan sampah yang belum sempat diolah, jika terkena hujan akan menimbulkan bau. Penolakan itu terjadi karena penempatan UPS ini jaraknya terlalu dekat dengan permukiman. Walaupun pengolahannya dengan mesin, jika ada masalah dengan mesinnya, tentu tumpukan sampah (yang tidak terolah) akan menjadi masalah. Belum lagi jika ada kerusakan *spare part* mesinnya.

T : *UPS yang sudah dibangun ada 20 pada tahun 2008. Pada 3 UPS diantaranya sempat terjadi resistensi masyarakat, dimana terjadi demonstrasi. Pada lokasi lain mungkin ada juga resistensi, namun tidak sampai mengemuka. Ketiga UPS itu adalah yang berlokasi di Cinere, Bukit Rivaria, dan dekat perumahan Taman Cipayung. Menurut anda kepentingan-kepentingan apa saja yang terpengaruh oleh pembangunan UPS selain tadi jelas warga tidak mau ada pencemaran lingkungan. Apa sekedar itu saja, atau ada kepentingan politik juga, kepentingan ekonomi ?*

Lampiran 12 (lanjutan)

J : Kalau dari jumlah UPS yang resisten ada 3, berarti yang 17 berjalan. Dari UPS-UPS yang berjalan itu perlu dilihat, apa faktor jarak itu mempengaruhi, apa ada faktor lain yang mempengaruhi. Tapi saya kira yang pertama adalah faktor jarak UPS dengan pemukiman. Faktor yang kedua, soal citra perumahan yang ada UPS-nya. Dari sisi politik, mungkin ada yang terganggu kepentingannya. Artinya kalau berkata kemungkinan, kita juga bicara soal faktor elite di tingkat masyarakat yang ketika ada ketidaksetujuan beberapa orang, mereka perlu pemimpin untuk menyuarakan itu. Dalam hal ini pemimpin tingkat lokal. Soal motivasi pemimpin tingkat lokal seperti apa, kita tidak tahu. Kembali ke masalah UPS, dengan asumsi target pengolahan 30m³ per hari, apakah target itu terpenuhi atau tidak. Siapa yang mengawasi itu? Misalkan kapasitas mesin memenuhi, tapi apakah itu berlangsung kontinyu. Ini masalah penggunaan dana yang besar, tapi kita tidak tahu output-nya seperti apa. Karena tidak ada data bagaimana kinerja UPS-UPS yang ada itu. Mungkin perlu dilakukan investigasi untuk mengetahui hal ini.

T : *Manfaat yang ditawarkan oleh pemerintah dengan adanya UPS ini adalah tidak berbau, ramah lingkungan, kemudian bisa menghasilkan ekonomi dengan adanya kompos. Anda mengkritiknya seperti apa?*

J : Dulu ketika program PPK IPM, ada 3: kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Ketika menyusun proposal pertama, UPS ini dimasukkan dalam daya beli. Asumsinya dengan adanya UPS bisa meningkatkan pendapatan sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Tetapi akhirnya dimasukkan ke kesehatan. Mengenai manfaat ekonominya, masih diperdebatkan. Sebagai contoh kasus, jika terjadi kerusakan *spare part* mesin kemudian meminta dana ke Dinas Kebersihan, bagaimana dia bisa membayar karyawan yang bekerja di situ. Artinya dari sisi manfaat ekonomi, agak berat. Dari sisi lingkungan, begitu ada sampah terkumpul di suatu tempat, tentunya menimbulkan problem. Apalagi kalau lokasi itu tidak memiliki naungan, jika terjadi hujan malah menimbulkan masalah lingkungan. Dimana manfaat lingkungannya? Jadi seharusnya, sampah yang ditumpuk untuk diolah seharusnya memiliki naungan. Sekarang ini ada konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal contohnya demonstrasi sampai ke PTUN. Contoh, konflik horizontal, pernah terjadi warga di dekat TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Cipayang memboikot dengan menolak sampah dari warga yang menolak UPS.

T : *Sebelum adanya kebijakan itu, diharapkan ada drive perubahan yang diinginkan. Untuk UPS, diharapkan terjadi perubahan dalam pengelolaan lingkungan, kualitas lingkungan diharapkan meningkat, kemudian diharapkan misalnya perubahan perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Anda melihat ini seperti apa? Apakah terjadi perubahan yang diharapkan?*

J : Pertama, perilaku memilah sampah, itu tidak terjadi. Karena masyarakat merasa sudah membayar, jadi menganggap tanggungjawab itu diserahkan pada UPS. Padahal saya pernah mengusulkan untuk pemilahan sampah oleh masyarakat sebelum masuk ke UPS. Dalam muatan kegiatan UPS, pengadaan mesin satu paket dengan *conveyor belt*. Dengan tujuan dilakukan pemilahan saat sampah berada/diangkut di atas *conveyor belt*. Pada kenyataannya, banyak *conveyor belt* yang tidak berjalan. Kemudian yang terjadi adalah, sampah yang masuk ke mesin pengolah hanya berupa daun-daunan dan sampah organik lainnya. Sampah non organiknya dibiarkan diangkut oleh truk juga pada akhirnya. Pemerintah bilang ada 3 lingkup kegiatan, yaitu level rumah tangga, level UPS kawasan sampai TPA. Rupanya hal ini tidak terintegrasi. Jika pemilahan dilakukan sejak dari tahap

Lampiran 12 (lanjutan)

awal, mungkin target volume pengolahan 30m³/hari bisa dicapai. Jadi kesimpulannya, perubahan perilaku masyarakat untuk memilah sampah, tidak terjadi. Mereka menganggap, dengan adanya UPS bisa diandalkan seakan-akan sebagai TPA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) karena tugas pemilahan diserahkan kepada UPS.

T : Tadi sudah disampaikan mengenai lokasi kemudian jarak, jadi dalam hal resisten tadi juga Anda menekankan bahwa lokasi UPS sangat dominan menjadi penyebabnya. Jadi apa yang menentukan lokasi UPS itu siapa?

J : Ketersediaan lahan. Karena tidak ada alokasi anggaran untuk membeli lahan. Jadi sangat sulit untuk menentukan jarak tertentu dari permukiman karena yang dilakukan adalah memilih lahan yang tersedia dan tidak usah bayar. Kalau ada anggarannya, mungkin masih bisa memilih lahan dengan jarak tertentu dari permukiman.

T : Masyarakat belum memahami perbedaan UPS dan TPS, sehingga resisten. Padahal UPS itu harusnya tidak bau, bisa mengolah sampah dengan baik. Tetapi mengapa dengan perubahan TPS menjadi UPS masyarakat menjadi resisten, bukannya terjadi penolakan saat masih berupa TPS?

J : Kalau TPS, itu pasti diatur. Karena bersifat sementara, hari ini ada sampah kemudian besoknya sudah diangkut. Kalau UPS tidak seperti itu. Dalam benak warga, di UPS seluruh sampah warga dikumpulkan di satu tempat sehingga terjadi penumpukan sampah. Karena tidak mungkin sampah sebanyak itu selesai diolah dalam satu hari. Sehingga akan menimbulkan bau.

T : Dalam pelaksanaan kebijakan itu ada pelaksana program. Anda sendiri melihat kepemimpinan pelaksana program dalam mengimplementasikan kebijakan itu seperti apa? Kalau dilihat dari program, ini digulirkan oleh walikota dan DPRD. Kemudian program turun untuk dilaksanakan oleh DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan), kemudian menjadi proyek, kegiatan, yang pengadaannya itu diadakan oleh kontraktor. Kaitannya seperti apa dalam kasus UPS ini

*J : Jadi di tingkat pelaksana (tingkat Dinas) itu tidak yakin dengan gagasan tersebut. Program tersebut adalah program Walikota. Dan Pak Walikota sendiri mempunyai tim sendiri yang bukan dari pemerintahan. Seakan-akan Walikota tidak percaya kepada orang-orang di pemerintahan untuk mengurus hal ini. Saya pernah menanyakan masalah ini ke Pak Walikota, dan jawabannya adalah saya dipersilahkan menghubungi orang-orang kepercayaannya. Mekanisme seperti itu yang dari awal terbangun. Akibatnya ada penolakan yang sifatnya diam-diam juga. Karena ketidakberanian menghadapi Pak Walikota. Sehingga menjadi sangat politis. Di DPRD menjadi sangat politis, lalu kemudian jika menyampaikan secara terbuka, dimarahi. Akibatnya orang yang tidak sepaham itu bisa dimutasikan. Jadi mekanisme itu tidak persuasif. Mungkin itu sudah menjadi *style* kepemimpinannya.*

T : Jadi peran DKP tidak efektif juga?

J : Dulu pernah ada misalkan LPM hanya digunakan namanya saja, yang operasional semuanya ya tim dari pak walikota sendiri. Jadi, LPM dipakai dalam konteks pencairan anggaran saja. Jadi ada ketidakpercayaan walikota kepada orang pemerintahan, sehingga memakai orang-orang dari luar yang merupakan kepercayaannya. Hal yang terjadi seperti itu menimbulkan lingkungan yang tidak sehat di birokrasi. “Ya sudah bikin saja sendiri, tapi kalau ada masalah, kita juga yang kena”.

Lampiran 12 (lanjutan)

T : *Jadi ada semacam konflik?*

J : Ya. Jadi yang terbentuk adalah, “ya dijalani saja lah, karena sudah di RPJMD.” Ya, patut disayangkan karena mekanisme pemerintahan tidak jalan.

T : *Dan itu dilihat sampai di level lurah sebagai pimpinan terendah dan mereka berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga ketika terjadi resistensi, lurah pun melempar lagi. Jadi tidak bisa menjelaskan tuntas di level lurah. Seharusnya kalau lurah memang yakin akan kebijakan pemerintah dan bisa menjelaskan dengan gamblang dan itu tidak akan dilempar ke Pak Walikota semua.*

J : Itu bisa menjadi kondite buruk buat para lurah. Karena kalau misalnya ada penolakan dari warganya, lurah bisa dianggap tidak mampu untuk meyakinkan warga.

T : *Menurut Anda, bagaimana tentang kepemimpinan dalam penggunaan sumber daya terkait dengan kebijakan pengolahan sampah?*

J : Satu, di sisi teknologi misalnya mungkin dianggap oke ada mesin yang bisa mempermudah. Tapi kalau dilihat hitung-hitungan input-output-nya itu sebenarnya tidakimbang. Saya tidak tahu kondisi sekarang seperti apa, tapi yang saya lihat bahwa SDM itu cuma melaksanakan saja. Tidak ada inovasi di lingkungan SDM di level bawah ini. Sebenarnya ada usulan supaya diintegrasikan dengan pendekatan dari rumah tangga. Dari sisi biaya, kita belum lihat. Saya kira masih terlalu besar biaya yang dikeluarkan dibanding output yang dihasilkan. Belum lagi dari aspek sosial yang rusak karena adanya hal ini. Dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan, jelas tidakimbang.

T : *Masalah konteks kebijakan, tadi kita banyak bicara masalah kebijakan. Menurut teori, kebijakan bisa berjalan jika isinya baik dan sesuai dengan konteks. Konteks kaitannya dengan pembangunan UPS itu ada faktor kekuasaan, kepentingan, dan aktor yang terlibat. Bagaimana keterlibatan civil society, LSM, dalam pembangunan UPS?*

J : Kalau menurut saya, lagi-lagi ke perumusan kebijakan karena muatannya di sana. Kalau saya terlibat dalam perumusan kebijakan, saya akan merasa itu kebijakan saya juga. Kebijakan yang saya lahirkan dan saya akan punya tanggungjawab. Karena kebijakan pembangunan UPS ini adalah kebijakan Walikota, DKP pun tidak merasa itu kegiatannya padahal fungsi itu ada padanya. Agak susah meminta kontribusi dari pihak lain. Akhirnya yang terjadi setiap pihak yang berkepentingan hanya akan peduli pada kepentingannya sendiri. Yaitu kepentingan individual yang punya lahan, kepentingan yang memasok mesin.

T : *Terkait dengan kekuasaan, kepentingan dan aktor yang terlibat dalam kebijakan UPS, anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ada keterkaitannya sehingga terjadi resistensi terhadap kebijakan pembangunan UPS ini?*

J : Kepentingannya itu orang ingin gak ada bau, tidak jorok, tidak kotor di sekitar lingkungannya. Jadi kalau suatu permukiman sudah bagus kebersihannya lalu dibangun TPS, sampahnya diangkut oleh truk. Kemudian setelah dibangun UPS, malah terjadi penumpukan sampah. Saya kira kepentingan sesederhana itu. saya tidak melihat kepentingan orang ke arah politik. Saya pernah usul, bisa tidak sebenarnya di warga yang di sekitar calon UPS itu misalkan meninjau lokasi UPS yang sudah ada dan kasih kesempatan untuk memutuskan berdasarkan hasil peninjauan itu. biarkan mereka sendiri yang memutuskan apakah mereka akan menerima pembangunan UPS di lingkungannya atau tidak. Itu kan lebih demokratis.

Lampiran 12 (lanjutan)

T : *Kaitannya dengan Good Governance, implementasi UPS ini menurut anda seperti apa?*

J : Soal transparansi, tidak pernah ada. Kita tidak pernah tahu kinerja UPS seperti apa sekarang ini. Alokasi untuk UPS ini 18 miliar rupiah sampai 2010. Artinya kita punya dana besar namun tidak pernah evaluasi UPS yang sudah ada. Kalau kita baca analisis kebijakan, ada proses dimana sebelum kebijakan yang ada, harus ada *policy-bumper* yang dibahas secara didebat-publikkan, lalu ada beberapa pilihan, kemudian pimpinan eksekutif memilih dari sekian banyak pilihan. Jadi untuk kebijakan UPS ini semata-mata adalah kebijakan eksekutif sendiri. Apalagi untuk masalah transparansi dilanggar, partisipasi tidak jalan, akuntabilitas juga tidak pernah jalan. Dengan asumsi target pengolahan 30m³/hari apakah tercapai? Kita tidak pernah tahu. Bagaimana kinerja untuk laporan ke publik tidak pernah ada.

T : *Bagaimana karakteristik lembaga badan pelaksana kebijakan dan karakteristik orang-orang dalam pengelolaan UPS? Realita yang terjadi dan yang harusnya dijalankan oleh mereka. Misal, DKP harusnya menjalankan seperti apa, kapasitas orang-orangnya seperti apa, efektif dalam menjalankan program pengelolaan sampah. Bisa terkait UPS atau sampah lainnya.*

J : Mereka memposisikan diri sekedar sebagai legitimasi saja karena secara operasional itu ada dalam tim yang dibentuk pemerintahan. Ibaratnya kebijakan ini tidak sampai ke birokrasi yang ada. Bagaimana mereka mau melaksanakan kebijakan kalau mereka sendiri merasa, satu hal mungkin mereka tidak terbiasa dengan pengolahan. Agak *shock* memang karena dari awalnya fungsi mereka hanya mengangkut sampah lalu membuangnya. Yang kedua, peran dari tim luar yang dibentuk pemerintah besar sekali dalam menentukan banyak hal. Itu terjadi pada masa yang lalu. Untuk saat ini saya tidak tahu persisnya.

T : *Termasuk juga penguasa wilayah semacam camat dan lurah mereka juga hanya diminta untuk menyediakan lahan?*

J : Itu menjadi problem, ketika Musrenbang SKPD Dinas KLH , dari tiap kecamatan hadir. Usulan cuma satu yaitu bagaimana kalau pengadaan lahan itu dianggarkan. Sehingga mereka lebih leluasa untuk memilih lokasi. Dan justru anggaran untuk itu tidak ada. Apakah itu kebijakan, artinya bekerjasama dengan masyarakat atau memang ada aturan supaya tidak boleh beli lahan. Atau mungkin kalau beli lahan, anggarannya akan naik.

T : *Jadi camat dan lurah sendiri mempunyai keterbatasan dalam inovasi kebijakan?*

J : Inovasi itu ada kalau kita melakukan evaluasi. Evaluasi secara terbuka mengenai berbagai hal. Dari hasil evaluasi itu bisa muncul usulan-usulan inovatif. Itu yang tidak ada.

T : *Jadi kebijakan untuk UPS dari tahun 2008, tahun 2009 hanya pengulangan saja?*

J : Ya, hanya pengulangan dan direduksi. Persoalannya sebenarnya adalah sosialisasi. jadi untuk tahun 2009 ada anggaran untuk sosialisasi. Tetapi sebegus apapun sosialisasinya, tetap saja jika lahan yang dibutuhkan sesuai persyaratan tidak tersedia, tetap akan ditolak

T : *Kemudian terkait dengan peran pemimpin merespon resistensi warga?*

Lampiran 12 (lanjutan)

J : Jadi cara menangani masalah ini karena kurang sosialisasi. Asumsinya kebijakannya sudah benar, hanya ada masalah kurangnya sosialisasi.

T : *Bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan UPS ini?*

J : Saya melihatnya dengan timbulnya masalah sejak awal perumusan kebijakan UPS, pihak pelaksana seperti merasa mau tidak mau harus menjalankan apa yang harus dijalankannya. Dalam hal ini, mereka melakukan sebatas pada sosialisasi. Mungkin mereka juga pernah mengajukan gagasan-gagasan untuk pelaksanaan program ini. Namun yang dibahas selalu masalah sosialisasi. Jadi dalam SKPD-SKPD ini sudah tahu apa yang ada dalam pikiran Pak Walikota.

T : *Pada tahun 2009 ini kembali digelontorkan sejumlah dana untuk program UPS ini, yang diharapkan perbaikannya seperti apa?*

J : Pertama: Sosialisasi bahwa satu UPS ini tidak untuk menampung sampah atau kelurahan. Hal ini sangat penting. Kemudian dari UPS yang direncanakan ada 60 UPS dan ada 63 kelurahan. Jadi asumsi orang, satu UPS untuk satu kelurahan. Jadi sebenarnya satu UPS ini hanya melayani beberapa RW, bukan satu kelurahan. Jadi masyarakat tidak membayangkan banyaknya sampah yang akan ditampung di satu UPS. Kedua: terintegrasi dengan pemilahan di rumah tangga. Jadi tidak ada pemilahan di UPS. Untuk keperluan sosialisasi diharapkan ada tenaga kerja khusus yang direkrut untuk hal ini. Jika pemilahan sampah sudah lebih awal dilakukan di rumah tangga, maka akan mengurangi waktu penumpukan sampah di UPS. Selain itu, setelah dilakukan pemilahan, diharapkan sampah organik yang terkumpul akan dijual secara kolektif.

T : *Mengenai SDM yang direkrut itu sendiri, SOP-nya, standard-nya seperti apa?*

J : Ketika peresmian pertama saja, ini bisa menjadi problem kalau kebijakan ini yang dipilih. Kebijakan UPS-nya oke, tapi kalau isinya seperti ini bisa menjadi masalah. Kita juga belajar mengenai pengolahan bahan organik, tidak perlu ada bahan tambahan. Jadi, bisa terolah sebenarnya. Mengenai mesin, pasti memiliki umur pemakaian, *maintenance*, dan tidak ada contoh bahwa unit mesin tersebut bisa dibiayai dari kompos. Karena biaya operasional terlalu tinggi.

T : *Dari segi style kepemimpinan Pak Walikota sendiri, bisa digambarkan?*

J : Menurut informasi teman saya yang juga salahsatu pengurus partainya Pak Walikota, boleh dibilang tipe keras kepala. Apalagi kalau merasa pendapatnya benar. Bu Sri (peneliti masalah sampah) yang dari BPPT yang jadi rujukan (kebijakan UPS) pun mempunyai penilaian yang sama. Pak Walikota lebih percaya kepada Pak Singgih (pemasok mesin). Kita tidak punya sistem bagaimana merumuskan suatu kebijakan yang se-partisipatif mungkin. Seharusnya seluruh *stakeholder* diberi kesempatan secara terbuka sehingga semua merasa pilihan itu benar-benar tepat dan akhirnya ikut merasa bertanggungjawab dalam perumusan keputusan itu. Pada akhirnya akan meningkatkan level partisipasi para pelaksana sampai tingkat terendah. Kasus ini dimulai dengan Pak Walikota menulis di harian *Kompas*, dia dari BPPT, seorang Walikota, (bergelar) doktor, menulis konsep tentang pengelolaan sampah. Sehingga dia merasa konsepnya yang paling benar. Saya tidak memahami mengapa Pak Walikota lebih mempercayai Pak Singgih, padahal Bu Sri lebih berpengalaman dalam bidang persampahan.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 12

Tanggal wawancara : 13 Juni 2009

Tanya (T) : *Bagaimana gambaran mengenai latar belakang pembangunan UPS atau kebijakan pengolahan sampah di kota Depok?*

Jawab (J) : Kebijakan UPS ini muncul ketika walikota dijabat oleh Nur Mahmudi. Latar belakang pertama menurut pengamatan saya bahwa ketika Nur Mahmudi menjadi Walikota, Depok itu mendapat julukan kota terkotor. Kemudian selain itu juga di Depok ini TPA yang di Cipayung Jaya itu perkembangannya sangat cepat perkembangan penampungannya sehingga mau nggak mau itu harus ada penanganan. Sekarang pun dampaknya sudah sangat terasa sekali. Ketika Nur Mahmudi menjadi Walikota maka salah satu upaya yang dilakukan dengan membuat pengolahan sampah ini yaitu UPS. Dari berbagai uji coba dan kajian akhirnya muncullah gagasan UPS ini. Supaya itu bisa berjalan, karena juga pada waktu itu pada tahun 2011 rencananya penggunaan TPA sebaiknya harus berakhir. Sehingga harus ada solusinya. Solusi yang paling mungkin yang tidak menggunakan lahan yang luas adalah dengan UPS yang tersebar di beberapa sentral titik. Maka dibuatlah rencana UPS ini. Melalui persetujuan DPRD maka disepakati ada 11 UPS yang akan dibangun. Jadi kalau secara legal formal, program ini inisiatif pemerintah eksekutif didukung oleh legislatif. Jadi secara legal formal ini tidak ada masalah. Kemudian mulai dilakukan peninjauan dan *pilot project* di beberapa tempat termasuk di Cimanggis. Kemudian timbul kasus. Saya juga heran awalnya. Kenapa kasus ini bisa terjadi? Bahkan waktu itu bukan hanya UPS yang dipermasalahkan, bahkan mengancam *impeachment*. Waktu itu nama programnya masih SIPESAT. Saya waktu itu tertarik untuk mengamatinya. Sudah didukung kok jadi dimusuhi habis-habisan. Kalau dilihat dari pandangan normatif mungkin susah mengamatinya. Maka saya mengkaji dari aspek politik. Ternyata kalau dilihat dari politik memang cukup rumit. Kemenangan Nur Mahmudi ini tidak langsung dilantik. Persidangan yang panjang sampai ke Mahkamah Agung segala. Antara Nur Mahmudi dan Badrul Kamal. Walaupun akhirnya dimenangkan Nur Mahmudi, tetapi kalau politik ini susah dihentikan begitu saja. Ada saja problema-problema yang walaupun masalahnya sederhana kalau dipolitisir jadi susah. Kan ada kasus-kasus tadi, yang mau di-*impeachment*. Itu pun terjadi menjelang pemilu legislatif. Sehingga di beberapa tempat ditengarai “dimanfaatkan” oleh para elite politik tertentu untuk mengangkat kasus UPS ini menjadi problema masyarakat. Contohnya di Koran Monde juga saya pernah baca waktu itu yang di Cipayung, di Rivaria, Pengamatan saya belakangan, saya diskusi dengan orang-orang ada caleg-caleg tertentu yang mengangkat momen itu secara berlebihan di media. Itu juga menarik perhatian saya. Waktu itu mengusulkan *talkshow* tentang pengolahan sampah. Dalam hal ini LKPD waktu itu mengundang pembicara Pak Walim dari dinas kebersihan, kemudian juga LSM nya, Bung Sahroel dari Yayasan Depok Hijau, pengamat dari UI. Dari situasi yang berkembang di *talkshow* dewasa itu yang menonjol itu sepertinya masalah kurangnya sosialisasi. Walaupun sebenarnya di koran juga banyak tentang hal itu. Bisa jadi masyarakat di bawah itu tidak pernah membaca koran. Keduanya yang diakui oleh Pak Walim sendiri, kepala Dinas, sosialisasi memang kurang intensif dilakukan. Juga dibalik itu, kenapa seolah-olah UPS ini dipaksakan harus ada, itu memang karena kebutuhan yang mendesak. Karena seperti yang dibilang Bu Sekda, TPA yang di Cipayung Jaya harus sudah habis. Sementara UPS belum jadi semua. Padahal produksi

Lampiran 13 (lanjutan)

sampah berjalan terus. Nah ini bagaimana menjalankan ini. Maka mau tidak mau pembuatan UPS yang sudah masuk rencana kegiatan tahunan daerah (RKTD) harus dijalankan. Sehingga yang harus dicari dari problem itu adalah mengapa kesannya DPRD tidak mendukung program ini, padahal dia sudah menetapkan melalui Perda. Kedua, kalau dilihat-lihat sebenarnya mengapa Dinas Lingkungan Hidup tidak semaksimal mungkin melakukan sosialisasi. Dan yang ketiga, Walikota mungkin tidak menjawab balik berita di koran mengapa terjadi seperti ini. Dia lebih menyerahkan kepada instansinya. Apakah itu memang kebijakannya, saya tidak tahu. Jadi intinya, UPS ini harus ada, Cuma pendekatannya yang kurang *smooth*, kurang bagus sehingga terjadi resistensi.

T : *Keentingan-keentingan apa saja yang terpengaruh kebijakan pembangunan UPS?*

J : Sebenarnya kalau dari sampah itu kalau diurai bisa lebih luas. Depok ini kan walaupun kotamadya, berbeda dengan definisi undang-undang tentang pemerintahan daerah itu kan kelompok pusat ekonomi, jasa dan sebagainya. Kalau diluar itu adalah kabupaten. Tapi Depok ini tidak seperti Jakarta. Masih potensial untuk daerah pertanian, tanaman hias, potensinya masih sangat besar sekali. Pangan, walaupun hanya 300ha. Jadi, walaupun statusnya kotamadya, tetapi unsur-unsur urbannya masih ada. Sebenarnya kalau dilihat dari potensi itu, UPS itu sangat berkaitan dengan pengembangan pertanian di kota Depok. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan dari UPS itu adalah pupuk organik (kompos). Kompos itu sangat luar biasa untuk mendukung pertanian di kota Depok. Yang terkait: petani, peternak, pengusaha pertanian organik. Selain itu dari pihak pemerintahan sebenarnya kalau bisa membuat program-program kreatif, contohnya yang di Sragen, Sragen itu kabupaten yang cocok dengan pertanian. Sampah-sampah yang ada di Sragen diolah menjadi kompos. Sehingga hasil pertanian padinya sudah padi organik. Karena antara pupuk organik dengan non organik (kimia), berbeda sekali kuantitas pemakaiannya. Kalau pupuk kimia pemakaiannya untuk 1ha mungkin hanya 3 kwintal. Tapi kalau memakai pupuk organik bisa berton-ton. Sehingga kalau pupuknya banyak, pasti terserap. Jadi disini yang perlu itu adalah menciptakan suatu pola pertanian dengan menggunakan kompos dan ramah lingkungan.

T : *Dari kebijakan UPS ini, kira-kira apa manfaat yang diperoleh dari kebijakan UPS ini oleh pihak-pihak yang terkait?*

J : Saya kira manfaatnya banyak. Pertama dari pihak Dinas Kebersihan, terbantu solusi masalah sampah perkotaannya. Karena di pasar, terminal, di pusat-pusat perbelanjaan banyak sampah, kemana membuangnya? Dengan adanya UPS ini bisa tertangani. Yang kedua, lapangan kerja. Lapangan kerja ini karena proses pemilahan ini memerlukan perhatian yang luar biasa. Jadi sulit, karena di rumah tangga sudah dipisah, tapi ketika dimasukkan truk, menyatu lagi. Jadi harus terpisah antara sampah organik dengan non organik. Nah itu bisa dilakukan dengan lapangan kerja dari pihak pemulung. Dari pihak petani tanaman hias sebenarnya konsumen terbesar untuk kompos. Karena tanaman hias itu lebih bagus jika dipupuk dengan kompos, daripada dengan pupuk kimia. Otomatis jika tanaman hiasnya bagus, mungkin akan meningkatkan pendapatan mereka. Mungkin dari pihak pemerintah daerah juga, pedagang kompos juga bisa, petani, juga menciptakan lapangan kerja, juga lingkungan. Sehingga jadi lebih bersih, karena bahan kompos yang biasanya dibuang atau menutupi saluran-saluran air itu kan tidak ada lagi. Semua terserap untuk dijadikan pupuk. Jadi banyak yang diuntungkan, petani tanaman hias, lingkungan dan menciptakan lapangan kerja.

Lampiran 13 (lanjutan)

T : *Sejauh mana perubahan yang diharapkan terjadi pada implementasi kebijakan UPS ini? dengan adanya UPS apa diharapkan apa yang terjadi pada skala individu, kelompok maupun masyarakat?*

J : Kalau di kampung, membuang sampah bisa di lobang sampah yang dibuat, bisa di sapu, di kali. Kalau di komplek-komplek ada kotak sampah yang ditaruh. Berbeda dengan UPS ini, kalau UPS itu sudah memulai pemilahan di skala rumah tangga. Karena untuk membuat kompos, harus dipilah sampah organiknya. Ini memerlukan luar biasa perubahan. Saya sendiri mencoba di rumah dengan membuat lobang untuk membuat pupuk. Itu masih saja pembantu di rumah, walaupun sudah dikasih tahu caranya, membuangnya masih gabung. Tetangga juga tidak pernah melakukannya. Hal ini disebabkan karena tidak ada *punishment*. Harusnya ada *law enforcement*. Jadi sekarang masalahnya, problem culture. Jadi harus ada perubahan sikap. Jadi sampah itu harus diperiksa, itu pekerjaan yang luar biasa yang memerlukan kesabaran. Jadi untuk UPS itu, kalau tidak ada program pendampingan, akan sulit. Jadi pemilahannya diharapkan sudah dilakukan di tahap rumah tangga. Selain itu, waktu truknya datang, harus disiapkan kotak khusus, jadi tidak boleh dicampurkan lagi antara sampah organik dengan non organik. Jadi di bak truknya dibuat 2 lubang. Untuk sampah organik dan sampah non organik.

T : *Adakah pengaruh letak/lokasi pengambilan kebijakan terhadap efektifitas implementasinya?*

J : Memang semua orang tidak mau ketempatan sampah. Bahkan kita yang memproduksi sampah tidak mau menyimpan sampah di rumah sendiri. Sampahnya biasanya dibuang ke tanah orang lain, ke sungai. Makanya saya pernah menulis di Monde itu, UPS Depok II itu ironis, egois banget, sampahnya sendiri kok dibuang ke tempat orang, jadi jelas-jelas masalah sampah ini terletak pada masalah kesadaran sikap. Mungkin menuju ke situ perlu waktu, tapi dengan rekayasa sosial diantaranya, memang keputusan itu menurut saya yang bagus ada pemetaan lokasi-lokasi dulu. Seluruh Depok ini ada 6 kecamatan. Kan, tidak semuanya itu bisa untuk UPS. Kalau perumahan, kan mungkin sudah sempit. Cari daerah-daerah untuk UPS ini yang lahannya luas, dan dekat dengan calon konsumen produk dari UPS yaitu pertanian. Cocoknya di Depok itu di daerah Pasir Putih, kan itu pertanian semua. Jangan dibuat di daerah perumahan seperti Pancoran Mas, seperti di Pesona Khayangan. Nanti disana siapa yang akan memakai produk dari UPS ini. Untuk mencapai daerah pertanian, cukup jauh. Nah jaraknya harus dipotong, karena akan menimbulkan *cost* lagi. Bahkan petani-petani itu, kalau dijelaskan fungsinya mungkin akan mengizinkan supaya UPS dibangun dekat dengan daerah pertaniannya. Jadi harusnya pemilihan lokasi ini harus berorientasi pada sentra-sentra pertanian. Bahkan mungkin jika dibangun lebih banyak disitu, tidak apa-apa. Pada kenyataannya disebar merata supaya tidak saling iri, tetapi tidak selalu bahwa merata itu bagus, kan? Kalau dia tidak membutuhkan produknya, nanti perlu biaya lagi untuk ngangkutnya.

T : *Siapa saja yang terlibat dalam pelaksana program atau implementator kebijakan sampah khususnya UPS? Mulai dari tingkat Perda, kewenangan Walikota dan DPRD. Kemudian ketika program dilaksanakan oleh SKPD terkait. yaitu Dinas. Kemudian Camat, lurah dan yang lain seperti apa?*

J : Sebenarnya nomor satu adalah pemda harus melaksanakan pendataan potensi lahan. Daerah-daerah pertanian itu mana saja sentra-nya. Setelah ketemu sentra-nya, luasnya berapa? Status lahannya milik siapa? Milik petani? Milik negara atau lahan apa? Dari situ

Lampiran 13 (lanjutan)

baru nanti dikomunikasikan. Ketika misalnya Musrenbang dengan masyarakat. Kan kadang-kadang masyarakat itu, kita sistem pembangunan kan tidak bisa *bottom up* seluruhnya dan juga sudah mulai dihindari. Jadi, untuk memancing kreativitas juga. Dari hasil kajian data dari survey tadi, ketika mendata ke lokasi-lokasi UPS tadi, nanti mudah-mudahan ketika Musrenbang tadi, kita akan membuat UPS, dan menurut kajian, lahan yang sesuai adalah ini, ini, ini. Bagaimana kalau kita jelaskan? Mungkin minta masukan. Misalnya di dalam UPS itu nanti cara kerjanya akan seperti ini, yang akan dilakukan seperti ini dan manfaatnya adalah seperti ini. Karena dalam teori psikologi, orang itu mau ikut pasti karena ada alasannya, apa manfaatnya bagi aku. Kalau tahu gak ada manfaatnya gak akan mau. Setelah itu disepakati, baru dijadikan Perda dengan walikota membuat keputusan, masuk APBD, dan itu nanti dianalisa oleh dewan. Dewan juga perlu mengecek ke lapangan. Dan kalau sepakat, baru dijalankan. Pengalaman yang UPS itu *pertama*, karena kurang sosialisasi, dan juga tidak melibatkan warga secara maksimal. *Ketiga*, kelemahan itulah yang harus dihadapi.

T : Yang paling krusial itu dimana pak? Untuk implementasi siapa yang harusnya menjadi leading sector, camat, lurah sebagai penguasa wilayah. Tapi pada kenyataannya program ini kan program DKP?

J : Untuk saya walaupun itu program dinas kebersihan, tapi sebaiknya warga dilibatkan. Misalnya dari kontraktornya, ketika proyek itu ditenderkan, yang dipilih perusahaan-perusahaan dari masyarakat saja. Jadi warga itu ikut. Sebagai contoh ini dana bantuan penghijauan. Itu kan diserahkan ke KPR. Kemudian nanti panitia, mengumumkan ada dana sekian, kalau disiapkan semua segini jadinya, tapi kalau pakai dana iuran akan bertambah. Jadi merasa diajak bicara. Karena bagaimanapun, memang, pembangunan manusia itu tidak bisa secara mekanistik, karena ada aspek-aspek psikologis. Nah itu yang kurang dipahami. Pokoknya kalau pendekatannya pendekatan kekuasaan, walaupun itu bisa berjalan, tapi itu akan ada aja masalahnya. Yang kemarin-kemarin tidak berjalan karena kurang pendekatan seperti itu.

T : Kita mulai penggunaan sumber daya, UPS ini kan memerlukan sumber daya, ada teknologi, SDM, hukum, dana dan sebagainya. Bagaimana peran kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya yang diperlukan dan bagaimana pengaturannya pelaksana-pelaksana yang bterlibat didalamnya. Ini kan menggunakan dana APBD yang tidak sedikit?itu, bapak melihatnya seperti apa?

J : Saya tidak secara spesifik melihat tentang bagaimana proyek itu dijalankan dan seperti apa. Tapi yang saya amati bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat itu yang paling penting. Yang sangat vital apa? Jadi ini seperti bejana berhubungan itu. Kalau permukaan airnya tinggi sebelah, yang lainnya akan turun. Jadi maksudnya begini, sedapat mungkin, pembangunan-pembangunan yang nantinya dampaknya melibatkan atau berdampak terhadap situasi masyarakat, usahakanlah masyarakat itu untuk dilibatkan sebanyak-banyaknya. Bagaimana mekanismenya? UPS kan selama ini diatur oleh pemerintah dan unsur-unsur pimpinannya dari pemerintah. Tapi sebaiknya dicoba ke sana. UPS itu nanti pelaksananya masyarakat. Ketuanya, misalnya manajernya UPS ini adalah siapa. Masyarakat dilibatkan di situ. Dan orang-orang yang keterampilannya diperlukan, mungkin dilatih. Contohnya, dalam pembuatan koperasi. Warga kan tidak biasa berorganisasi. Tapi kan koperasinya milik mereka nantinya, walaupun sepertinya saat ini mereka tidak membutuhkan, itu karena tidak tahu kalau ini penting. Penyelesaiannya seperti apa? Rekayasa sosial harus dijalankan. Training-training, diskusi, lokakarya,

Lampiran 13 (lanjutan)

sampai mereka memahami studi banding yang sudah berhasil, baru dibentuk kepanitiaan. Itulah yang dilegitimasi. Dilegitimasi oleh pemerintah untuk menangani itu. Sehingga mereka punya tanggungjawab penuh. Tapi kalau mereka cuma jadi penonton, akan ada saja masalah. Itu yang penting menurut saya. Kalau bisa misalnya jalan, pengaspalan jalan. Kenapa tidak masyarakat yang menjalankan? Misalkan anggaran proyeknya bernilai 100juta, tapi kalau ditenderkan mungkin paling tinggi 70 juta. Karena sebelum misalnya pajak, PPN, PPH, kemudian ada panitia-panitia kemudian supervisi, itu kan perlu dana semua, jadi penggunaannya bisa tetap 100%. Walaupun jumlahnya 100, tapi aktivitasnya penuh. Tapi kalau itu dijalankan oleh masyarakat secara gotong-royong dengan diawasi tim teknis, mungkin yang terserap bisa 80%. Sehingga luas jalan bertambah dan juga masyarakat memperhatikan adanya. Tetapi mungkin dalam administrasi proyek akan repot. Karena ini ditenderkan, kenapa harus dijalankan secara bergotong-royong. Jadi ada problem administrasi. Jadi hal ini yang menghambat masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan UPS. Dan seringkali orang-orang yang terlibat itu dari luar daerah, yang dibawa oleh perusahaan pemenang tender. Tetapi kalau masyarakat yang dilibatkan, itu pasti ngumpul. Selain itu murah juga. Dana terserap banyak.

T : Bagaimana bapak melihat kaitan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam pembangunan UPS? Misalnya disini ada LSM, tokoh politik, atau aktor yang menentang pembangunan UPS.

*J : Sebenarnya sampah itu masalah yang luas. Masalah manusia secara universal. Jadi kalau dipahami relasi konteks sampah dengan institusi, semuanya terlibat. Misalnya Dephankam atau kepolisian yang sebenarnya tidak terlibat dalam masalah sampah, tapi sebenarnya kalau dicari, individu polisi itu kan penghasil sampah juga, individu dewan juga penghasil sampah. Jadi pada dasarnya semua manusia terlibat sampah. Dan akan dihadapkan dengan problema sampah. Sehingga tadi dikatakan semua pihak harus terlibat. Tapi bagaimana melembagakan keterlibatan itu supaya ada ketertiban? Selama ini saya sudah melihat berjalan dengan baik. Hukum-hukum sudah melalui DPRD yang masuk dalam Perda. Proyek sudah ditenderkan sesuai dengan Keppres. Secara normatif sudah tidak ada masalah. Tapi kenapa jadi bermasalah? Masalahnya bukan pada proyeknya. Tapi pada implementasi kebijakan dengan pendekatan yang salah. Pendekatan yang salahnya apa? Memang proyeknya ditenderkan, tapi pengusahnya membawa orang-orang dari luar daerah untuk mengerjakannya. Tapi masyarakat tidak bisa begitu, tidak bisa hitam-putih begitu. Kalau mau hitam putih, ya harus betul-betul *law enforcement*. Untuk menjaga kalau ada apa-apa. Terlalu mahal, biaya dampak sosial yang harus ditanggung. Oleh karena itu sebenarnya, seringnya mengadakan koordinasi walaupun mudah dicontoh tapi susah dijalankan, koordinasi dan komunikasi pihak yang terkait itu. Dengan *talkshow* itu, adalah salahsatunya untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang tidak bisa lepas secara formal. Jadi dalam konteks ini, peran-peran tokoh masyarakat yang saya kira sangat penting. Misalnya dalam bidang keagamaan, bisa menginformasikan dalam shalat jum'at,*

T : Peran yang cukup sentral ini bisa dimainkan oleh walikota, DPRD atau siapa yang menjadi panglimanya di sini?

*J : Kalau secara formal, Walikota. Walaupun sistem yang harus bicara, kan kepemimpinan yang baik adalah berdasarkan sistem, bukan *per person*. Teorinya begitu. Tapi kalau sistemnya bagus *person*-nya tidak kuat, kurang berjalan juga sistemnya. Dalam *leadership*, kewibawaan itu penting. Contohnya di Klaten, kan luar biasa peran*

Lampiran 13 (lanjutan)

Walikota itu, Dewan itu kok bisa patuh begitu ya? *Leadership* itu, kadang-kadang susah dilogikakan, tapi itu penting sekali. Yang jelas nomor satu perannya walikota itu. Soalnya dia satu-satunya pemimpin eksekutif di daerah. Kalau legislatif, itu bagaimana komunikasi politik saja sebenarnya. Terus walikota juga kan punya pendukung politik, pendukung politik itulah yang harus memainkan peran komunikasi dengan “lawan” ataupun mitranya lah. Jadi politik itu sangat *grey area*, abu-abu. Bisa berubah cepat sekali.

T : *Kemudian karakteristik lembaga dan penguasa dalam konteks kebijakan ini, seperti apa yang dibutuhkan seharusnya? Yang selama ini terjadi seperti apa. Kan ini perlu instrumen lembaga dan orang-orang yang mengelolanya juga. Harusnya seperti apa supaya kebijakan ini efektif?*

J : Nomor satu ditingkatkan komunikasi dengan masyarakat, menurut saya. Terutama masyarakat yang akan punya potensi akan ditempatkan (UPS). Misalnya daerah Pasir Putih, Cimanggis, Sawangan, pokoknya daerah pertanian di Depok, itu perlu banyak dikomunikasikan di sana. Ya pejabatnya, Walikota, Sekda, kepala Dinasnya. Kan nggak semua daerah hanya daerah tersebut. Keduanya forum-forum masyarakat, juga dijalankan. Sekarang ini peran media massa itu luar biasa terhadap pencitraan dan merubah paradigma baru. Dan itu harus digunakan oleh humasnya kota Depok untuk mendukung hal itu. Semua kelembagaan di masyarakat seperti kelompok tani, mina nelayan, itu harus secara intensif dikomunikasikan. Kalau secara formal, normatif, mungkin bisa berjalan, tapi kan bisa muncul ketidakpuasan. Jadi menurut saya pada tahun 2008 yang terjadi adalah pendekatan kemasyarakatannya kurang intensif dilakukan.

T : *Kalau walikota sendiri dalam pembanguna UPS tahun 2008 seperti apa?*

J : Kalau peran Walikota sudah bagus, tapi kehumasannya ini. ibaratnya begini: kita punya petinju yang potensial, tapi promotornya tidak bisa menjual. Petinjunya tidur-tiduran di rumah. Padahal dia ingin memenangkan pertandingan ini, kejuaraan ini, tapi promotornya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadinya petinju ini tidak dikenal. Jadi intinya adalah humas. Walikota itu kan cuma satu orangnya, sudah itu perannya dibagi-bagi dan seterusnya. Ada Dinas Kebersiahnnya, Dinas Pasarnya, ada humasnya, begitu semuanya harus dioptimalkan. Selama ini menurut saya, kurang.

T : *Programnya sendiri kan program DKP, peran DKP sendiri seperti apa?*

J : Buktinya dengan adanya resistensi, menunjukkan bahwa perannya kurang berhasil. Itu indikatornya kan? Kalau tidak ada resistensi, berarti sudah berhasil. Camat dan lurah juga otomatis kurang berhasil.

T : *Artinya kekecewaan masyarakat pun tidak berlanjut sampai level tertinggi/ walikota. Ketika permasalahan itu bisa diselesaikan di level kelurahan, tidak perlu lagi turun secara langsung.*

J : Ya, betul. Kan dalam struktur pemerintahan ada hierarki ya, kalau sudah cukup lurah, kenapa harus ke level yang lebih tinggi? Ini menunjukkan struktur itu tidak berjalan dengan baik.

T : *Peran DPRD sendiri seperti apa?*

J : DPRD itu sebenarnya kalau dari aspek ini fungsinya adalah mengamati. Justru dalam DPRD itu mestinya begini, ini Perda sudah di-acc, anggaran sudah disediakan, kenapa

Lampiran 13 (lanjutan)

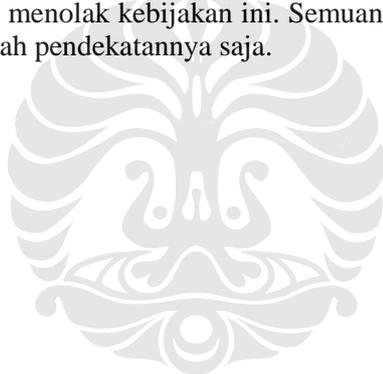
tidak berjalan program ini, kan gitu. Akhirnya meneliti, apa masalahnya? Kenapa di masyarakat terjadi penolakan? Lalu dari hasil penelitian itu, ketika bertemu dengan pemerintah, “ Ini hasil kajian saya, masyarakat tidak mau mendukung program kita itu karena ini”. Tapi DPRD tidak melakukan itu, malah sepertinya hanya bertanya kenapa pemerintah sampai terjadi begini-begini? Karena DPRD digaji dari APBD yang sumbernya dari rakyat juga, mestinya DPRD mendukung program ini. Silahkan keberatan, tapi solusinya seperti apa.

T : *Kaitannya dengan birokrasi yang ada, bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan UPS ini?*

J : Kalau secara spesifik, saya tidak mengkaji hal itu, tapi mungkin salah satu faktor adanya resistensi, program yang tidak jalan, memang ada *something wrong* ya. Apakah karena administrasinya? Programnya susah dijalankan? Atau SDM di instansi tersebut tidak profesional dalam menjalankan kebijakan itu. Itu diantaranya sikap-sikap seperti kepatuhan, loyalitas aparat pemerintah terhadap atasan tidak berjalan, saya tidak tahu.

T : *Kalau secara hukum, tidak terungkap penolakan birokrat terhadap kebijakan ini?*

J : Saya kira kalau secara umum saya tidak mendengar atau mendapat informasi bahwa banyak birokrat yang menolak kebijakan ini. Semuanya berusaha untuk mewujudkannya, cuma mungkin masalah pendekatannya saja.



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN NO. 13

Tanggal wawancara : 24 Juni 2009

Tanya (T) : *Bagaimana latar belakang UPS?*

Jawab (J) : Kebetulan yang menyusun RPJMD itu adalah teman-teman yang dari UI, mendapat masukan dari masyarakat. Beliau (Walikota Depok) *roadshow*, kemudian *open house* di rumah. Beliau mendapat banyak masukan dan ternyata masalah sampah itu penting di kota Depok. Dan dulu, kan Depok pernah dapat Adipura satu kali, setelah itu gak pernah dapat lagi. Entah Depoknya menurun atau kriteria Adipuranya yang meningkat. Tapi yang pasti beban kota makin besar. Dulu, TPA kita ini pernah jadi *pilot project*-nya ADB. Jadi, ada unsur politik itu, kemudian Depok dapat Adipura nggak tahu juga, ya. Tapi, yang pasti sampah Depok meningkat. Sehingga dimasukkanlah masalah sampah ini dalam RPJMD. Sebenarnya pendekatannya tidak hanya UPS. Pak Lutfi ingin sistem pengolahan sampah terpadu ini komprehensif. Ada 3 pendekatan, yang pertama lewat TPA. Kemudian pendekatan secara kawasan. Dan pendekatan secara rumah tangga. Pendekatan lewat TPA-nya apa? Yaitu meningkatkan infrastruktur dan pengolahan di TPA. TPA yang selama ini *open dumping*, diubah menjadi *Sanitary landfill*. Luasnya tidak ditambah, sampah meningkat sehingga beban TPA semakin besar. Dengan luas TPA 11 Ha dan produksi sampah kota Depok sekitar 3000 m³/hari, prediksi waktu itu, waktu penyusunan RPJMD, tahun 2011 akan terjadi puncaknya kalau hanya TPA yang diandalkan. Sehingga bisa jadi komoditas politik yang riskan, di 2011 itu. Perlu ada pencegahan.

T : *Itu kan idenya sudah disampaikan saat kampanye? artinya sebelum itu kan sudah diumumkan oleh Tim Sukses.*

J : Memang ada Tim Sukses yang berharap itu masuk RPJMD. Jadi untuk TPA itu peningkatan infrastruktur, kemudian peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan sistem pengolahan. Bahkan sistem pengolahan itu ada macam-macam. Ada yang CDM (*Clean Development Mechanism*) itu bisa dilakukan, tapi sudah beberapa kali pemerintah kota sudah tidak mau dengan pendekatan ini. Jadi, mereka terikat oleh protokol. Pak Sudarmaji memberikan bantuan. Yang saya tangkap, itu bisa menjadi PAD juga. Namun karena TPA kita juga kecil, sehingga tangkapan gas metannya juga tidak terlalu banyak. Pendekatan berikutnya yang menjadikan TPA sebagai *sanitary landfill*. Tapi dengan lahan kita yang terbatas, itu susah juga gitu. Kan, kalau *sanitary landfill* itu dibangun lubang. Kemudian sampah yang dimasukkan diurug lagi. Sehingga diharapkan, nanti ketemu sudah menjadi tanah lagi. Tapi dengan kondisi yang hanya 11 Ha, ini jadi gak bisa ke mana-mana. Jika dibandingkan dengan Bantar Gebang yang luas sekali. *Sanitary landfill* pun ada kendala. Kalau begitu mungkin kita bisa lakukan *composting*. Itu tadi pendekatan secara TPA. Kemudian ada pendekatan secara kawasan, itulah yang sekarang dikenal sebagai UPS. Nah, ini merupakan ujung tombak dari segala proses yang 3 pendekatan tadi untuk saat ini. Kenapa? Karena satu, sampah itu tidak bisa meninggi. Karena dia harus segera diolah, segera ditangani. Yang kedua, itu pendekatan teknis bukan pendekatan non-teknis. Pendekatan teknologi.

Kemudian berkembanglah UPS itu. Memang kapasitas UPS itu bisa menangani 3000KK per UPS itu. Atau sekitar 3 RW lah. Nah, pendekatan ketiga, yang sebenarnya, yaitu skala rumah tangga. Nah, kalau rumah tangga itu di dalamnya ada sosialisasi. Ini kemudian

Lampiran 14 (lanjutan)

dilakukan penyadaran kepada masyarakat rumah tangga untuk mereka melakukan pengolahan atau pemilahan. Sehingga sebenarnya, *budget* untuk sosialisasi untuk rumah tangga itu seharusnya lebih besar. Itu yang menurut saya 3 pendekatan ini harus berjalan beriringan. Kenapa *budget* untuk rumah tangga itu harus lebih besar? Karena proses sosialisasinya memakan waktu lama. Contoh kasus, di Jakarta perlu waktu 20 tahun untuk mensosialisasikan dan itu hanya bisa di satu RT. Bayangkan, kalau kita mau mensosialisasikan/mengedukasi seluruh kota perlu waktu berapa puluh tahun? Karena sampah tidak bisa menunggu.

T : *Itu keadaan yang ideal ya?*

J : Ya, ini memang yang paling ideal. Pendekatan rumah tangga itu kendalanya di waktu yang dipoerlukan sangat lama. Pendekatan teknologi ini yang dilakukan dengan UPS, perlahan dan sistemik, rumah tangga ini perlu diberdayakan. Cuma yang terjadi adalah kenapa penolakan terjadi di kota Depok. Budget untuk sosialisasi itu rendah. Karena kebiasaan di Tim Anggaran pemerintah, itu dana untuk sosialisasi itu di-*cut*. Padahal masalah sampah ini masalah sosial. Bukannya hanya masalah teknologi, tapi masalah sosial.

T : *Itu Panitia Anggaran yang memotong anggaran?*

J : Ya, jadi beberapa kali sosialisasi, bahkan ini sempat kita bicarakan harus ada untuk yang namanya kader lingkungan hidup. Jadi, di setiap RW itu ada yang mengedukasi warga secara pelan-pelan. Sehingga mereka bisa memahami bahwa UPS ini, adalah solusi cepat. Tapi, bukan solusi yang permanen. Solusi yang permanen itu adalah masyarakat. Kenapa solusi cepat? Karena kita ada kendala di TPA, sementara produksi sampah meningkat.

T : *Nah ini juga yang pernah disitir oleh LSM, saya juga pernah bertemu LSM, Pak Sahroel ya, ini memang seharusnya dibikin skala rumah tangga. Tidak di-mekanical-kan, mengandalkan mesin untuk menjalankan segala proses pengolahan. Masyarakat, rumah tangga kurangi sedikit-sedikit. Padahal kalau di rumah tangga misalnya sampah sudah terpilah, itu akan memudahkan dan beban UPS pun gak akan berat. Kalau itu gerobak sampah dari rumah tangga isinya sudah terpilah, organik/non-organik, ketika composting itu tinggal dicacah saja. Cuma itu tadi kendalanya kan, cukup sulit untuk mengedukasi masyarakat.*

J : Itu masalahnya di anggaran, jadi teman-teman di Dinas Kebersihan, idenya sudah masuk ke Tim Anggaran. Tim Anggaran ini multi disiplin, ada dewan juga di dalamnya.

T : *Jadi sebenarnya berapa anggaran sosialisasi? karena yang masuk anggaran kan dana untuk hanggar dan mesin.*

J : Hanya ada tiga kali sosialisasi di level kecamatan, di level kota tiga kali juga. Menghadirkan seluruh kepala Dinas, terus tokoh masyarakat, kemudian mengundang kader-kader PKK, di tahun lalu, pada 2007. Nah, hanya itu.

T : *makanya ketika saya tanyakan mengenai sosialisasi mereka mengatakan, "Kami sudah melaksanakan sosialisasi sesuai dengan jatahnya sekian, saya tidak bisa keluar dari itu"*

J : Kalau Dinas mengatakan sudah melakukan sosialisasi, memang sudah. Tapi kurang optimal. Nah itu yang jadi pertanyaannya.

Lampiran 14 (lanjutan)

T : *Makanya di 2009 anggarannya akan dinaikkan, karena disinyalir ada masalah sosialisasi. Walaupun saya ketemu di lapangan, masalahnya nggak sesederhana itu, bukan hanya masalah sosialisasi. Ada masalah lain, selain sosialisasi.*

J : Kemudian selain masalah faktor sosialisasi, ada juga faktor sosial, banyak hal lah. Masalah sampah ini merupakan masalah besar, masalah yang serius di seluruh kota di Indonesia. Tapi kemudian, ada yang menanganinya dengan serius, ada juga yang kemudian, ya sudah bagaimana caranya supaya tidak jadi polemik saja. Semuanya berharap ke TPA. Padahal TPA itu bukan solusi inti, karena hanya memindahkan masalah. Jadi, ini hanya solusi cepat. Pertanyaannya bisa sampai berapa lama? Selama masyarakat bisa mengedukasi diri. Setelah teredukasi dengan baik, kemudian mampu melakukan pemilahan dan pengolahan sendiri. Berapa tahun? Nah ini, seperti tadi dibahas, ini perlu waktu puluhan tahun. Tapi itu dengan segala sumber daya manusia, pendanaan. Perda mengenai sampah kita hanya mengenai retribusi. Tidak ada Perda mengenai insentif dan disinsentif pada masyarakat. Apa keuntungan masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengolahan sampah sendiri? Insentif apa yang dia terima? Kemudian disinsentif apa yang diterima masyarakat yang membuang sampah sembarangan? Perda-nya belum ada nih. Mungkin kalau lembaga legislatif bisa *propose* ini, ini sangat baik untuk meringkai seluruh peraturan, Perda. Misalnya berupa potongan PBB, itu harus berupa Perda kan? Atau retribusi sampah dinaikkan. Misalnya 3 x lipat. Tapi ditegaskan bagi yang memilah sampah. Jadi masyarakat berpikir, daripada bayar mahal, mending mengolah sendiri lah. Tapi harusnya kita beruntung punya kepala daerah punya kepedulian terhadap masalah sampah. Sehingga masukan-masukan beliau terkait program-program ini diperlukan, dari akademisi, dari masyarakat, untuk menyempurnakan. Mumpung ada kepala daerah yang peduli.

T : *Kriteria indikasi keberhasilannya itu kan terbangun 60 UPS. Pemda kan ukuran keberhasilannya itu.” Kan cuma 3 yang resisten, masih 75% lah, kami masih berhasil”. Pembangunan tahun-tahun berikutnya kan masih ada, nah artinya potensi resistensi akan tetap ada kalau ini nggak ditanggulangi. Makanya ini saya coba, nanti kasih masukan juga.” ini lho, ini memang ada masalah ketidaktahuan, kekhawatiran terhadap sampah.” Kalau ketidaktahuan, ya dikasih tahu. Tapi ternyata saya lihat di lapangan ada” saya belum dikasih tahu”, oke dikasih tahu. Sudah dikasih tahu, nggak mau tahu juga. Jadi ternyata bukan masalah itu. Ada masalah ego atau apa ya. Relasi kekuasaan lah, “ini wilayah saya.” Nggak malu lah buang sampah di daerah lain, yang penting lingkungannya bersih.*

J : Betapa masyarakat itu tidak paham sebenarnya dengan program itu. Itu terlihat misalnya begini, ketika wilayah itu TPS, sampah numpuk, warga biasa ke TPS. Tapi ketika TPS itu dikembangkan, kita ada perbaikan nih dijadikan UPS, masyarakat jadi menolak. Berarti kan ada sesuatu yang salah. Kenapa dengan TPS yang sampahnya 4 hari baru diangkut, itu kan tempat penampungan sementara, sampah itu 2 hari sudah bau. Pemerintah ingin TPS yang begitu ditingkatkan menjadi UPS sehingga sampah pada hari itu diolah pada hari itu juga. Tapi masyarakat menolak. Diperbaiki malah menolak. Berarti ada informasi, ada rekayasa sosial yang belum berjalan. Memang itu betul. Inilah harusnya menjadi ranahnya teman-teman LSM untuk mendorong pemerintah. Pemerintah kita ini hampir di semua tempat selalu gagal dalam sosialisasi. Semua, BLT juga. Atau

Lampiran 14 (lanjutan)

perubahan konversi minyak tanah ke gas. Maksudnya baik, tapi karena sosialisasinya lemah, jadi salah.

T : *Saya di lapangan, bukan ke masalah personal Pak Nur ya, pemerintah sudah memberikan public service yang baik, tapi imbalannya di masyarakat itu rendah sekali. Kok malah jadi dipolitisir.*

J : Itu perlu ada program terobosan berkaitan dengan sosialisasi yang bisa dilakukan sehingga menjadi program sosialisasi yang efektif. Apakah bisa menjadi efektif dengan *budget* yang tersedia. Tapi saya pikir memang yang perlu dilakukan adalah merubah pola pikir Tim Anggaran bahwa sosialisasi itu hanya pelengkap. Itu yang ada dalm pikiran teman-teman birokrat. Padahal itu penting.

T : *Saya ngobrol dengan teman-teman LSM, dia ingin mendorong good governance. Ada partisipasi, artinya ada keterlibatan masyarakat. Untuk masyarakat bisa terlibat kan butuh edukasi, ya itu tadi harus ada anggaran lebih untuk masyarakat. Kemudian UPS, bagaimana caranya supaya masyarakat bisa memilah sendiri. Kalau ada penyuluhan atau apa kan? Itu kan lebih besar ketimbang pertemuan 3 kali. Dengan wakil-wakilnya saja sudah merasa sudah selesai,” memang jatahnya sekian, saya sudah melaksanakan sekian”.*

J : Saya pernah ngobrol sama Tim Anggaran, itu kalau kita mendengar pola pikir mereka, “Wah ini masa anggaran sosialisasi besar sekali? Nanti biar urusan camat dan lurah yang mensosialisasikan.” Tapi tidak sesederhana itu. Orang birokrasi harus bekerja. Itu kan harus ada parameter yang bisa diukur. Apakah sosialisasinya sudah berjalan. Pendekatan sendiri. Dan ini memang menurut saya bukan karena birokrat lah untuk melakukan sosialisasi. Karena selalu ada birokrasi kita, selalu ada *barrier* antara birokrat dengan masyarakat.

T : *Harus ada intermediate ya?*

J : Ya, harus ada *intermediate* yang menjembatani ini. Karena begitu pemerintah mengundang masyarakat untuk sosialisasi, yang terpenting buat mereka, “Wah tandatangan, amplop nih” . Jadi datang itu tidak dengan semangat. Tapi kalau ada intermediasi kan sosialisasi ini bisa tersampaikan tanpa masyarakat teracuni. Karena dimana-mana setiap ada sesuatu di luar kebiasaan masyarakat, ini kan pola pendekatan pemerintah ke masyarakat. Bahwa masyarakat itu sudah selesai dengan “amplop”. Birokrat melaksanakan itu juga sebenarnya tidak salah karena pola pikir mereka pola pikir anggaran. Jadi bukan pola pikir teknis operasional. Anggaran ini kan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi. Bahwa mereka sudah melaksanakan sosialisasi. Dan kalau sosialisasi, masyarakat harus tandatangan. Akhirnya harus ada yang bergerak yang melakukan intermediasi dengan pemerintah yang dananya didanai oleh APBD.

T : *Selama ini belum ada ya istilah itu?*

J : Karena terikat lagi, peraturan bahwa bantuan kepada lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga *non profit* hanya satu kali dalam masa pemerintahan.

T : *Tentang 20 UPS ini, dari Dinas berkewajiban untuk realisasi. Sekarang mereka:”Pokoknya mau nolak atau tidak, tetap akan kita bangun”. Karena kita pertanggungjawabannya ke RPJMD yang kuat secara Perda. Dan ini karena fasos/fasum*

Lampiran 14 (lanjutan)

ya jadi akhirnya kuat-kuatan. Karena ke masyarakat juga sudah disampaikan begini-begini tapi tetap mereka tidak mau tahu.

J : Terus terang kita, pemerintah butuh sekali itu. Sekarang bagaimana LSM-LSM di Depok mengumpulkan ide-ide di masyarakat kemudian menjembatani program. Sekarang LSM di Depok juga terbatas ya. Mau bergerak seperti idealisme itu. Takut terjebak secara politis. Logistik itu bisa kita dapatkan jika kita punya program, punya kompetensi yang baik dan bisa kita tolong pemerintah. Pak Nur saya pikir juga cukup peduli dengan masalah lingkungan, tapi tidak diharapkan beliau memikirkan ini sendiri. Jadi itu kewajiban semua pihak yang mau berperan.

T : *Ketika kebijakan didorong, ketika banyak resistensi, itu tidak ada LSM yang support ya?*

J : Ada sih, di Cinere. Tapi kan support-nya hanya bersifat fisik. Tapi selain itu, harusnya ada support ide, support program. Harusnya ada lembaga yang urun rembuk masal. Tingkat daerah gitu. Jadi itu sebenarnya masyarakat ingin didengar. Siapa yang memfasilitasi itu? Karena ketika pemerintah melaksanakan itu, ada resistensi. Bahkan Dinas sendiri sampai ditunjuk-tunjuk dimaki-maki, padahal itu untuk kepentingan mereka juga.

T : *Mungkin yang maju itu harus aktor ketiga? Pemerintah dan warga duduk sama-sama. Karena kalau pemerintah yang dulua, "wah pasti ini ada maunya".*

J : Ya, berarti kan pihak ketiga itu.

T : *Saya amati juga, sekarang ini ada degradasi, istilahnya ada modal sosial yang hilang. Ketika masyarakat ada pemimpinnya, anggaplah pemerintah itu pemimpinnya, itu sudah tidak dianggap. Ketika ada lurah ke sana, lurah menyampaikan program itu nggak didengarkan dulu, camat nggak, mereka menolak. "Kalau mau, sini Pak Wali langsung." Pak Wali datang, masalahnya nggak hilang juga. Jadi, ada trust yang hilang.*

J : Saya mau koreksi kata "masyarakat". Masyarakat apa ? Ternyata orang yang datang itu orang yang berkepentingan. Mungkin ada kepentingan-kepentingan dari atas itu melalui birokrasi.

T : *Itu semua yang saya temukan, di daerah-daerah yang resisten, dan itu ada latar belakang politiknya. Walau apapun ini ada faktor problemnya. Dan setelah Pilkada selesai, kan "turun", artinya sangat-sangat berkepentingan, lihat saja nanti kalau mau Pilkada.*

J : Kalau saya lebih cenderung pada budaya politik masyarakatnya nggak bagus. Kalau ada yang bergerak, pasti ada tanda tanya.

T : *Itu perlu energi lebih untuk membuat poros yang besar untuk mendorong. Kalau dia bergerak, berarti ada apa-apanya.*

J : Saya berharap teman-teman di Jangkar, karena dulu di Jangkar kita pernah bikin untuk pengolahan sampah. Kami harap pembiayaannya itu dimasukkan ke APBD, sehingga nantinya kita kawal. Dulu kan sempet teman-teman bikin biopori. Itu sebenarnya bagus untuk pintu masuk. Cuma kan akhirnya teman-teman terjebak lagi pada mengintroduksi teknis. Biopori selesai, akhirnya tergilas lagi teknisnya juga dengan urusan birokrat.

Lampiran 14 (lanjutan)

T : *Itu dari kebijakan.*

J : Kalau biopori lagi, akhirnya kita kena. Akhirnya, ini lebih baik, ini lebih baik. Dan masyarakat dari sisi persampahan, mengunggulkan programnya masing-masing.

T : *Saya ada informasi dari Pak Sahroel, mesin ini kan dari Pak Singgih. Nah Pak Singgih sendiri dia refer ke Bu Sri Bebasari. Bu Sri ini memang ideal, pengolahan di level rumah tangga. Jadi nggak mekanisasi pengolahan sampah. Itu memang sangat besar memang biayanya segala macam. Saya bilang UPS ini langkah pragmatis, tengah-tengah.*

J : Mengenai Bu Sri Bebasari, di satu sisi, kadang-kadang ya, saya tidak setuju dengan pendapat beliau. Karena dia sering menyalahkan pihak lain. Karena menurut kita, dalam pengolahan sampah, kalau masalah teknis, itu bisa kita adopsi semuanya. Mau biopori, mau pendekatan secara rumah tangga, karena tadi sistemnya itu 3 pendekatan tadi. Komposter, itu semua harus diadopsi. Kan masyarakat ini terlalu beragam untuk dimasuki sistem tunggal. Ada masyarakat yang kulturnya mungkin malas untuk bikin komposter. Buang ke UPS saja biar diolah. Ada masyarakat yang kepeduliannya sangat tinggi terhadap sampah. Sehingga dia olah sendiri menjadi kompos. Silahkan, gitu. Kalau kita berputar dan *trial*, nanti kita akan ketemu. Jadi nggak boleh terpaku pada satu sistem, biopori ayo, komposter ayo. Itu tadi, ini tidak hanya jadi ranah pemerintah, tapi LSM juga.

T : *Makanya saya lihat DKP sebagai leading sector-nya akan keteteran kalau mengurus sampah. Sedangkan sampah itu urusan setiap orang. Dan mungkin ada kebijakan, komunitas itu harus punya pengolahan sendiri. Misalnya kalau membangun apartemen harus bikin pengolahan sampah, kalo nggak ya nggak akan diizinkan. Di sekolah, pasar.*

J : Pak Wali, walaupun tidak dirumuskan di peraturan. Secara informal beliau, setiap perumahan di atas 1000 rumah, diwajibkan memang membangun 1 UPS. Jadi, dia tidak boleh membebani TPA. Kalau di perumahan kan mungkin bisa terkondisi kalau sejak awal proses pembangunan, mereka sudah disampaikan itu.

T : *Seperti di Rivaria, itu kan fasilitas umum, mereka menganggap fasilitas umum itu ya buat mereka bersenang-senang, buat rekreasi, bukan buat pengolahan sampah. Padahal kalau analoginya rumah, itu kan nggak semuanya ruang tamu. Harus ada WC. Jadi tetap harus ada buat ngolah. Merka kan nggak.*

J : Kadang-kadang kita menganggarkan sekian banyak rupiah untuk perbaikan ruang tamu. Mungkin anggaran untuk memperbaiki WC, rendah. Jadi sementara orang bersih atau tidaknya dilihat dari kamar mandinya kan?

T : *Jadi kalau ada UPS yang jelek, yang kotor, itu bagaimana pengelolaannya ya? Sekarang masalahnya UPS-nya sudah ada, kalau itu memang macet, nggak jalan, itu tidak selalu operasional. Itu dari kebijakan lagi. Sekarang bagaimana meyakinkan masyarakat karena sudah 19 atau 20 lah dengan yang lain. Ini harus bisa jadi percontohan. Masyarakat kadang ingin lihat dulu. Baru dia percaya. Bukan katanya-katanya lagi. Katanya bau, katanya ada air lindinya, macam-macam. Kalau yang sudah berjalan kan nggak. Tapi memang ada beberapa yang menolak itu, dia bilang gak mau tahu biarpun sudah diajak kemana-mana, tetap saja nggak ini. "pokoknya nggak mau*

Lampiran 14 (lanjutan)

ada (UPS) di tempat saya”. Akhirnya seperti di Taman Cipayung, mereka buat pengolahan sendiri. Pengolahannya gimana? Akhirnya dibakar.

J : Padahal itu pembakaran sampah kalau panasnya kurang dari 500°C, itu malah beracun. Tapi tujuannya kan, masyarakat peduli pada masalah sampah. Pemerintah Depok pernah didekati oleh salah satu pengusaha. Dia bawa *forklift* dari Amerika. Ternyata, Amerika itu saat ini ya mereka membutuhkan kompos dalam jumlah sangat besar. Mereka mau import sampah dari kita. Kok mereka perlu kompos? Ternyata setelah revolusi hijau mereka mengalami degradasi tanah yang luar biasa. Mereka merasa bergantung pada kimia dan pestisida, sehingga tanah mereka hancur. Mereka perlu memperbaiki komposisi hara tanah mereka. Yang mereka bisa harapkan adalah pupuk organik. Itulah mereka menggalakan organik. Sementara kita terus dimasuki dengan program intensifikasi pertanian. Berarti kan pertanian menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Mereka sudah bergerak ke organik dengan mengambil kompos dari kita. Mereka yang lagi butuh pupuk organik, kita lagi bermasalah sama sampah yang sebenarnya bisa dibikin pupuk organik. Malah kebalikan gitu. Kompos dari Depok kan bisa dijual. Secara kasat mata kita bisa untung besar. Tapi jangka panjangnya negara kita jadi lemparan produk terus. Ini terkait sosialisasi juga tentang organik dimasyarakat. Sehingga kompos yang dihasilkan dari pengolahan itu bisa dimanfaatkan. Tapi jangan terjebak” ah itu tidak menguntungkan, karena kompos harganya rendah” gitu kan? Nah itu salah lagi pola pikirnya. Karena mengolah sampah menjadi pupuk organik ini kan dengan membuat kompos. Kompos itu hasil sampingannya. Kalau itu dimanfaatkan atau tidak, itu perkara lain. Mengolah sampahnya yang penting.

T : *Kan itu kan, ada yang bilang kalau dari pengolahan sampah dibikin kompos, : “Ngapain jual kompos, itu gak akan balik modal”. Kalau pendekatannya kayak gitu ya mending jualan saja.*

J : Betul. Sekali lagi dalam menempatkan sistem ini bahwa itu gak balik modal. Itu salah. Ini kan program pengolahan sampah. Kompos itu hasil sampingannya.

T : *Kalau dari implementator atau dari aparat-aparatnya itu mereka sebenarnya patuh nggak sih pada kebijakan ini? memang tidak terdengar resistensi di kalangan birokrat. Nah jadi mereka patuh.*

J : Kalau tingkat kepatuhan mungkin patuh ya. Tingkat kepehaman yang kita belum tahu.

T : *Mereka respon gak? Harusnya ini kalau kepemimpinannya kuat, masalah di kelurahan kan cukup tuntas di lurah. Bisa berjalan dari A sampai Z. Artinya mereka juga sebagai pilar-pilar di bawah itu kan lurah. Nggak perlu lah sampai ke camat atau ke Pak Walikota sendiri.*

J : Jadi, DKP tidak usah berurusan lagi dengan masalah-masalah ini.

T : *Kalau di kelurahan kan ada pertemuan mingguan, yang namanya Minggon, di kecamatan juga tiap minggu. Harusnya tiap minggu lurah itu bertemu dengan RW. Harusnya tiap minggu masalah-masalah itu diungkapkan, masalah kesehatan, kebersihan, keamanan, itu kan bisa tertangkap kalau ada resistensi sejak dini. Jadi sejak dini sudah terpantau.*

J : Masalahnya, kita kan seolah-olah jadi sesuatu yang... orang yang datang cuek saja. Tidak lagi di dalam suasana yang seperti di balai, gitu lho.

Lampiran 14 (lanjutan)

T : *Makanya mungkin pendekatannya harus formal. turun ke lapangan, mungkin lurah jalan-jalan, ngobrol, atau apa gitu ya.*

J : *Tetap terpentingnya LSM di Depok lah, jadi ketika LSM-nya kuat, itu mampu menjembatani.*

T : *Nah, benar.*

J : *Kalau lingkungan mau dibenahi, dia mau memfasilitasi menjelaskan ke keluarganya agar program itu berjalan.*

T : *Jadi, jangan diharapkan kalau pemerintah yang melakukan itu. Masyarakat memfasilitasi dirinya untuk bekerjasama dengan pemerintah.*

J : *Jadi, kecurigaan masyarakat kepada pemerintah sudah terbangun.*

T : *Tapi kalau penolakan ini nggak ada..., saya masih belum lihat ini kaitannya dengan resistensi, pemilihannya Pak Nur, sampai saat ini saya belum lihat. Jadi ketika itu, masih tersisa lah. Jadi aktor-aktornya itu bukan aktor-aktor yang bersengketa di Pilkada.*

J : *Bahkan, kalau Taman Cipayung, Pak Arief Budiman itu kan kandidat calon wakil walikota. Jadi, ada beberapa kandidat calon wakil walikota, Pak Arief Budiman, Pak Yuyun, dan yang terpilih oleh Pak Nur itu Pak Yuyun. Tapi kita juga tidak bisa melihat bahwa yang sekarang terjadi adalah dampak dari peristiwa saat itu. Karena kalau waktu itu sakit hati, mestinya ada gerakan saat itu. Ini kan nggak. Artinya memang tidak ada korelasi.*

T : *Ini kan menjelang Pilkada kan? Kuatnya di situ. Dia butuh eksis, populer, saat pemilihan dia. Rivaria juga gitu, (caleg) dari PKB, Pak Fuad.*

J : *Iya, itu kan bisa buat menarik massa.*